# PEREMPUAN DAN POLITIK DALAM PERSPEKTIF ELIT ORGANISASI MUHAMMADIYAH

**(Studi Kasus di Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Timur)**

KEMENTERIAN AGAMA PERPUSTAKAAN IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA

**SKRIPSI**

**Diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel**

**Surabaya Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat**

**Memperoleh Gelar Sarjana Ilmu Sosial dalam Program**

**Studi Filsafat Politik Islam**

PERPUSTAKAAN
IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA
No. KLAS: K 4.2011 010 P1
No. REG: 4.2011/P1/010
ASAL BUKU:
TANGGAL:

*Oleh :*

**BERLINA VIRGIATI**

**NIM. E04207005**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA**

**FAKULTAS USHULUDDIN**

**PRODI FILSAFAT POLITIK ISLAM**

**JULI 2011**

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

# PENGESAHAN TIM PENGUJI

Skripsi oleh Berlina Virgiati ini telah dipertahankan di depan
Tim Penguji Skripsi

Surabaya,13 Juli 2011

**Mengesahkan,**
**Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel**
**Fakultas Ushuluddin**
**Dekan,**

**Drs. Ma'sum Nuralim, M.Ag.**
NIP. 196009141989031001

**Ketua,**

**Dra. Anik Nurhayati, M.Si**
NIP. 196909071994032001

**Sekretaris,**

**Laili Bariroh, M. Si**
NIP.197711032009122002

**Penguji I,**

**DR. Biyanto, M.Ag.**
NIP. 197210101996031001

**Penguji II,**

**Holilah, S.Ag, M.Si**
NIP. 197610182008012008

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

# PERNYATAAN

**Perempuan Dan Politik Dalam Perspektif Elit Organisasi Muhammadiyah**
**(Studi Kasus di Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Timur)**

**SKRIPSI**

Dengan ini menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, atau kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar kepustakaan.

Surabaya, 26 Mei 2011

Penulis,

Berlina Virgiati

NIM. E04207005

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

# ABSTRAK

**Judul skripsi** :**Perempuan Dan Politik Dalam Persepektif Elit Organisasi Muhammadiyah (Studi Kasus Di Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Timur)**

Kata kunci : Perempuan dan Politik, Partisipasi Perempuan di Organisasi Islam Modern.

Perempuan dan politik merupakan suatu hal yang krusial untuk dibicarakan dan terkesan tidak pernah ada habisnya. Dalam skripsi ini membahas mengenai bagaiman gagasan perempuan dan politik yang dimiliki oleh organisasi Islam Muhammadiyah, lebih spesifiknya yakni Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Timur. Selain mengenai gagasan tersebut, skripsi ini juga membahas bagaimana implementasi gagasan perempuan dan politik dalam kepemimpinan organisasinya.

Adapun alasan penelitian ini dilaksanakan yakni Muhammadiyah sebagai organisasi modern, tentunya memiliki pandangan tersendiri mengenai perempuan dan politik. Serta tidak terpilihnya perempuan dalam tiga belas besar pimpinan dan sedikitnya perempuan yang berada dalam pimpinan di PWM Jatim mendorong peneliti untuk menelaah lebih jauh mengenai implementasi gagasan perempuan dan politik tersebut dalam organisasinya.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mendapatkan deskripsi secara mendalam mengenai gagasan perempuan dan politik dalam persepektif aktivis PWM Jatim, serta implementasi gagasan tersebut dalam kebijakan struktur organisasi PWM Jatim.

Metode penelitian dalam skripsi ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan fenomenologi dan paradigma konstruksivisme. Teknik pengumpulan data yakni dengan teknik wawancara secara mendalam pada beberapa elit pimpinan di PWM Jatim. Sebagai pelengkap data, buku maupun surat kabar yang mendukung juga dipergunakan umtuk menambah perolehan data penelitian.

Dari hasil penelitian ini diketahui bahwasannya keterlibatan atau partisipasi politik perempuan di PW Muhammadiyah Jatim cukup tinggi, dan kapabelitas keorganisasiannya pun sangat baik. Namun, hal ini tidak diikuti dengan keterwakilan mereka di PWM Jatim. Ini disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya yang paling dominan adalah faktor budaya dan faktor intern organisasi yang belum memiliki upaya serius untuk meningkatkan partisiasi tersebut melalui penetapan regulasi organisasi. Untuk mengejar ketertinggalan tersebut harus dipahami peran dan wewenang perempuan yang dimiliki dan digunakan untuk kemajuan perempuan. Hal ini karena dalam organisasi Muhammadiyah sendiri secara idealis mendukung perempuan mempunyai hak dan kewajiban yang sama dengan laki-laki. kesetaraan kesempatan ini tertuang dalam Anggaran Rumah Tangga (ART) Muhammadiyah dan Persyarikatan.



digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

# DAFTAR ISI

JUDUL PENELITIAN (SAMPUL) ..... i

HALAMAN PENGESAHAN TIM PENGUJI ..... ii

MOTTO ..... iii

HALAMAN PERSEMBAHAN ..... iv

KATA PENGANTAR ..... v

ABSTRAK ..... viii

DAFTAR ISI ..... ix

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah ..... 1
B. Rumusan Masalah ..... 11
C. Tujuan Penelitian ..... 11
D. Telaah Pustaka ..... 12
E. Kegunaan Penelitian ..... 15
F. Definisi Konsep ..... 16
G. Sistematika Pembahasan ..... 20

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Perempuan Dan Politik ..... 22
1. Partisipasi Perempuan Dalam Politik ..... 25



digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Partisipasi Dan Kepemimpinan Politik Perempuan Dalam Islam..... 29
B. Elit Organisasi ..... .....37
C. Organisasi..... .....39
1. .Politik Dalam Organisasi..... 39
2. Organisasi Keagamaan..... ..... .....43
3. Organisasi Islam Modern.....46

**BAB III METODE PENELITIAN**

1. Penedekatan Penelitian..... .....52
2. Jenis dan Sumber Data ..... .....54
3. Teknik Pengumpulan Data..... .....56
4. Teknik Penentuan Informan..... .....58
5. Teknik Analisa Data..... .....60
6. Teknik Keabsahan Data ..... .....63

**BAB IV Perempuan Dan Politik Dalam Perseprktif Organisasi Muhammadiyah Jawa Timur**

A. Organisasi Muhammadiyah..... .....64

1. Setting lokasi PW Muhammadiyah Jawa Timur..... .....66

2. Sejarah Berdirinya PW Muhammadiyah Jawa Timur.....66

3.Visi Misi Dan Prinsip Kebijakan Muhammadiyah Jawa Timur..... ..... 72

4. Matan Keyakinan Dan Cita-Cita Hidup Muhammadiyah.....73



digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5. Kepribadian Muhammadiyah.....75

6. Struktur Organisasi Muhammadiyah Jawa Timur.....76

B. Gagasan Perempuan Dan Politik Dalam Organisasi Muhammadiyah Jawa Timur.....78

C. Implementasi Gagasan Perempuan Dan Politik Dalam Struktur Organisasi Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Timur.....96

D.Triangulasi.....103

**BAB V ANALISIS HASIL PENELITIAN**

A. Perempuan Dan Politik Dalam Persepektif Muhammadiyah Jawa Timur.....108

B. Muhammadiyah Sebagai Organisasi Moderen.....120

**BAB VI PENUTUP**

A.Kesimpulan.....129

B. Rekomendasi .....131

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**



digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

# DAFTAR LAMPIRAN


| Nomor | Judul | Halaman |
|---|---|---|
| 1. | Surat Permohonan Ijin Penelitian | 138 |
| 2. | Kartu Bimbingan Skripsi | 139 |
| 3. | Daftar Pedoman Wawancara | 140 |
| 4. | Daftar Identitas Responden | 142 |


digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

# BAB I

# PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang Masalah

Sejak dua dasawarsa terakhir, diskursus seputar isu *disparitas* gender, terutama yang terkait dengan masalah minimnya partisipasi politik dan representasi perempuan dalam penetapan kebijakan dan kekuasaan bukanlah hal yang baru. Bahkan wacana mengenai pemberdayaan peran politik perempuan akhirnya menjadi salah satu isu penting yang muncul di tengah *euphoria* demokrasi, yang secara lebih jauh memunculkan tuntutan untuk melakukan reinterpretasi atas logika dasar penataan interaksi dan inter-relasi antara perempuan, laki-laki dan dunia politik, baik dalam struktur lembaga kenegaraan maupun organisasi masyarakat.[1]

Selama ini pula dianggap bahwa pola interaksi dan inter-relasi antara perempuan, laki-laki dan politik sangat dipengaruhi oleh budaya masyarakat kita yang patriarkhis, di mana kekuatan dan kekuasaan, baik secara kultural maupun struktural terpusat pada laki-laki.[2] Dalam tataran politis, struktur masyarakat seperti ini dianggap cenderung menjadikan peran politik perempuan berada pada posisi terpinggirkan dan senantiasa menjadi sub-ordinat bagi peran politik laki-laki, terutama jika sudah masuk di lingkaran kekuasaan dan legislasi.

---

[1]Siti Musdah Mulia dan Anik Farida, *Perempuan Dan Politik* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka, 2005), 4.

[2]Ridwan, *Kekerasan Berbasis Gender* (Purwokerto: Fajar Pustaka, 2006), 15.



digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kepemimpinan perempuan merupakan hal yang sangat jarang terjadi di tiap organisasi yang ada di Indonesia. Sehingga seringkali kehadiran perempuan dalam suatu organisasi hanya dijadikan sebagai anggota atau sekedar menjadi koordinator devisi keuangan dan sekretaris. Dalam banyak kasus perempuan kurang dilibatkan dalam perumusan kebijakan atau penyelesaian konflik dalam organisasi.

Beberapa faktor yang mendukung disparitas tersebut adalah kurang percayanya publik terhadap kemampuan perempuan dalam posisi strategis organisasi. Hal ini dikarenakan budaya patriarki yang telah membumi di kalangan masyarakat Indonesia. Perempuan telah lama ditempatkan dalam posisi privat atau domestik sehingga pengalaman perempuan belum sebanding jika disetarakan dengan kemampuan laki-laki khususnya dalam hal politik.[3]

Budaya itu pula yang selama ini membuat perempuan berada pada titik ketidakpercayaan diri ketika harus terjun ke ranah politik. Kondisinya semakin rumit ketika dihadapkan pada anggapan bahwa politik adalah dunia yang bersifat maskulin, penuh tantangan, ketegasan dan keberanian dalam bersaing memperoleh kekuasaan dan pengaruh. Sedangkan konstruk sosial yang selama ini ada adalah siafat perempuan yang feminis, lembut, keibuan dan cenderung mengutamakan perasaan dalam menghadapi masalah dinilai kurang pantas berada di ruang publik khususnya politik yang cenderung penuh tantangan (maskulin).[4]

---

[3] Siti Musdah Mulia dan Anik Farida, *Perempuan Dan Politik*, 6.
[4] Siti Musdah Mulia dan Anik Farida, *Perempuan Dan Politik*, 5.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Anggapan ini pula yang akhirnya membuat perempuan ragu untuk berkiprah di dunia politik.

Menurut Syafiq Hasyim, persoalan perempuan dan politik politik di Indonesia sedikitnya terhimpun dalam empat isu: keterwakilan perempuan yang sangat rendah di ruang publik; komitmen organisasi politik yang belum sensitif gender sehingga kurang memberikan akses yang memadai bagi kepentingan perempuan; kendala nilai-nilai budaya dan intepretasi ajaran agama yang bias gender dan bias nilai-nilai patriarki; dan minat, hasrat, animo perempuan untuk ikut berpartisipasi dalam organisasi politik; tapi untuk yang terakhir ini diperlukan kajian yang lebih mendalam.[5]

Demikian pula keadaan komposisi gender pada struktur organisasi Islam Muhammadiyah yang nampaknya kurang terdapat peran perempuan dalam posisi strategis organisasi tersebut. Pada struktur Pimpinan Pusat Muhammadiyah tahun 2010-2015, tiga puluh sembilan calon Pimpinan Pusat yang terpilih menjadi tiga belas orang seluruhnya terdiri dari anggota laki-laki. Hal ini menyebabkan salah satu ortom (organisasi otonom) Muhammadiyah yakni Aisyiyah[6] merasa tidak terwakili dalam pencalonan tersebut.[7]

---

[5]Syafiq Hasyim, *Perempuan Dalam Fikih Politik,* dalam buku Hal-Hal Yang Tak Terpinggirkantentang Isu-Isu Perempuan Dalam Islam (Bandung: Mizan, 2001), 124.

[6]Aisyiyah adalah salah satu organisasi otonom Muhammadiyah, organisasi keagamaan perempuan terbesar di Indonesia didirikan di Yogyakarta pada 27 Rajab 1426 H bertepatan dengan 19 Mei 1917 oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan, yang juga pendiri dari Muhammadiyah.

[7]http://www.tempointeraktif.com/hg/politik/2010/07/04/brk,20100704-260869,id.html.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

PERPUSTAKAAN IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA

Sekretaris Aisyiyah, Trias Setiawati, merasa kecewa atas kepemimpinan PP Muhammadiyah yang justru dia nilai mundur dibandingkan era tahun 1990.[8] Pada waktu itu ada tiga pimpinan perempuan yang masuk dalam pimpinan kolektif. Trias menunjuk Anggaran Rumah Tangga (ART) Muhammadiyah dan Persyarikatan yang menyebutkan anggota Muhammadiyah terdiri atas anggota laki-laki dan perempuan. Karenanya, menurut Trias, seharusnya unsur-unsur PP Muhammadiyah merefleksikan komposisi keanggotaan yang terdiri atas kaum laki-laki dan perempuan[9]

Hal yang senada juga diungkapkan Majelis Kesehatan dan Lingkungan Hidup (MKLH) PP 'Aisyiyah Dra. Noorahmah Watik menegaskan kaum perempuan masih membutuhkan wakil dari kaum perempuan supaya lebih sinergis dalam mengakomodir kebutuhan mereka. [10]

Realitas kesenjangan komposisi antara laki-laki dan perempuan juga terjadi dalam struktur Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Timur. Pada hasil Musyawarah Wilayah Muhammadiayah Jatim yang diselenggarakan di kabupaten Jember, tepatnya di Universitas Muhammadiyah Jember pada 9-10 Oktober 2010 tak satupun calon pimpinan perempuan yang terpilih dalam tiga belas besar pimpinan. Dari 52 nama yang meramaikan bursa Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jatim periode 2010-2015, empat dari 52 calon terseleksi tersebut

---

[8] Ibid.
[9] Ibid.
[10] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

merupakan kader perempuan yang duduk di PW Aisyiyah Jatim yakni Esty Martiana Rachmie, Nelly Asnifati, Dwi Endah Purwanti, dan Sumiati Wakang.[11]

Lima besar hasil pemilihan secara elektronik voting tersebut menghasilkan perolehan suara yakni: Thohir Luth mendapatkan 828 suara, disusul Muhadjir Efendy dengan 821 suara, kemudian Nur Cholis Huda juga dengan 821 suara, kemudian Muamal Hamidy dengan 795 suara, dan urutan ke-lima adalah Nadjib Hamid dengan 790 suara. Sehingga struktur pimpinan tersebut menempatkan Thohir Luth sebagai Ketua PWM, kemudian Wakil Ketua dijabat oleh sembilan orang yaitu Muhadjir Efendy, Nurcholis Huda, Muamal Hamidy, Saad Ibrahim, A Jainuri, Imam Robandi, Sulthon Amin, Zainuddin Maliki, serta Sukadiono. Untuk Sekretaris tetap dijabat oleh Nadjib Hamid dengan wakil Sekretaris Tamhid Masyhudi dan Bendahara Saifudin Zaini.[12] Pada kepemimpinan PWM Jatim 2005-2010, dalam majelis dan lembaga terdiri dari anggota perempuan sebanyak dua puluh lima orang, sedangkan anggota pimpinan laki-laki sebanyak dua ratus empat puluh delapan orang.[13]

Menanggapi hal tersebut, Dra. Hj. Farida Muwafiq, sekretaris Aisyiyah Jawa Timur 2005-2010 menegaskan bahwa sebenarnya terdapat suatu harapan yang besar agar perempuan dapat masuk dalam struktur pimpinan

---

[11]http://www.krjogja.com/news/detail/53457/325.Peserta.Muswil.Muhammadiyah.Jatim.Tidak.Datang.html, (11 Oktober 2010).

[12]Tempo interaktif Surabaya, "*Struktur Baru Muhammadiyah Jawa Timur Rampung Disusun*" Oleh Fatkhur Rakhman Taufik, Jumat, 15 Oktober 2010.

[13]Tim PWM Jatim, *Memacu Semangat Dakwah Menuju Peradaban Utama* (Surabaya: Hikmah Press, 2010), 73-79.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Muhammadiyah untuk mewakili perempuan. Hal ini karena Muhammadiyah sebagai salah satu organisasi Islam besar di Indonesia sebenarnya tidak membedakan antara peran laki-laki dan perempuan dalam struktur organisasinya, semua memiliki hak yang sama untuk memilih dan dipilih. Terlebih perempuan Muhammadiyah memiliki kapabelitas yang baik dalam hal memimpin organisasi. Akan tetapi, jika akhirnya perempuan tidak terwakili dalam struktur elit organisasi Muhammadiyah, perempuan telah memiliki wadah organisasi tersendiri yakni Aisyiyah, sehingga perempuan masih dapat membangun dan berjuang untuk cita-cita Aisyiyah sendiri melalui organisasi otonom tersebut.[14]

Adanya harapan agar unsur-unsur piminan Muhammadiyah merefleksikan komposisi keanggotaan yang terdiri atas kaum laki-laki dan perempuan ini dikarenakan dalam Anggaran Rumah Tangga (ART) Muhammadiyah dan Persyarikatan yang menyebutkan anggota Muhammadiyah terdiri atas anggota laki-laki dan perempuan.[15] Selain itu, pada realitanya banyak figur atau kader `Aisyiyah yang punya potensi yang menonjol di bidangnya, dan mampu membantu mengatasi permasalahan organisasi maupun bangsa yang semakin kompleks. Aisyiyah juga merupakan komponen perempuan Persyarikatan Muhammadiyah telah memberikan corak tersendiri dalam ranah sosial,

[14] Wawancara, 8 Januari 2011.
[15] Anggraran Rumah Tangga Muhammadiyah Pasal 4 Ayat 1.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pendidikan, kesehatan, dan keagamaan yang selama ini menjadi titik tolak gerakannya.[16]

Beberapa amal usaha yang didirikan Aisyiyah merupakan bukti bahwa perempuan Muhammadiyah yang tergabung dalam Aisyiyah juga memiliki kapabelitas yang baik dalam organisasi dan pemberdayaan masyarakat. Beberapa amal usaha tersebut yakni: di bidang pendidikan; kesehatan; kewirausaan; sosial kemasyarakatan, dan bahkan menjalin kerjasama dengan instansi pemerintahan provinsi Jatim dan lembaga sosial kemasyarakatan.

1. Bidang pendidikan[17]

| No. | NAMA LEMBAGA | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TK | 814 | 843 | 891 | 891 |
| 2 | TK Autis | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 3 | SD | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 4 | Madrasah Diniyah | 44 | 12 | 12 | 12 |
| 5 | Taman Pendidikan al Quran | 156 | 336 | 336 | 336 |

[16]Ismah Salman, *Keluarga Sakinah Dalam 'Aisyiyah: Diskursus Jender di Organisasi Perempuan Muhammadiyah* (Jakarta: PSAP, 2005), 144.

[17] Laporan Musyawarah Pimpinan Wilayah Aisyiyah Jawa Timur ke 11, 2010, 75.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | SLB | 5 | 5 | 3 | 3 |
| 7 | Kelompok Bermain | 302 | 441 | 497 | 479 |
| 8 | Tempat Penitipan Anak | 13 | 23 | 20 | 12 |

2. Bidang Kesehatan[18]
   a. Rumah Sakit Umum 'Aisyiyah Jl. DR. Sutomo No. 18-24 Ponorogo
   b. Rumah Sakit Aisyiyah Siti Fatimah Jl. Raya Kenongo No. 14 Tulangan Sidoarjo
   c. Rumah Sakit Islam 'Aisyiyah Nganjuk Jl. Imam Bonjol No. 20 Nganjuk
   d. RB/BP/BKI 'Aisyiyah Ambulu Jl. Watu Ulo No. 54 Ambulu Kab. Jember
   e. RB. Aisyiyah Jl. Letnan Ramli No. 21 Bangkalan
   f. BP/RB Siti Aisyah Jl. KH. Amin Jakfar V/7 Pamekasan
   g. Klinik Rawat Inap Islam 'Aisyiyah Pandaan Jl. Pahlawan Sunaryo No. 257 Kutorejo Pandaan Kab. Pasuruan.
3. Kewirausahaan dan koperasi[19]
   a. Koperasi Sekunder 1 (Amal Usaha PWA)

[18]Laporan Musyawarah Pimpinan Wilayah Aisyiyah Jawa Timur ke 11, 2010. 88.
[19] Laporan Musyawarah Pimpinan Wilayah Aisyiyah Jawa Timur ke 11, 2010. 111.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Koperasi Primer 20 (Amal Usaha PDA)

c. Pra Koperasi 36 (tahun 2008), 75 (tahun 2009)

d. Ikatan Pengusaha 'Aisyiyah 37 daerah

e. Ibu Dra. Nelly Asnifati selaku ketua PUSKOP 'Aisyiyah mendapat penghargaan sebagai tokoh koperasi Jawa Timur oleh Menteri Koperasi dan Bupati Sidoarjo

f. Renovasi rumah Polak untuk dikelola sebagai pondokan/ rumah kos.

Selain itu, Aisyiyah juga aktif dalam melaksanakan pelatihan dan seminar untuk merespon persoalan kemasyarakatan. Beberapa aktifitas tersebut yakni melaksanakan seminar dan penyuluhan bahaya trafiking, narkoba, aborsi, pornografi, dan pornoaksi melalui dakwah di Radio Republik Indonesia; berpartisipasi dan menghimbau kepada seluruh anggota untuk penggalangan dana sosial korban bencana alam di Indonesia; dan berpartisipasi aktif dalam kampanye tentang Indonesia sehat (penanaman pohon, desa siaga, imunisasi, dan lain-lain).[20]

Di bidang politik, perempuan Muhammadiyah yang tergabung dalam Aisyiyah juga aktif dalam kegiatan-kegiatan di bidang politik. Antara lain: menyelenggarakan seminar politik perempuan dalam menyongsong pemilihan Gubernur Jatim 2009, Diskusi sikap Aisyiyah dalam menyongsong pemilihan gubernur Jatim 2009 putaran II dan pendidikan politik perempuan bagi calon legeslatif daerah Aisyiyah se-Jatim dan independensi Aisyiyah serta penandatanganan kontrak politik antara Aisyiyah dengan calon-calon anggota

[20] Siti Musdah Mulia dan Anik Farida, *Perempuan Dan Politik*, 12.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

legeslatif. Turba bersama PWM dalam rangka menyukseskan pencalonan menyukseskan calon Ir.H. Tamhid Mashudi sebagai DPD perwakilam Muhammadiyah Jawa Timur ke seluruh anggota Muhammadiyah/ Aisyiyah se Jawa Timur.[21]

Beberapa aktifitas tersebut menujukkan bahwa perempuan Muhammadiyah memiliki kemampuan keorganisasian, wawasan serta kepedulian lingkungan sosial yang memadai, sehingga sebenarnya tidak ada keraguan ketika perempuan tersebut berada pada posisi strategis dalam struktur organisasi.

Namun, tidak adanya wakil perempuan dalam struktur pimpinan Muhammadiyah, khususnya di tingkat pimpinan Wilayah Jawa Timur tersebut tentunya dilatar belakangi oleh berbagai faktor. Dalam skripsi ini penulis akan mencoba menganalisa fenomena tersebut dari sudut pandang bagaimana posisi politik perempuan dalam bargaining kepemimpinan di organisasi Muhammadiyah. Gagasan yang digunakan tersebut adalah dari perspektif aktivis Muhammadiyah sendiri.

Adapun alasan penulis memilih tema perempuan dan politik di organisasi Muhammadiyah sebagai objek penelitian yakni karena Muhammadiyah adalah organisasi Islam modern yang cenderung terbuka terhadap pengetahuan modern sehingga tentunya organisasi ini memiliki perspektif tersendiri mengenai dirkursus perempuan dan politik. Di samping itu, penelitian ini memilih Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Timur karena berkaitan dengan hasil musyawarah

[21] Siti Musdah Mulia dan Anik Farida, *Perempuan Dan Politik*, 13.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Muhammadiyah Wilayah Jatim 2010-2015 yang tak satupun wakil perempuan terpilih dalam tiga belas besar pimpinan strategis di organisasi tersebut.

Dilatarbelakangi oleh hasil Muswil Muhammadiyah Jatim 2010-2015, bagaimanakah pemikiran Muhammadiyah tentang perempuan dan politik, serta bagaimana mengimplementasikannya pada struktur keorganisasian akan dibahas dalam penelitian yang berjudul **PEREMPUAN DAN POLITIK DALAM PERSEPEKTIF ELIT ORGANISASI MUHAMMADIYAH (*Studi Kasus di Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Timur*)**

## B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas dapat diambil rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana gagasan perempuan dan politik dalam perspektif elit Piminan Muhammadiyah Jawa Timur?
2. Bagaimana implementasi gagasan perempuan dan politik tersebut dalam kebijakan struktur organisasi pada Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Timur?

## C. Tujuan Penelitian

Sejalan dengan permasalahan di atas maka tujuan yang diharapkan dapat tercapai dalam penelitian berbentuk skripsi ini adalah:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Menghasilkan deskripsi secara mendalam mengenai gagasan perempuan dan politik dalam perspektif elit Piminan Muhammadiyah Jawa Timur.
2. Menghasilkan eksplanasi mengenai implementasi gagasan perempuan dan politik dalam kebijakan struktur organisasi Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Timur.

## D. Telaah Pustaka

Yang menjadi bahan telaah dalam penulisan proposal ini penulis menggunakan buku atau catatan tertulis lainnya yang terkait dengan penulisan judul proposal, yaitu:

1. *Keluarga Sakinah Dalam 'Aisyiyah: Diskursus Jender di Organisasi Perempuan Muhammadiyah,* karya Ismah Salman, menjelaskan implementasi pemahaman tentang perempuan dalam 'Aisyiyah yang menguraikan tentang kedudukan, ruang gerak, hak-hak dan peran mereka dalam membina keluarga serta pengembangan masyarakat. Disamping itu, juga dikaitkan dengan perspektif gender yang dalam dua dasawarsa ini sering dibicarakan. Akan tetapi dalam buku tersebut belum dijelaskan peran perempuan dalam ranah politik, khususnya peran mereka dalam kedudukan strategis di Muhammadiyah.
2. *Perempuan Dan Politik,* karya Siti Musdah Mulia dan Anik Farida. Membahas tentang realitas kiprah politik perempuan Indonesia, serta politik dan perempuan dalam Islam. Juga solusi yang ditawarkan atas disparitas

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

gender dalam politik yang ada di Indonesia. Dalam buku ini dijelaskan masih rendahnya kesadaran dan minat perempuan dalam hal politik, kalaupun perempuan memiliki minat dan kapabelitas yang layak tetapi perempuan tersebut tidak dapat dengan mudah memasuki dunia politik yang mana dikarenakan terbentur oleh *mindset* sebagian masyarakat yang saat ini masih menganggap politik tabu untuk perempuan. Sifat perempuan yang keibuan tidak layak untuk memimpin dunia politik yang diidentikkan dengan sifat maskulin. Buku ini belum menjalskan mengenai bagaimana kiprah wanita di dunia organisasi keagamaan, khususnya organisasi Islam.

3. *Perempuan dan Kekuasaan, Menelusuri Hak Politik Dan Persoalan Gender Dalam Islam,* oleh Ikhwan Fauzi. Buku ini membahas tentang hak-hak politik perempuan yang sebenarnya dalam Islam juga telah ada. Hal ini meliputi prinsip persamaan gender, kedudukan hak-hak politik perempuan, dan emansipasi antara perjuangan politik dan eksistensial. Akan tetapi dalam buku ini belum menyinggung persoalan mengenai bagaimana seharusnya kebijakan organisasi Islam menempatkan perempuan dalam kedudukan di struktur organisasi, sehingga pada posisi strategis tersebut perempuan dapat memberikan sumbangsih yang besar dalam organisasi.
4. *Indonesia dalam Dinamlka Politik Indonesia 1966-2006,* Syarifudin Juhri, membahas tentang gerakan Muhammadiyah dan kiprah politiknya di dalam pemerintahan nasional. Latar belakang dan landasan pemikiran politik Muhammadiyah juga dijelaskan dalam buku tersebut, tetapi belum terdapat

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pandangan mengenai kiprah perempuan Muhammadiyah dalam politik nasional maupun dalam intrern organisasi Muhammadiyah.

5. *Tentang Perempuan Islam Wacana dan Gerakan*, oleh Jajat Burhanudin dan Oman Fathurahman, dalam buku ini dijelaskan proses historis-sosiologis di mana gagasan tentang perempuan berkembang dan membentuk suatu kategori dalam wacana pemikiran Islam Indonesia. Di dalamnya juga diulas tuntas soal perkembangan, perubahan, dan perdebatan tentang perempuan di Indonesia dari perspektif Islam, yang melibatkan perumusan dan penerjemahan ulang ajaran Islam yang berkaitan dengan perempuan. Beberapa organisasi Islam jga disinggung dalam buku ini, seperti NU dan Muhammadiyah. Namun buku ini tidak menjelaskan gender dan politik dalam perspektif Muhammadiayah serta bagaimana implementasinya dalam organisasi tersebut. Buku ini hanya menjelaskan secara sekilas mengenai kiprah perempuan dalam memajukan amal usaha di bidang pendididkan dan sosial keagamaan secara umum.
6. *Wanita Islam, Sejarah Perjuangan, Kedudukan Dan Peranannya,* oleh Hj. St. Rogayah Buchori. Salah satu bab pembahasan dalam buku ini menjelaskan mengenai kontroversi kepemimpinan perempuan. Adapun bidang kepemimpinan perempuan yakni memimpin dirinya sendiri, sebagai pemimpn rumah tangga, pemimpin masyarakat, serta pemimpin masyarakat majemuk. Disamping itu, beliau juga menjelaskan bahwa dalam Islam, perempuan memiliki hak yang sama seperti laki-laki dalam hal kepemimpinan di masyarakat. Akan tetapi, perempuan juga harus menyeimbangkan kelemahan-

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kelemahan individu dirinya dan tugas rumah tangga. Yakni dalam mengasuh anak dan mengurus rumah tangga. Hal ini agar perempuan dapat mengoptimalkan perannya sebagai pemimpin masyarakat dan juga dalam rumah tangga.

## E. Kegunaan Hasil Penelitian

Dengan tercapainya tujuan penelitian di atas maka diharapkan studi ini berguna untuk:

1. Dari segi teoritis

   Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah pengkajian mengenai perempuan dan politik dalam perspektif Muhammadiyah, khususnya mengenai implementasi pemikiran tersebut dalam struktur organisasinya.

2. Dari segi praktis

   Hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagai bahan pertimbangan untuk menetukan kebijakan distribusi peran dalam suatu struktur organisasi, terutama dalam organisasi sosial keagamaan sehingga pembagian tersebut bersifat rasional yakni menempatkan *the right man in the right place*, tanpa ada bias gender.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

## F. Definisi Konsep

Untuk menghindari adanya kesalahpahaman dalam memahami judul dalam karya skripsi ini dan untuk memperjelas interpretasi terhadap pokok bahasan yang berjudul perempuan dan politik dalam struktur organisasi Muhammadiyah, maka akan dijelaskan istilah-istilah yang terangkai pada judul dan konteks kebahasaan.

Perempuan : Menurut KBBI, *keperempuanan* juga berarti 'kehormatan sebagai perempuan'. Di sini sudah mulai muncul kesadaran menjaga harkat dan martabat sebagai manusia bergender feminin. Tersirat juga di sini makna 'kami jangan diremehkan' atau 'kami punya harga diri'.[22]

Secara etimologis, kata *perempuan* berasal dari kata *empu* yang berarti 'tuan', 'orang yang mahir/berkuasa', atau pun 'kepala', 'hulu', atau 'yang paling besar'; maka, kita kenal kata *empu jari* 'ibu jari', *empu gending* 'orang yang mahir mencipta tembang'.

Sesuai dengan pembahasan skripsi ini maka perlu dijelaskan pula mengenai perempuan Muhammadiyah. Perempuan Muhammadiyah merupakan anggota organisasi Muhammadiyah yang berjenis kelamin perempuan berusia diatas 17 tahun dan sudah menikah; telah bersedia menyetujui maksud dan tujuan

[22] Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Edisi I. (Jakarta: Balai Pustaka dan Depdikbud, 1988), 670.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Muhammadiyah; mendukung dan melaksanakan usaha-usaha Muhammadiyah; serta yang telah mendaftarkan diri sebagai anggota dan mau membayar uang pangkal.[23]

Politik :menurut Miriam Budiardjo, adalah bermacam-macam kegiatan dalam suatu sistem politik (atau negara) yang menyangkut proses menentukan tujuan-tujuan dari sistem itu dan melaksanakan tujuan-tujuan itu. Pengambilan keputusan mengenai apakah yang menjadi tujuan dari sistem politik itu menyangkut seleksi antara beberapa alternatif dan penyusunan skala prioritas dari tujan-tujuan yang telah dipilih itu.

Kutipan tersebut menunjukkan bahwa hakikat politik adalah perilaku politik, baik berupa aktivitas atau sikap yang bertujuan mempengaruhi atau mempertahankan tatanan sebuah masyarakat dengan menggunakan kekuasaan, dan politik merupakan bentuk asosiasi manusia dalam rangka mencapai kebaikan bersama (*public good*) menjadi bagian terpenting dalam kehidupan. Jadi politik itu adalah segala cara dimana kekuasaan digunakan untuk mempengaruhi hal-hal pokok dalam kegiatan-kegiatan pemerintahan. Ranah politik bukan saja menyangkut berbagai kegiatan seputar pemerintahan belaka, tetapi juga berkenaan dengan kegiatan-kegiatan yang dilakukan berbagai kelompok

[23] Anggaran Rumah tangga Muhammadiyah pasal 4.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan individu. Kegiatan-kegiatan tersebut merupakan cara-cara dimana rakyat yang berada diluar pemerintahan berusaha mempengaruhi proses politik dalam pemerintahan.

Politik selalu menyangkut tujuan-tujuan dari seluruh masyarakat (*public goals*), dan bukan tujuan pribadi seseorang (*private goals).* Selain itu, politik menyangkut kegiatan berbagai kelompok termasuk partai politik, orang seorang (individu), ormas seperti halnya juga Muhammadiyah, politik juga mencakup berbagai aktivitas yang berkenaan dengan Negara (*state*), kekuasaan (*power*), pengambilan keputusan (*decision making*), kebijaksanaan (*policy beleid*), dan pembagian (*distribution*) atau alokasi (*allocation*) nilai-nilai dalam masyarakat.[24]

Dari pengertian mengenai politik sebagaimana telah dipaparkan itu maka betapa luas cakupan bidang kehidupan dan kegiatan politik. Politik bukan semata-mata berkenaan dengan kegiatan dari partai politik dan menyangkut perjuangan kekuasaan dalam pemerintahan. Politik juga berkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan kekuasaan dalam kehidupan masyarakat yang lebih luas seperti dalam kelompok-kelompok

[24] Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, 8-9.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sosial, termasuk dalam kehidupan keluarga dan golongan-golongan sosial di masyarakat.

Sehingga jika dikaitkan dengan politik dalam organisasi maka menurut salah satu perintis kajian kekuasaan dan politik dalam organisasi, Jeffrey Pfeiffer mendefinisikan kekuasaan sebagai "kemampuan potensial untuk mempengaruhi perilaku, mengubah arah peristiwa, mengatasi perlawanan, dan membuat orang melakukan sesuatu yang tadinya tidak hendak mereka lakukan." Sementara itu, politik dan pengaruh (*influence*) adalah proses, tindakan, perilaku di mana kekuasaan yang potensial ini memiliki media untuk digunakan, direalisasikan.[25]

Muhammadiyah: merupakan salah satu organisasi masyarakat Islam yang didirikan oleh K.H. Ahmad Dahlan pada tanggal 18 November 1912 M (8 Dzulhijjah 1330 H) di Yogyakarta. Secara etimologis Muhmmadiyah dapat diartikan sebagai "pengikut Muhammad SAW", yang terdiri dari kata 'Muhammad' dan 'ya nisbiyah'. Sehingga setiap orang yang meyakini dan menjadi pengikut Muhammad SAW adalah orang Muhammadiyah tanpa dibatasi oleh ideologi golongan, bangsa, dan organisasi. Sementara secara terminologi, muhammadiyah adalah gerakan dawah amar

[25] Jeffrey Pfeiffer, *Managing with Power: Politics and Influence in Organizations* (New York: Harvard Business School Press, 1992), 23.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ma'ruf nahi munkar berasas Islam dan bersumber Al Qur'an dan sunnah demi terwujudnya *baldhatun thaibatun warobbul ghofur*, yang bersumber pada QS. Ali Imron: 104.[26]

## G. Sistematika Pembahasan

Sebagaimana kemampuan yang dimiliki oleh penulis maka pembahasan dalam skripsi ini dibagi menjadi enam bab, yang terdiri dari sub-sub bab yang disusun sebagai berikut:

Bab pertama merupakan pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, berisi pemaparan tinjauan pustaka mengenai teori perempuan dan politik yaitu kerangka konsepsional yang memuat deskripsi tentang masalah partisipasi serta kepemimpinan perempuan dalam organisasi berdasarkan sumber pustaka yang mencakup tentang pengertian perempuan dan politik. Gagasan perempuan dan politik yang digunakan adalah yang menyangkut masalah kepemimpinan perempuan dalam sebuah struktur organisasi. Selain itu pemaparan mengenai teori organisasi juga akan dijelaskan dalam bab ini.

---

[26] Syarifudin Juhri, *Indonesia dalam Dinamlka Politik Indonesia 1966-2006* (Jakarta: Pustaka Pelajar, 2010), XVIII.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bab ketiga, berisi penjelasan metode penelitian yakni meliputi pendekatan dan jenis penelitian; jenis dan sumber data; teknik pengumpulan data; teknik sampling dan informan; analisa data; dan teknik keabsahan data.

Bab keempat berisi deskripsi hasil wawancara yang berisi tentang perempuan dan politik berdasarkan perspektif aktivis Muhammaiyah, dan yang berisi tentang kebijakan dan struktur yang ada dalam organisasi Muhammadiyah pada tingkat Pimpinan Wilayah Jatim. Selain itu data sekunder yang diperoleh mengenai permasalahan penelitian juga dipaparkan dalam bab ini.

Bab kelima, berisi analisa data, yaitu analisis keterkaitan antara gagasan dan implementasi pemikiran perempuan dan politik dalam kebijakan distribusi peran dalam struktur organisasi Muhammadiyah pada pimpinan wilayah Jatim.

Bab keenam merupakan bab terakhir yang berisi kesimpulan dari penelitian dilengkapi rekomendasi penulis.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

# BAB II

# TINJAUAN PUSTAKA

## A. Perempuan dan Politik

Politik berasal dari bahasa Yunani yakni *polis* yang artinya kota atau negara yang kemudian muncul kata-kata *polities* yang artinya warga negara dan kata *politikos* yang artinya kewarganegaraan.

Politik menurut Miriam Budiardjo, adalah bermacam-macam kegiatan dalam suatu sistem politik (atau negara) yang menyangkut proses menentukan tujuan-tujuan dari sistem itu dan melaksanakan tujuan-tujuan itu. Pengambilan keputusan mengenai apa yang menjadi tujuan dari sistem politik itu menyangkut seleksi antara beberapa alternatif dan penyusunan skala prioritas dari tujuan-tujuan yang telah dipilih itu. Politik selalu menyangkut tujuan-tujuan dari seluruh masyarakat, dan bukan tujuan pribadi seseorang. Politik hakikatnya mencakup berbagai kegiatan kelompok termasuk partai politik dan kegiatan sekelompok individu lainnya.[1]

Setiap warga negara memiliki hak politik yang sama. Hak politik adalah hak-hak yang ditetapkan dan diakui Undang-Undang atau konstitusi berdasarkan warga negara. Pada umumnya, konstitusi mengaitkan antara pemenuhan hak-hak

[1] Miriam Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik* (Jakarta: PT.Gramedia Pustaka Utama, 2002), 8.



digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan syarat kewarganegaraan. Artinya hak-hak ini tidak berlaku kecuali bagi warga setempat, bukan warga asing.[2]

Dalam hak-hak politik terhimpun antara konsep hak dan kewajiban sekaligus. Sebab hak-hak politik pada tingkat tertentu menjadi hak-hak politik pada tingkat tertentu menjadi hak bagi individu karena hak-hak itu menjadi wajib bagi mereka. Hal itu disebabkan hak mutlak, sebagaimana yang diterima, membolehkan seseorang menggunakannya atau tidak menggunakannya tanpa ikatan apapun kecuali dalam menggunakan hak konstitusi.

Hak-hak politik ini menyiratkan partsipasi individu dalam pembentukan pendapat umum, baik dalam pemilihan wakil-wakil mereka dalam majelis-majelis dan lembaga perwakilan atau pencalonan diri mereka untuk menjadi anggota majelis atau lembaga perwakilan tersebut.

Dunia politik juga berkaitan erat dengan dunia kepemimpinan. Ada tiga unsur yang merajut kepemimpinan dalam diri seseorang, yaitu kekuasaan, kompetensi diri, dan agresif kretif. Kekuasaan adalah unsur paling utama dalam membangun kemampuan memimpin seseorang. Hal ini selalu didefinisikan sebagai kekuatan atau ketegaran atau kemampuan bertindak yang diperlukan guna mencapai suatu tujuan yang lebih besar.[3]

---

[2] Ikhwan Fauzi, *Perempuan Dan Kekuasaan, Menelusuri Hak Politik Dan Persoalan Gender Dalam Islam*, (Jakarta: Amzah, 2002), 35.

[3] Siti Musdah Mulia & Anik Farida, *Perempuan Dan Politik,* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka, 2005), 2.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Namun, kekuasaan merupakan hal yang sulit untuk didapatkan oleh seorang perempuan. Menurut Siti Musda Mulia, kekuasaan dalam *mindset* masyarakat identik dengan maskulinitas dan tidak sesuai dengan karakrter feminim perempuan yang selama ini telah terkonstruk. Masyarakatpun tidak mempersiapkan bahkan tidak menghendaki perempuan membangun kualitas kekuasaan dalam diri mereka.

Di samping itu, saat ini perempuan masih sangat jarang mendapat kekuasaan di posisi strategis dalam organisasi. Menurut James L Gibson, terdapat beberapa cara di mana para perempuan dibiarkan relative tidak berkuasa dalam tugas managerial mereka. Pertama, ada kecenderungan dari manager lain untuk melindungi yang merendahkan kemampuan perempuan dengan menempatkan mereka pada pekerjaan yang aman, jauh dari hal-hal yang beresiko.

Kedua, perempuan dengan mudahnya diabaikan karena mereka dianggap "tidak tahu apa-apa". Perempuan sering dipandang mengetahui persyaratan teknis suatu pekerjaan, tetapi dipandang tidak terlalu terampil dalam berbagai bidang lain. Ketiga, hingga saat ini kaum laki-laki merasa tidak senang melihat perempuan sebagai usahawan. Mereka tidak mendapatkan kesan bahwa wanita mampu memegang suatu kekuasaan.[4]

Akhirnya, sekalipun perempuan dapat mencapai kekuasaan atas kemampuannya sendiri, mereka dipandang tidak mampu membangun basis kekuasaan organisasi. Secara tradisional, baik laki-laki maupun perempuan tidak

[4]James L Gibson, *Organisasi Perilaku-Struktur Proses* (Jakarta: Erlangga, 1996), 307.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

melihat perempuan mampu memotivasi anggota lainnya. Perempuan dianggap lebih suka dimotivasi dari pada memotivasi.[5] Saat berada dalam posisi sebagai pemimpin pun, perempuan mengalami lebih banyak hambatan dibandingkan dengan laki-laki. Karena perempuan harus selalu membuktikan bahwa dirinya memang pantas dan bisa diandalkan. Hal ini membatasi kemampuan perempuan untuk membangun basis kekuasaan individual yang telah mereka agendakan.

Di samping itu, konstruk pemahaman bahwa kekuasaan identik dengan maskulinitas juga membuat perempuan tidak mempercayakan kekuasaan berada pada perempuan itu sendiri. Dengan kata lain, perempuan belum sepenuhnya percaya pada kekusaan perempuan. Sehinggan perlu adanya penggantian pemahaman bahwa tak selamnya kekuasaan terkait dengan maskulinitas. Dengan sifat *feminism*, perempuan juga dapat menjadi seorang pemimpin.

**1. Partisipasi Perempuan Dalam Politik**

Berbicara tentang politik tidak akan terlepas dengan partisipasi politik. Menurut Ramlan Surbakti dalam bukunya Memahami Ilmu Politik, bahwa partisipasi politik adalah keikutsertaan warga negara biasa dalam menentukan segala keputusan yang menyangkut atau mempengaruhi kehidupannya.[6]

Sedangkan menurut Miriam Budiarjo, partisipasi politik diartikan sebagai kegiatan seseorang atau sekelompok orang untuk ikut secara aktif dalam

---

[5] Ibid.
[6] Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik* (Jakarta: Gramedia, 1999), 140.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kehidupan politik yaitu dengan jalan memilih pimpinan negara dan secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kebijakan pemerintah. Kegiatan ini mencakup pemberian suara lewat pemilihan umum, menghadiri rapat umum, menjadi anggota suatu partai atau kelompok kepentingan, mengadakan hubungan dengan pejabat pemerintah atau anggota parlemen dan sebagainya.[7]

Lebih lanjut Huntington dan Nelson menjelaskan partisipasi politik dapat terwujud dalam berbagai bentuk kegiatan atau perilaku yakni:

a. Kegiatan pemilihan mencakup suara, sumbangan-sumbangan untuk kampanye, mencari dukungan, atau setiap tindakan yang mempengaruhi hasil proses pemilihan. Ikut dalam pemungutan suara adalah bentuk partisipasi yang jauh lebih luas dibandingkan dengan bentuk-bentuk partisipasi lainnya.
b. Lobbying, mencakup upaya-upaya perorangan atau kelompok untuk menghubungi pejabat-pejabat pemerintah dan pemimpin-pemimpin politik dengan maksud mempengaruhi keputusan-keputusan mereka mengenai persoalan yang menyangkut kepentingan umum.
c. Kegiatan organisasi, menyangkut partisipasi sebagai anggota dalam suatu organisasi yang tujuan utamanya adalah mempengaruhi pengambilan keputusan pemerintah.

[7] Miriam Budiarjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik* (Jakarta: Gramedia, 1989), 9.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d. Mencari koneksi merupakan tindakan perseorangan yang ditujukan terhadap pejabat pemerintah dengan maksud memperoleh manfaat bagi satu orang atau sekelompok orang.[8]

Indonesia sebagai negara merdeka dan berdaulat telah berkomitmen secara tegas memberikan pengakuan yang sama bagi setiap warganya, baik itu perempuan maupun laki-laki. Demikian pula mengenai pemberian hak dan kewajiban dalam berpartisipasi politik. Untuk memberdayakan perempuan, hak-hak politik perempuan ditetapkan melalui instrumen hukum maupun dengan meratifikasi berbagai konvensi yang menjamin hak-hak politik tersebut.

Undang-undang RI No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia pasal 46 menyebutkan bahwa sistem pemilihan umum, kepartaian, pemilihan anggota badan legislatif, dan sistem pengangkatan di bidang eksekutif dan yudikatif harus menjadi keterwakilan perempuan sesuai dengan persyaratan yang ditentukan.

Penegasan hak-hak politik perempuan dibuktikan dengan telah diratifikasikannya konvensi Hak-Hak politik perempuan. ketentuan dalam konvensi PBB tentang Hak-hak Politik perempuan menjelaskan sebagai berikut:

a. Perempuan berhak untuk memberikan suara dalam semua pemilihan dengan syarat-syarat yang sama dengan laki-laki, tanpa suatu diskriminasi.

---

[8] P. Samuel Huntington dan Joan Nelson, *Partisipasi Politik* (Jakarta: Rineka Cipta, 1994), 16-19.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Perempuan berhak untuk dipilih bagi semua institusi yang dipilih secara umum, diatur oleh hukum nasional dengan syarat-syarat yang sama dengan laki-laki tanpa ada diskriminasi

c. Perempuan berhak untuk memegang jabatan politik, diatur oleh hukum nasional dengan syarat-syarat yang sama dengan laki-laki tanpa ada diskriminasi.

Ada beberapa ruang strategis yang dapat dimasuki oleh komunitas perempuan diranah politik. Pertama, partisipasi dalam perencanaan. Partisipasi ini cukup penting untuk menjamin agar rencana-rencana kebijakan atau program kegiatan nantinya benar-benar membela kepentingan masyarakat secaraa adil. Peran ini juga termasuk memberikan kritik yang objektif rasional, serta perumusan program-program internal organisasi untuk pengembangan ke dalam maupun untuk partisipasi keluar organisasi. Kedua, partisipasi dalam pengorganisasian. Ketiga, partisipasi dalam pelaksanaan. Keempat, partisipasi dalam kontrol.

Pentingnya partisipasi politik bagi perempuan disebabkan masalah partisipasi sangat berkaitan langsung dengan masalah-masalah lain, menurut Mac. Kinnon, ketika hak politik terenggut maka hak-hak lainnya akan mengikuti (terenggut pula).[9] Politik adalah ranah yang sangat fundamental bagi penentu hak-hak lainnya.

[9] To Ward A Feminist Theory Of State, 215.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

## 2. Partisipasi dan Kepemimpinan Politik Perempuan dalam Islam

Untuk memahami peran politik perempuan, pada awalnya dapat dilihat dari penghargaan Islam terhadap kaum perempuan yang tampak nyata pada realitas penerapan ajaran Islam dan sejarah kaum muslim sejak generasi pertama. Orang pertama yang mengimani kerasulan Muhammad SAW adalah Siti Khadijah. Islam telah memberi ketetapan mengenai kesamaan status kehambaan antara laki-laki dan perempuan. Berikut ini beberapa bagian dari kewajiban mereka sebagai hamba Allah SWT mengenai persamaan dan kesetaraan laki-laki dan perempuan dan menerima taklif keberagaman dan ibadah. Al Quran menegaskan:

> *Sesungguhnya laki-laki dan perempuan muslim, dan perempuan mukmin, laki-laki dan perempuan yang benar, laki-laki dan perempuan yang sabar, laki-laki dan perempuan yang khusuk, laki-laki dan perempuan yang bersedekah, laki-laki dan perempuan yang berpuasa, laki-laki dan perempuan yang menjaga kehormatannya, laki-laki dan perempuan yang banyak (menyebut) nama Allah telah menyediakan mereka ampunan dan pahala yang besar.Qs. Al-Ahzab,(33):35.*

Namun pada ada dasarnya, pandangan kaum muslimin mengenai perempuan yang berpolitik tidaklah tunggal. Setidaknya menurut penuturan Syafiq Hasyim ada tiga pendapat yang berkembang mengenai perempuan di dunia politik.

1. Pendapat konservatif yang mengatakan bahwa dalam Islam tidak dibenarkan perempuan terjun ke dunia politik. Pendapat ini didasarkan pada pemahaman fikih bahwa sejak awal kemunculan Islam di Mekah dan Madinah tidak memperkenankan perempuan terjun ke dunia politik. Hal ini dikarenakan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

adanya pemahaman bahwa tempat terbaik bagi perempuan adalah di dalam rumah.

2. Pendapat liberal progresif yang menyatakan bahwa Islam sejak awal telah memperkenalkan konsep keterlibatan perempuan dalam bidang politik. Adapun alasan dari pendapat ini adalah karena istri Rasulullah juga aktif dalam urusan pemerintahan pada zaman itu.
3. Pendapat apologetis yang menyatakan bahwa ada bagian wilayah politik tertentu yang bisa dimiliki oleh perempuan, dan ada wilayah yang sama sekali tidak boleh dijamah oleh perempuan. Wilayah politik yang tidak boleh dijamah oleh perempuan adalah sebagai kepala negara atau presiden. Sedangkan yang boleh yaitu hanya sebatas aktif menjadi anggota di organisasi tertentu.[10]

Selain itu, berkaitan dengan posisi perempuan dalam memperoleh hak-hak politik dalam sistem dan konsep Islam telah banyak diungkapkan. Ada yang berpendapat bahwa Islam tidak mengakui hak-hak politik bagi perempuan. Ada yang memandang sama antara laki-laki dan perempuan dalam hal ini. Ada pula yang memandang bahwa Islam menetapkan dan mengakui hak-hak poitik perempuan kecuali pemmpin negara. Sementara pendapat lain yang mengatakan bahwa masalah ini bukan masalah agama, fikih atau konstitusi melainkan masalah sosial dan politik. Karenanya, masalah ini diserahkan pada kondisi sosial, politik, dan ekonomi masing-masing negara. Berikut ini akan dijelaskan lebih jauh alasan

[10] Syafiq Hasyim, *Hal-Hal Yang Tak Terpinggirkan Tentang Isu-Isu Perempuan Dalam Islam*, 124.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan sandaran tiap kelompok yang masing-masing memiliki pandangan yang berbeda mengenai hak politik perempuan.

Pendapat yang tidak membolehkan perempuan berpolitik mengatakan bahwa Islam tidak menetapkan persamaan antara perempuan dan laki-laki khususnya dalam memperoleh hak politik. Dalam fikih politik misalnya isu tentang lembaga-lembaga pemerintah seperti *immamah,* perwakilan, kementrian dan sebagainya terkesan lebih condong dengan aktifitas laki-laki dibandingkan dengan perempuan. Zuhaili yang mengemukakan ketidakbolehan perempuan untuk terjun ke dunia politik, termasuk menjadi kepala negara. Hal ini dikarenakan ia menjadi sandaran legitimasi dari hadist yang dikemukakan oleh Abu Bakrah: *lan yufliha qaumunwallahu amrahumimra'atun (tak akan beruntung suatu kaum yang menyerahkan semua persoalannya kepada perempuan).*[11]

Pendapat ini disokong kuat pula dengan salah satu fatwa Lajnah fatwa Al Azhar. Hujjatul Islam abu Hamid al-Ghazali mengatakan bahwa kepemimpinan (*immamah*) tidak dipercayakan pada perempuan walaupun memiliki berbagai kesempurnaan dan kemandirian. Bagaimana perempuan dapat mencalonkan diri untuk jabatan pemimpin, sementara ia tidak memiliki hak pengadilan dan kesaksian dalam banyak hukum.[12]

---

[11] Ibid.
[12] Abu Hamid Al-Ghazali, *Fadha'ih al Bathiniyyah Wa Fadhail Al Mustathiriyyah*, 180-181.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sebagaimana hal ini dikemukakan al Qalqasyandi bahwa pemimpin (imam) memerlukan pergaulan dengan orang-orang dan musyawarah dengan mereka dalam berbagai urusan. Perempuan dilarang dari hal tersebut.

Adapun landasan yang digunakan dalam pendapat tersebut yakni ayat al Quran surat An Nisaa' ayat 34, Allah swt. Berfirman:

> "*kaum laki-laki itu adalah pemimpin kaum perempuan. Oleh karena itu, Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka.*"

Selain ayat Al Quran, dalam Sunnah pun terdapat sandaran bagi kelompok yang menentang hak politik perempuan. Hadist Nabi Muhammad Saw. tersebut yakni:

> "*tidak akan berjaya suatu kaum yang menyerahkan urusan kepada perempuan*"

Dari hadist tersebut disimpulkan bahwa perempuan tidak boleh menduduki jabatan umum apapun. Sebab dalam hal itu tidak akan mendatangkan kesuksesan. Maka dalam kemenangannya pun terdapat kerugian. Kerugian tersebut harus dihindarkan. Mereka merujukkan larangan ini pada emosi perempuan dan sifat-sifat kodratnya yang menjadikan tidak mampu mengambil keputusan yang benar. Selain itu, perempuan tidak memiliki kemauan yang teguh dalam masalah-masalah yang penting.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kelompok yang memperbolehkan Perempuan Berpolitik berpendapat bahwa perempuan memiliki hak yang sama dalam hal politik dengan kaum laki-laki. Mereka memiliki hak untuk menduduki seluruh jabatan politik.[13] Sebagian lagi membolehkan hal itu kecuali menjadi pemimpin negara.[14] Pendapat ini berargumen dengan firman Allah SWT:

> "*dan orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, sebagian mereka menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh kebaikan, mencegah kemungkaran, mendirikan shalat, menunaikan zakat, dan mereka taat pada Alla swt dan rasulNya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah. Sesungguhnya Allah itu Mahaperkasa lagi Mahabijaksana*" (QS. At Taubah [9]: 71)

Ayat ini menujukkan bahwa perempuan seperti laki-laki. Masing-masing mereka boleh berpartisipasi dalam politik dan mengatur urusan masyarakat. Perempuan seperti laki-laki, memiliki hak partisipasi dalam mengatur kepentingan umum.

Ayat ini dan ayat-ayat lain yang semakna menjelaskan bahwa Islam memuliakan perempuan dan mempersamakannya dengan laki-laki serta menegaskan kesempurnaan kemanusiaannya. Konsekuensinya, ditetapkan hak-hak

---

[13]Pendapat ini dianut oleh Khawarij, dan khusunya farq al-Syabibah yang memberikan kepada kaum perepuan hak menjadi pemimpin tetapi dengan syarat harus dating di kalangan mereka dan menjalankan kepentingan-kepentingan mereka. (al-Baghdadi, *al Farq bayna al Rifk,* hal.90).

[14]Ikhwan Fauzi, *Perempuan Dan Kekuasaan, Menelusuri Hak Politik Dan Persoalan Gender Dalam Islam*, (Jakarta: Amzah, 2002), 71.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan dipikulkan tugas-tugas yang berkaitan dengan akal.[15] Manusia diciptakan berdasarkan atas landasan persamaan, bukan perbedaan antara laik-laki dan perempuan. Allah swt. berfirman:

> "*dia (Bilqis) berkata, hai para pembesar berilah aku pertimbangan dalam urusanku ini. Aku tidak pernah memutuskan suatu persoalan sebelum kamu berada dalam majelis(ku). Mereka menjawab, kita adalah orang-orang yang memiliki kekuatan dan juga memiliki keberanian yang sangat (dalam peperangan), dan keputusan berada di tangan mu. Maka pertimbangkanlah apa yang kamu perintahkan*"(QA. An Naml [27]: 32-33)

Di situ dijelaskan pula bahwa perempuan mampu mengemukakan pendapat yang benar, berpartisipasi dalam kegiatan politik, dan menanggung tanggungjawabnya.[16] Kaum perempuan telah berbaiat kepada Rasulullah saw sebagaimana laki-laki berbaiat kepadanya. Allah swt. memerintah Rasul-Nya untuk menerima baiat mereka. Dari hadist tersebut dapat disimpulkan bahwa perempuan memiliki hak yang sama mengenai partsisipasi politik, setara dengan kaum laki-laki.

Ketika berbicara tentang kepemimpinan maka akan terkait pula mengenai hal pemimpin, orang yang memimpin baik itu cara dan konsep, mekanisme pemilihan pemimpin dan lain sebagainya. Kepemimpinan berasal dari kata

---

[15] Ibid.

[16] Ikhwan Fauzi, *Perempuan Dan Kekuasaan, Menelusuri Hak Politik Dan Persoalan Gender Dalam Islam*, 73.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

KEMENTERIAN AGAMA PERPUSTAKAAN IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA

pemimpin yang artinya adalah orang yang berada di depan dan memiliki pengikut, baik yang tersebut menyesatkan atau tidak. Edwin P. Hollander menjelaskan kepemimpinan adalah proses mempengaruhi antara seorang pemimpin dan mereka yang disebut pengikut atau bawahan. Sementara pemimpin mempunyai kekuasaan, pengikut atau bawahan.[17]

Persoalan kepemimpinan perempuan dalam Islam merupakan salah satu hal yang banyak disorot oleh tokoh-tokoh Muslim. Hamka dalam analisisnya tentang persoalan kepemimpinan perempuan, mengatakan bahwa perempuan juga dapat memajukan dan mengendalikan roda pemerintahan dengan lancar. Pendapat ini didukung oleh kepemimpinan perempuan di Negara Mesir, Aceh dan Makasar, yang mana kepemimpinan tersebut juga berjalan dengan baik. Dalam pandangan Hamka, kesuksesan raja-raja perempuan tersebut di dukung oleh kemampuan tokoh-tokoh di sekitarnya yang bekerjasama. Pendapatnya tersebut sejalan dengan ijtihad alhi-ahli fiqih Indonesia yang menyatakan bahwa kalau keadaan memerlukan, perempuan boleh diangkat menjadi raja. Asalkan orang-orang besar yang berdiri disekitarnya sanggup memberikan pikiran-pikiran berharga pada dirinya.[18]

Jajat Burhanuddin berkesimpulan bahwa Hamka setuju jika perempuan menjadi pemimpin sebuah Negara, dengan syarat bahwa ia memiliki kapasitas

---

[17] Andi Wahyudi, *Muhammadiyah dalam Gonjang-Ganjing Politik* (Jogjakarta: Penerbit Media Pressindo, 1999), 19.

[18] Rusydi dan Afif, *Hamka Membahas Soal-Soal Islam* (Jakarta: Pustaka Pelajar, 1983), 183.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kepemimpinan disamping kapasitas para pembantunya untuk bekerja sama dan memiliki idealisme yang sama dengan pemimpin perempuan yang ditunjuk.[19]

Namun, perempuan mendapat hambatan dalam melaksanakan tugasnya sebagai pemimpin, permasalahan-permasalah tersebut muncul karena adanya:[20]

a) Batasan-batasan pergaulan antara laki-laki dan perempuan sesuai dengan ketentuan syariat Islam.
b) Perbedaan psikis dan psikologis antara kaum laki-laki dan perempuan.
c) Perbedaan cara pikir bahwa laki-laki berfikir secara global sedangkan perempuan masih banyak yang berpikir secara detail intuitif sesuia dengan kehalusan jiwa dan perasaannya itu.
d) Keharusan menghidari terjadinya fitnah yang mungkin timbul karena keakraban pergaulan yang terpaksa harus dilakukan untuk keberhasilan atau kepentingan-kepentingan itu.

Berseberangan dengan pendapat para tokoh sebelumnya, Siti Rogayah berpendapat bahwa perempuan dapat saja menjadi pimpinan organisasi tetapi bukan pemimpin inti, hanya boleh menjadi pimpinan staf atau yang lain.[21]

Jadi, pada intinya Siti Rogayah berpendapat bahwa perempuan boleh menjadi pemimpin asalkan tidak sebagai pemimpin utama atau inti. Selain itu, perempuan tetap harus berpegang pada prinsip-prinsip Islam, dan tidak boleh

---

[19] Jajat Burhanudin dan Oman Faturahman, *Tentang Perempuan Islam Wacana dan Gerakan* (Jakarta: PT. Tomasu, 2004), 66.

[20]Siti Rogayah Buchorie, *Wanita Islam, Sejarah Perjuangan, Kedudukan Dan Peranannya* (Bandung: Baitul Hikmah, 2006), 222.

[21]Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menyimpang. Islam tidak membedakan kepemimpinan antara laki-laki ataupun perempuan. Dasar pemikiran beliau adalah Al Quran surah Annisa' ayat 34 yang menunjukkan bahwa laki-laki pelindung atau pemimpin dari perempuan, dalam tafsirannya, hal itu lebih ditujukan pada kepemimpinan dalam rumah tangga. Disamping itu, persyaratan bagi seorang pemimpin perempuan secara khusus dan umum perlu disiapkan, dipahami dan dimilki sebagai bekal melaksanakan kepemimpinannya.[22]

## B. Elit Politik

Elite didefinisikan sebagai "mereka yang berhubungan dengan, atau memiliki, posisi penting". Elite politik berkaitan dengan seberapa kekuasaan seseorang berpengaruh pada pembuatan kebijakan pemerintah. Di sini peran elit adalah bagaimana mempengaruhi proses pembuatan kebijakan agar kebijakan tersebut berpihak pada kepentingan elit dan bukan kepentingan publik.

Adapun seberapa besar seseorang (aktor) berpengaruh pada pembuatan kebijakan dipengaruhi beberapa faktor di antaranya: minat pada politik, pengetahuan dan pengalaman politik, kecakapan dan sumber daya politik, partisipasi politik, kedudukan politik serta kekuasaan politik.

Menurut stratifikasi politik yang disusun oleh Pareto maka mayarakat itu terdiri atas dua kelas yaitu: Pertama adalah lapisan atas, yaitu elit yang terbagi

---

[22] Siti Rogayah Buchorie, *Wanita Islam, Sejarah Perjuangan, Kedudukan Dan Peranannya*, 225.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dalam elit yang memerintah (governing elite) dan elit yang tidak memerintah (non governing elite), Kedua adalah lampisan masyarakat yang lebih rendah, yaitu non elit. Disini Pareto meyakini bahwa setiap masyarakat di perintah oleh sekelompok kecil orang mempunyai kualitas-kualitas yang diperlukan bagi kehadiran mereka pada kekuasaan social dan politik yang penuh. Merujuk pada apa yang dikemukakan di atas maka elit ini tidak bisa dipisahkan dalam persoalan kekuasaan, dan kualitas yang dimiliki oleh elit ini membuat mereka dipercaya oleh golongan non elit.[23]

Relevansi stratifikasi politik di sini adalah untuk mengidentifikasi elit politik dalam pembuatan kebijakan daerah. Berdasarkan uraian Pareto di atas, maka para elit yang dimaksud adalah:

1. Kelompok pembuat keputusan, yaitu orang-orang yang umumnya menduduki jabatan resmi utama yang secara langsung terlibat dalam pembuatan kebijakan.
2. Kaum berpengaruh, yaitu individu yang memiliki pengaruh langsung atau implikasi kuat. Yang termasuk dalam kelompok ini antara lain, Partai Politik, LSM, Pemimpin Agama, Tokoh masyarakat, Pengusaha, Akademisi dan lain sebagainya yang di anggap mampu mempengaruhi kebijakan.

---

[23] Redi Panuju, *Komunikasi Organisasi: Dari Konseptual-Teoritis ke Empirik*, (Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 2001), 56.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

## C. Organisasi

Sondang P. Siagian mendefinisikan organisasi sebagai bentuk persekutuan antara dua orang atau lebih yang bekerjasama serta secara formal terikat dalam rangka pencapaian suatu tujuan yang telah ditentukan dalam suatu ikatan yang mana terdapat seseorang atau beberapa orang yang disebut atasan dan seseorang atau kelompok yang disebut sebagai bawahan.[24]

Dari beberapa kutipan tersebut dapat dipahami bahwa suatu organisasi di bentuk karena mempunyai dasar dan tujuan yang ingin dicapai dengan cara kerjasama. Pencapaian tujuan bukan hanya kepuasan individual, tetapi kepuasan dan manfaat bersama. Selain itu, dalam organisasi terdapat beberapa unsur lain yang sangat utama yakni adanya kerjasama, bentuk atau struktur, dan aktifitas.

### 1. Politik Dalam Organisasi

Politik dalam organisasi merupakan sesuatu yang sulit dihindarkan karena organisasi terdiri atas 2 orang atau lebih. Terdapat banyak kepentingan di dalam organisasi, langkanya sumber daya, dan tarik-menarik gagasan. Seluruhnya membuat politik dalam organisasi menjadi konsekuensi logis aktivitas di dalam organisasi.

Bagi Robert Morgan, organisasi serupa dengan sistem politik. Politik di dalam organisasi (*organizational politics*) dengan memfokuskan perhatian pada tiga konsep yaitu *interest* (kepentingan), konflik, dan kekuasaan (*power*). *Interest*

[24] Abdulsyani, *Sosiologi: Sistematika, Teori Dan Terapan* (Jakarta: Bumi Aksara), 115.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(kepentingan) adalah kecenderungan meraih sasaran, nilai, kehendak, harapan, dan kecenderungan lainnya yang membuat orang bertindak dengan satu cara ketimbang lainnya.

Politik keorganisasian muncul tatkala orang berpikir secara berbeda dan bertindak berbeda. Perbedaan ini menciptakan ketegangan (*tension*) yang harus diselesaikan lewat cara-cara politik.

Politik dilihat sebagai proses organisasi yang alamiah demi menyelesaikan perbedaan di antara kelompok kepentingan di dalam organisasi. Politik adalah proses tawar-menawar dan negosiasi yang digunakan untuk mengatasi konflik dan perbedaan pendapat. Dalam cara pandang ini, politik sama dengan pembangunan koalisi dalam proses-proses pembuatan keputusan. Politik bersifat netral dan tidak perlu membahayakan organisasi.

Fairholm, setelah menelusuri sejumlah definisi politik keorganisasian, mengambil sejumlah benang merah definisi politik keorganisasian, yang meliputi:

1. Tindakan yang diambil oleh individu melalui organisasi;
2. Setiap pengaruh yang dilakukan seorang aktor terhadap lainnya;
3. Upaya satu pihak guna mempromosikan kepentingan-diri atas pihak lain dan, lebih lanjut, mengancam kepentingan-diri orang lainnya;
4. Tindakan-tindakan yang biasanya tidak diberi sanksi oleh organisasi tempatnya terjadi, atau hasil yang dicari tidak diberikan sanksi;
5. Politik keorganisasian melibatkan sejumlah proses pertukaran dengan hasil yang *zero-sum* (menang-kalah);

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

6. Politik keorganisasian adalah proses yang melibatkan perumusan sasaran politik, strategi pembuatan keputusan, dan taktik;
7. Politik keorganisasian adalah esensi dari kepemimpinan.

Definisi politik dan politik keorganisasian kiranya saling bersinggungan. Konsep-konsep kekuasaan, *influence* (pengaruh), *resources* (sumberdaya), *interest* (kepetingan), merupakan sejumlah konsep *inheren* (melekat) di dalam definisi politik maupun politik keorganisasian. Juga telah dikatakan bahwa politik tidak selalu berarti buruk. Politik adalah media kompetisi gagasan antar sejumlah pihak yang berbeda guna mencapai tujuan masing-masing.

Keterkaitan antara Politik dalam suatu organisasi dengan istilah kekuasaan dan pengaruh merupakan sebuah keniscayaan dalam organisasi, dan hal itu di mulai dari isu struktural.[25] Sehingga segala aktifitas dalam organisasi tak terlepas dari politik etis dan kekuasaan. Hal ini dikarenakan, ketika sekelompok orang berada dalam suatu organisasi maka mereka akan menggunakan kekuasaan. Setiap anggota memiliki keinginan untuk berada dalam posisi tertentu dengan menggunakan pengaruh, mendapatkan penghargaan, kewenangan menentukan kebijakan organisasi.[26] Sehingga orang-orang dan unit-unit yang bertanggung jawab melaksakan tugas-tugas penting dalam organisasi, memiliki keuntungan dalam rangka mengembangkan dan menggunakan kekuasaan dalam organisasi. Politik menunjuk pada struktur proses penggunaan kekuasaan untuk

---

[25] Haris, *Politik Organisasi: Perspektif Mikro, Diagnose Psikologis* (Jogjakarta: Pustaka Pelajar, 2006), 3.
[26] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mempengaruhi penentuan tujuan, perintah, dan parameter utama yang lain dalam organisasi.[27]

Kekuasaan mengekspresikan kapasitas individu untuk secara sengaja menimbulkan dampak pada orang lain. Pengaruh (*influence*) adalah kemampuan membuat orang menuruti kehendak pemberi pengaruh. Politik mendasarkan diri pada kekuasaan, dan kekuasaan ini tidak terdistribusi secara merata di dalam organisasi. Sebab itu, siapa pun yang menggenggam kekuasaan di dalam organisasi akan menggunakannya guna mempengaruhi (*to influence*) orang lain. Dengan kata lain, kekuasaan adalah sumber daya sosial yang ditujukan demi melancarkan pengaruh, yaitu proses sosial, dan keduanya merupakan sokoguru politik.

Mengenai sumber kekuasaan dalam organisasi, menurut pendapat Gareth Morgan tentang berasal dari:[28]

a. Otoritas formal;
b. Kendali atas sumber daya yang langka;
c. Penggunaan struktur, aturan, dan kebijakan organisasi;
d. Kendali atas proses pembuatan keputusan;
e. Kendali atas pengetahuan dan informasi'
f. Kendali atas batasan (*boundary*) organisasi;
g. Kendali atas teknologi

---

[27] Ibid.

[28] Gareth Morgan, *Images of Organization* (Thousand Oaks, California: Sage Publications, 2006), 25.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

h. Aliansi interpersonal, jaringan, dan kendali atas "organisasi informal";

i. Simbolisme dan manajemen makna (filosofi organisasi);

j. Gender dan manajemen hubungan berbasis gender;

k. Faktor-faktor struktural yang menentukan tahap-tahap tindakan; Kekuasaan yang telah seorang miliki.

Sedangkan Stephen P. Robbins, sumber kekuasaan dibagi atas 2 lokasi, yaitu: (1) Kekuasaan Formal dan (2) Kekuasaan Personal. Kekuasaan Formal didasarkan posisi individu dalam organisasi. Kekuasaan formal juga bisa datang dari kemampuan melakukan tindak koersif, *reward*, juga otoritas. Kekuasaan personal datang dari individu sendiri. Mereka tidak harus punya posisi formal untuk berkuasa. Orang-orang yang kompeten bekerja kendati bukan manajer atau pimpinan, bisa berkuasa. Kekuasaan ini datang dari karakteristik unik mereka.

**2. Organisasi Keagamaan**

Terdapat banyak organisasi yang tumbuh di masyarakat, salah satunya yakni organisasi agama. Pendirian organisasi masyarakat berkaitan langsung dengan kepentingan seluruh anggota atau pendukung organisasi itu sendiri. Hal ini dikarenakan pembentukan suatu organisasi tidak lain adalah sebagai alat untuk mencapai dan mendukung kepentingan anggota atau pendukung dari organisasi tersebut.

Mengutip Malinowski yang beranggapan bahwa pembentukan organisasi diperlukan adanya watak kelompok, personalia yang dibutuhkan, seperangkat

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

norma, peralatan, seperangkat aktifitas rutin dan fungsi objektif, dan perlunya pemahaman tentang perlunya kondisi teknis bagi pendirian organisasi di dalam masyarakat.[29] Persyaratan itu perlu dilengkapi pula dengan kondisi politis dalam bentuk terjadinya pengakuan hak berorganisasi, adanya keleluasaan mendirikan organisasi dan jaminan politik untuk melakukan kegiatan berorganisasi. Selain itu, kondisi sosial bagi organisasi berupa sistem komunikasi antar warga masyarakat, pengalokasian posisi di dalam seluruh struktur masyarakat, kepemimpinan dan ideologi juga merupakan hal yang penting.[30]

Jadi, organisasi masyarakat didirikan untuk menampung aspirasi serta ideologi sekelompok masyarakat. Dengan organisasi itu pula kerjasama diwujudkan agar lebih mudah dalam mencapai cita-cita kelompok. Dan kaitannya dengan keberadaannya dalam suatu bagian dari negara, aspirasi suatu kelompok memiliki kemumngkinan untuk diakomodir oleh pemerintah.

Di samping itu pula, suatu organisasi sosial dimaksudkan untuk membentuk tingkah laku sesuai dengan pola yang ditentukan, baik pola yang diterapkan oleh doktrin agama, ajaran etik atau filsafat politik. Elisabet K. Nothingham menjelaskan bahwa organisasi tersebut harus berhasil dalam dua sektor. Di satu fihak organisasi-organisasi tersebut harus menertibkan kebiasaan-kebiasaan para anggotanya yang sesuai dengan cita-cita yang ingin dicapai. Di pihak lain, organisasi-organisasi tersebut juga ingin mempengaruhi masyarakat

---

[29] Arbi Sanit, *Swadaya Politik Masyarakat* (Jakarta: CV Rajawali, 1985), 41.
[30] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang lebih luas, mereka jelas harus mengembangkan organisasi dan memperbesar pengaruhya yang potensial dengan cara memasukkan orang-orang yang mempunyai kedudukan dan kekuasaan di luar lingkungan mereka.[31]

Agama sebagai organisasi kemanusiaan cenderung tidak sempurna, perubahan dan ketidakpastian yang terus menerus. Elizabet K. Huntington menegaskan bahwa baik di masa lampau maupun masa yang akan datang sebuah organisasi agama yang sempurna, yang tidak pernah berubah dan dan tidak pernah gagal. Meskipun organisasi keagamaan tersebut dari dulu hingga kini tetap penting, tidak hanya sebagai kekuatan stabilitator di dalam masyarakat tetapai juga sebagi suatu sumber jaminan keamanan bagi anggota-anggotanya walaupun organisasi keagamaan itu sendiri tidak begitu stabil.

Dengan demikian, adalah hal yang wajar ketika suatu organisasi keagamaan sebagai bagian dari organisasi masyarakat tidak sempurna atau kekal. Bahkan biasanya terdapat perbedaan nyata antara cita-cita etik agama yang luhur dengan perwujudannya di dalam lembaga-lembaga kemanusiaan. Pengetahuan sosiologis yang mengatakan bahwa semua lembaga adalah hasil dari aktifitas manusia yang disengaja. Oleh sebab itu tidak ada hubungan otomatik antara cita-cita yang luhur dengan bentuk-bentuk institusional seharusnya meredakan kekecewaan dan keputusasaan tersebut.

---

[31]Elizabet K. Huntington, *Agama Dan Masyarakat* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996), 145.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Terdapat beberapa tipologi akar gerakan Islam, William Sheaperd dalam karyanya *Islam And Ideology: Toward The Typologi*, menjelaskan beberapa tipologi akar gerakan Islam tersebut. Diantaranya yakni: sekularisme, modernisme Islam, Islam radikal, tradisionalisme dan neo tradisionalisme.[32]

### 3. Organisasi Islam Modern

Kata modern adalah sebuah istilah yang memiliki arti baru lawan kata dari kuno, inovatif sebagai lawan tradisional. Meskipun demikian, apa yang disebut modern pada suatu waktu dan tempat, dalam kaitannya dengan budaya tidak akan memiliki arti yang sama pada masa yang akan datang atau dalam konteks yang lain. Oleh sebab itu, penilaian tentang apa yang disebut modern adalah persoalan perspektif dari orang yang melihat. Fenomena yang nampaknya sama bisa jadi sangat berbeda tergantung pada konteks yang berbeda.[33]

Istilah modern juga terkait dengan istilah reformasi. Reformasi sering dipakai untuk menunjukkan kecenderungan perbaikan, kemajuan ke arah realisasi masa depan yang dicitakan.

Reformasi agama menekankan pada pemaknaan agama itu sendiri dalam kaitannya dengan tuntutan perkembangan.[34] Oleh karena itu agama itu tidak hanya muncul dalam bentuk ritual dan peribadatan semata, tetapi juga merefleksikan pengalaman dan fenomena sosial masyarakat. Hal ini Nampak pada ayat-ayat kitab

---

[32]Sheaperd William, *Islam And Ideology: Toward A Typology* (Ijmes, 1987), 355-378.
[33] Achmad Juhdi, *Orientasi Ideologi,* 93.
[34] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

suci al Quran yang direfleksikan untuk melakukan berbagai amal usaha organisasi. Dalam makna istilah inilah modenisme dan reformisme saling berkaitan.

Sebaga sebuah kecenderungan intelektual, modernism Islam muncul karena tantangan perkembangan yang dihadapi oleh umat. Indonesia pada awal abad ke-19 dan ke-20 tantangan politik yang dihadapi adalah bagaimana membebaskan diri dari penjajahan Barat; tantangan kultural adalah masuknya nilai-nilai baru akibat dari kemajuan ilmu pengetahuan modern barat. Sedangkan tantangan ekonomi adalah bagaimana mengentaskan kebodohan dan kemiskinan umat; dan tantangan keagamaan adalah bagaimana meningkatkan wawasan pengetahuan keagamaan serta mendorong umat untuk bisa memahami ajaran agama secara mandiri. Jawaban dari tantangan yang terakhir adalah dengan apa yang disebut sebagai demokratisasi agama.

Tantangan-tantangan seperti inilah yang akhirnya mendorong kaum modernis Muslim untuk merumuskan gagasan dan pikiran yang kemudian menjadi orientasi ideologis berbagai ragam gerakan Islam di era modern. Di antara karaktreristik yang dominan adalah yang merefleksikan ideology kaum modernis Muslim adalah pandangan dasar keagamaan, pandangan mengenai dunia, sikap terhadap dunia barat, hubungan antara akal dan agama, sikapnya terhadap pencapaian masa lalu, hubungan antara agama dan Negara, isu-isu kontemporer seperti peran perempuan dalam kehidupan masyarakat dan lain sebagainya.[35]

---

[35] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bagi seorang modernis Muslim, Islam memberikan dasar bagi semua aspek kehidupan masyarakat dunia, baik pribadi maupun masyarakat, yang dipandang selalu sesuai dengan semangat perkembangan. Bagi kaum modernis Muslim tugas setiap Muslim adalah mengimplementasikan setiap aspek ajaran keagamaan dalam segala aspek kehidupan. Dasar pandangan ini dibentuk oleh satu keyakinan bahwa Islam memiliki watak ajaran yang universal.

Universalitas ajaran Islam ini dilihat dari aspek isi mencakup semua dasar norma bagi semua aspek kehidupan, baik yang berkaitan dengan persoalan ritual atau sosial; dari aspek waktu, Islam berlaku sepanjang masa, sejak diturunkan pada nabi Muhammad hingga Hari Akhir nanti; dan dilihat dari aspek pemeluk, Islam berlaku untuk semua umat manusia tanpa memandang batasan etnis maupun geografis.

Muatan makna universal juga terdapat pada ajaran Islam yang sangat luas dan umum, yakni pada Al Quran. Jangkauan cakupan nilai ajaran yang begitu luas dengan sifat perumusan ajaran yang masih umum memberikan peluan pemahaman kepada umat Islam dan kemudian mengaplikasiannya. Usaha untuk memahami dan pengaplikasian ajaran dalam kehidupan sehari-hari agar sesuai dengan tuntutan perkembangan menjadi salah satu persoalan penting yang diperjuangkan oleh kaum modernis Muslim.

Keberhasilan gerakan modern Islam dalam menjawab tantangan baru disebabkan karena sikapnya yang mampu beradaptasi, kemampuan menghadapi,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengatasi, dan mempersiapkan diri dalam menghadapi tantangan baru.[36] Apakah tantangan itu berasal dari dinamika sosial internal, dari konteks sosial eksternal, dari dampak kekuatan alam atau sumber-sumber lain. Sebuah masyarakat yang mengalami proses modernisasi harus mampu menerima perubahan.[37]

Aspek kunci modernisasi sebenarnya adalah proses untuk mempertahankan pertumbuhan dan perubahan melalui pengembangan sikap sosial budaya yang tidak hanya mendukung kelestarian perubahan tetapi juga mampu menyerap perubahan-perubahan yang terjadi diluar premis institusionalnya sendiri.[38] Hal ini, telah jelas bahwa salah satu aspek yang menentukan keberhasilan modernisasi adalah berkaitan dengan kemampuan untuk menyesuaikan dengan system sosial budaya.

Secara umum, karakterisik pembaharuan seperti yang digambarkan di atas bisa dilihat dari dua perspektif. Pertama berkaitan dengan institusi, dan kedua berkaitan dengan individu. Pendekatan pertama lebih menekankan pada cara bagaimana mengorganisasi atau melakukan sesuatu, sedang yang kedua lebih menekankan pada cara berpikir dan merasa.[39]

Analisa pertama mengaitkan modernisasi dengan gerakan-gerakan Islam yang menggunakan dan membentuk organisasi sebagai sarana untuk memperjuangkan cita-cita. Organisasi adalah sebuah system aktifitas yang

---

[36] Achmad Juhdi, *Orientasi Ideologi,* 95.

[37] Mitsuo nakamura, *Indonesia's Muhammadiyah As An Urban Phenomenon: An Observation Of Rural-Urban Contrast In Islamic Social Movement* (Tokyo: the middle easter culture centre, 1989), 209-211.

[38] Achmad Juhdi, *Orientasi Ideologi,* 96.

[39] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengarah pada tujuan organisasi, atau kelompok yang terikat dalam usaha bersama untuk tujuan tertentu. Untuk mengatur dan mengontrol aktifitas organisasi, beberapa organisasi Islam menerapkan system manajemen dan administrasi. Kepemimpinan adalah salah satu unsur utama dalam gerakan yang memainkan peran yang sangat penting dalam managemen organisasi. Semua perilaku dan aktifitas yang dilakukan oleh anggota organisasi dipandang sebagai substansi organisasi.

Dalam penelitiannya tentang Muhammadiyah, Nakamura mengatakan bahwa karakteristik ini bisa berkembang karena gerakan Islam ini menghargai rasionalitas dan nilai demokrasi yang ada dalam organisasi. Semua anggota memiliki hak yang sama dan semua tingkat kepemimpinan dipilih, tidak diangkat. Tidak ada perbedaan antara warga biasa dan ulama menyangkut hak dan kewajiban organisasi. Lebih lanjut, Nakamura menyimpulkan bahwa gerakan ini adalah organisasi sukarela berdasarkan demokrasi internal.[40]

Analisis kedua yakni merujuk pada karakteristik individual. Pendekatan ini memahami modernisasi terutama sebagai proses perubahan cara menerima, menyatakan dan menilai. Melalui cara ini modernisasi didefinisikan sebagai bentuk fungsi individu, seperangkat kecenderungan untuk berbuat dengan cara tertentu.

---

[40] Mitsuo nakamura, *Indonesia's Muhammadiyah As An Urban Phenomenon: An Observation Of Rural-Urban Contrast In Islamic Social Movement,* 211.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Keberhasilan organisasi Islam dalam menyesuiakan diri pada situasi yang berubah dibuktikan oleh perkembangan organisasi yang terus berlanjut dalam hal keanggotaan dan jumlah cabang, lembaga pendidikan serta amal usaha yang dimilikinya. Terus berkembangnya jumlah anggota yang ada di kota merupakan modal berharga untuk mendukung progam organisasi. Dalam masyarakat menengah kota ditemukan karakteristik yang oleh para sosiolog disebut sebagai kunci modernisasi. Diantara karakteristik ini adalah "melek huruf", yang pada akhirnya cirri ini menuntut adanya pendidikan.[41]

Beberapa karakteristik modernis lain yang ada pada para individu pendukung gerakan-gerakan ini adalah: kesediaan menerima pengalaman dan ide baru; lebih demokratis dalam menerima pandangan orang lain; memiliki *Concern* yang besar pada perencanaan, organisasi, serta efisiansi; berorientasi pada masa depan dari pada masa lalu; dan keyakinan akan ditegakkannya keadilan.[42] Kecenderungan menerima ide baru sama dengan kesediaan menerima pengalaman baru. Sikap ini muncul dalam berbagai bentuk dan konteks, sebagaimana gerakan-gerakan Islam menyatakan kesediaannya menerima beberapa contoh bentuk institusi sosial Barat, dan menerima system pendidikan modern pada awal abad ke duapuluh. Mereka ini berkeyakinan bahwa dari mana pun asalnya ide, atau gagasan itu, selama tidak bertantangan dengan prinsip-prinsip ajaran Islam adalah diperbolehkan.

---

[41]Achmad Juhdi, *Orientasi Ideologi*, 97.
[42]Achmad Juhdi, *Orientasi Ideologi,* 98.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

# BAB III

# METODE PENELITIAN

## 1. Teknik Pendekatan Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*), yang menggunakan jenis penelitian kualitatif. Penggunaan jenis penelitian kualitatif sebagai prosedur penelitian menghasilkan data deskriptif dan fenomena yang diamati.[1] Yaitu mengupayakan jawaban-jawaban yang diperoleh melalui deskripsi komprehensif yang terkait dengan ungkapan, persepsi, tindakan, norma dasar dan kondisi sosial yang melatarbelakangi informan dalam menghasilkan gagasan perempuan dan politik, dan dalam kaitannya dengan kebijakan distribusi peran dalam struktur Muhammadiyah Jawa Timur.

Paradigma yang digunakan adalah paradigma konstruksivisme. Paradigma ini menerjemahkan realitas sosial itu ada dalam beragam bentuk konstruksi mental yang didasarkan pada pengalaman sosial, bersifat lokal dan bersifat spesifik serta tergantung pada pihak yang melakukannya. Oleh karenanya realitas sosial yang diamati seseorang tidak bisa digeralisasikan kepada semua orang sebagaimana yang dilakukan Positivisme.[2]

---

[1] Deddy Mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif: Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnnya*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2004), 13.

[2] Agus Salim, *Teori dan Paradigma Penelitian Sosial: Buku Sumber untuk Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2006), 71.



digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sejalan dengan jenis penelitian kualitatif yang digunakan sebagai dasar berfikir dalam penelitian ini, maka pendekatan yang keterkaitan terhadap penelitian kualitatif adalah fenomenologi. Secara konseptual, Edmund Husserl mengatakan, "*phenomenologi will be established not as a science of fact but as a science of essential being, as eidetic science, its aim at establishing knowledge of essences an absolutely not fact.*" (fenomenologi ingin dibuktikan bukan sebagai sains tentang fakta, tetapi sebagai sains tentang *essential being* (keberadaan esensi), dan *eidetic science*, tujuannya adalah memantapkan pengetahuan tentang esensi dan benar-benar bukan fakta).[3] Gagasan Husserl ini menegaskan bahwa pengetahuan (*science*) tidak berkepentingan terhadap fakta atau realitas maupun hal-hal yang empirik. Melainkan menempatkan sebuah fakta atau realitas empiris sebagai refleksi menuju pengetahuan yang esensi. Dengan konsentrasi pada yang nampak (realitas empiris) dalam pengalaman, maka esensi dapat dirumuskan.

Dalam dataran aplikatif, Alfred Schutz salah satu tokoh fenomenologi berpendirian bahwa tindakan manusia menjadi suatu hubungan sosial bila manusia memberikan arti atau makna tertentu terhadap tindakannya itu, dan manusia lain memahami pula tindakannya itu sebagai suatu yang penuh arti.[4] Aplikatif fenomenologis ini mengilustrasikan bahwa manusia menginterpretasikan tindakannya sekaligus memberikan arti atau makna terhadap apa yang dilihat.

---

[3] Edmund Husserl, *Ideas: General Introduction to Pure Phenomenologi,* (New York, Collier Books, 1962), 39.

[4] George Ritzer, *Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda,* terj. (Jakarta: Rajawali, 1992), 69.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya, interpretasi (*verstehen/ understanding*) dilakukan sebagai proses aktif dalam memberikan makna terhadap sesuatu yang diamati, seperti misalnya sebuah tindakan, suatu situasi atau sebuah teks, yang semua itu dapat di sebut dengan pengalaman (*experience*).[5]

Dengan demikian pendekatan fenomologis dalam kaitannya dengan penelitian ini adalah bertujuan untuk mengarahkan model studi yang meneliti gagasan dan motivasi yang ada dibalik sebuah pemikiran dan kebijakan Muhammadiyah untuk organisasinya terkait dengan gagasan perempuan dan politik. Pendekatan ini sangat diperlukan dan relevan untuk digunakan dalam menggapai data-data yang bersifat subyektif.

**2. Jenis Dan Sumber Data**

Sumber data utama dalam penelitian kualitatif ini ialah kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Berkaitan dengan hal itu, pada bagian ini jenis datanya dibagi ke dalam kata-kata dan tindakan, sumber data tertulis.[6]

Data tersebut diklasifikasikan dan di analisa untuk mempermudah dalam menghadapi pemecahan masalah dalam penelitian. Perolehannya data prenelitian ini diklasifikasikan menjadi dua sumber, yakni:

---

[5] Pengalaman tidak lain adalah akibat suatu obyek yang merangsang alat inderawi, yang secara demikian menimbulkan rangsangan syaraf yang diteruskan ke otak. Lihat Louis O. Kattsoff, Pengantar Filsafat, terj. Soejono Soemargono (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2004), cet. IX, 134.

[6] Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2006), 157.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Data Primer

Data primer diperoleh secara langsung dari informan yang telah ditentukan, dan dilakukan melalui wawancara. Adapun data primer dalam penelitian pertama berasal dari elit organisasi Muhammadiyah Jawa Timur sebagai pihak pimpinan dan pihak yang membuat kebijakan organisasi. Pihak kedua adalah aktivis Muhammadiyah yang berhubungan dengan pihak yang mengerti tentang perempuan dan politik. Aktifis tersebut juga berasal dari perempuan yang berperan sebagai pimpinan organisasi Aisyiyah Jawa Timur. Kedua informan tersebut merupakan *key informan*.

b. Data Sekunder

Data sekunder diperoleh dari bahan kepustakaan. Data ini digunakan untuk melengkapi dan mendukung data primer, mengingat bahwa data primer dapat dikatakan sebagai data praktik yang ada secara langsung dalam praktek di lapangan karena penerapan suatu teori.[7]

Adapun data sekunder yang digunakan peneliti adalah dengan buku-buku referensi yang terkait dengan penelitian, yakni mengenai perempuan dan politik dalam perspektif Muhammadiyah dan AD ART Muhammadiyah tentang struktur kepemimpinan.

---

[7] P. Joko Subagyo, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), 87-88.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, strategi pengumpulan data dipilah menjadi dua cara pokok yaitu metode non-interaktif dan interaktif. Metode non-interaktif mencangkup dokumentasi sebagai data sekunder; dan metode interaktif meliputi wawancara.[8] Pada metode non-interaktif diwujudkan melalui hasil riset pustaka terhadap dokumentasi, sedang metode interaktif termanifestasi melalui wawancara mendalam (*in-depth interview*) dengan asumsi bahwa wawancara tersebut juga dapat mewakili pengamatan berperan serta.[9] Prioritas metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode interaktif untuk perolehan data primer. Kemudian, sebagai pelengkap data primer tersebut digunakan metode non-interaktif.

a. Metode Interaktif

Metode intreraktif yang digunakan adalah wawancara mendalam (*in-depth interview*) atau yang biasa disebut dengan wawancara tak berstruktur (*un-structured interview*). Wawancara ini bertujuan untuk memahami makna dibalik tindakan[10] digunakan juga sebagai refleksi empiris atas data-data teoritik dari hasil riset pustaka guna mengetahui secara komprehensif konstruksi dunia kognitif (konstruksi pemikirannya) di kalangan elit pimpinan Muhammadiyah dalam

---

[8] H.B. Sutopo, *Telaah Karya Penelitian, Sumbangsih Jurnal Penelitian*, Universitas sebelas Maret, No 1 Tahun IV (1988), 19.

[9] Dedi Mulyana, *Metodologi Penelitian Kulitatif: Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnnya*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2004), 183.

[10] Jenis wawancara ini sering digunakan untuk mengungkapkan pengalaman hidup (*life experience*) subjek penelitian yang menekankan konstruksi simbolik dan kontekstual identitas subyek penelitian. Lihat Dedi Mulyana, *Metodologi Penelitian Kulitatif..*, 187.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bersikap dan bertindak untuk suatu kebijakan organisasi. Dengan kata lain, wawancara dilakukan guna menangkap alam makna dari konstruksi-konstruksi individu kalangan elit pimpinan dan perempuan Muhammadiyah yang berkesuaian dengan sisi material atau substansial gagasan perempuan dan politik dalam organisasinya.

b. Metode non-Interaktif

Pada dataran riset pustaka, peneliti menggunakan data ini untuk menyelesaikan dua level masalah sekaligus, yakni masalah teoritik dan masalah empirik. Peneliti berusaha mengumpulkan data-data dokumenter baik yang bersifat teoritik maupun empirik. Teknik ini terutama berguna dalam upaya menyusun kerangka teoritik maupun memperkaya data empirik yang berkenaan dengan gagasan perempuan dan politik maupun berbagai sikap dan kebijakan distribusi peran pada struktur Muhammadiyah yang memiliki korelasi dengan gagasan perempuan dan politik.

Dengan demikian, untuk mencapai semua itu, data-data yang dihimpun dalam penelitian ini ditelusuri melalui koran, majalah, dan buku-buku ilmiah maupun nonfiksi (sejarah, sosiologi, dan politik), serta catatan-catatan atau arsip yang diterbitkan maupun tidak oleh institusi Muhammadiyah Jawa Timur. Data-data ini dijadikan sebagai instrumen untuk memahami sikap dan kebijakan Muhammadiyah berkenaan dengan diskursus perempuan dan politik.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

**4. Teknik Penentuan Informan**

Untuk memperoleh data mengeni gagasan perempuan dan politik serta implementasinya dalam distribusi jabatan dalam PWM Jatim, maka akan dilakukan wawancara mendalam dengan informan yakni elit pimpinan di PWM Jatim.

Dalam penelitian kualitatif sebagaimana dikatakan oleh Lexy J. Moleong, "tidak ada sampel acak, tetapi sampel bertujuan (*purposive sample*)".[11] Artinya, dalam penelitian kualitatif pengambilan sampel informan dilakukan secara *purporsve* (bertujuan). Oleh karenanya, pemilihan terhadap sampel berdasar pada penilaian yang logis, sehingga sampel yang dipilih dapat dianggap memungkinkan mewakili populasi. Dengan demikian, informan akan dipilih secara *purporsive* (bertujuan) berdasarkan kriteria-kriteria yang mendukung bagi penelitian ini.

Sasaran penelitian ini terfokus pada gagasan Muhammadiyah tentang perempuan dan politik serta implementasi dari pemikiran tersebut dalam distribusi peran di struktur organisasi. Mengingat populasi Muhammadiyah berbasis kultural maupun struktural, maka dalam dataran aplikatif *purposive sample* yang dianggap dapat mewakili populasi adalah para elit (*strategic elite*) Muhammadiyah.[12] Dalam

---

[11] Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Rosdakarya, 2002), 165.

[12] Kelompok elit (*strategic elite* ) adalah kelompok kecil (minoritas) yang mempunyai peranan dominan dalam masyarakat lainnya yang jumlahnya lebih besar (mayoritas). Lihat Redi Panuju, *Komunikasi Organisasi: Dari Konseptual-Teoritis ke Empirik*, (Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 2001), 56.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Penentuan informan adalah mereka yang berada dalam struktural kepemimpinan, yakni sebagai berikut:

a) 3 orang aktifis PWM Jatim (juga terdiri dari Pimpinan Aisiyah Jawa Timur)

b) 2 orang elit Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Timur.

Pertimbangannya adalah peran mereka sebagai pemimpin yang dalam pernyataan Robert Dubin, adalah pelaksana otoritas dan pembuatan keputusan.[13] Sedang Goerge R. Terry merumuskan kepemimpinan adalah aktivitas untuk mempengaruhi orang-orang agar diarahkan mencapai tujuan organisasi.[14] Ringkasnya, mereka yang berada dalam struktrur kepemimpinan mempunyai posisi dan peran strategis dalam menentukan pengambilan keputusan dan tindakan berdasarkan tujuan yang dicapai oleh institusi Muhammadiyah.

Di sisi lain, implementasi konstruksi pemikiran mereka dalam hal ini adalah pemimpin secara tidak langsung mempunyai peranan penting dalam mewarnai sikap dan tindakan sosial anggota organisasi maupun masyarakat, mengingat institusi Muhammadiyah merupakan salah satu ormas keagamaan terbesar di Indonesia, pada dataran ini secara institusi Muhammadiyah sangat mungkin memberikan konstribusi terhadap pembentukan makna material perempuan dan politik di Indonesia. Dengan kata lain, mereka ikut andil dalam menentukan gerak perubahan yang terjadi di masyarakat Indonesia melalui

---

[13] Lihat Mifta Thoha, Prilaku Organisasi: Konsep Dasar dan Aplikasinya, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1998), 227.

[14] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sosialisasi kebijakan-kebijakannya yang termanifestasi dalam institusi Muhammadiyah.

Oleh karenanya, mereka sebagai informan, dapat dikatakan masuk dalam kriteria-kreteria yang dapat mendukung perolehan data untuk penelitian ini. Adapun nama-nama dari narasumber tersebut diinisialkan.atau disamarkan. Hal ini merupakan bagian dari etika penelitian dan dimaksudkan untuk melindungi narasumber yang notabene telah memberikan informasi pada peneliti.

Wawancara penelitian tersebut dilakukan di seputar bulan Januari-Maret 2011 melalui beberapa kali pertemuan dengan narasumber. Penelitian dilakukan di kantor Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Timur yang bertempat di Jl. Kertomenanggal IV/1 Surabaya. Mengenai pertanyaan wawancara disesuaikan dengan daftar pertanyaan terbuka yang sebelumnya telah dipersiapkan oleh peneliti.

**5. Teknk Analisa Data**

Analisis data kualitatif ini merupakan upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensistensiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceriterakan pada orang lain.[15]

---

[15] Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2006), 248.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Konsep dasar adanya analisa data adalah proses pengorganisasian dan pengurutan data ke dalam pola, katagori dan satuan uraian dasar sehingga ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja atas pembacaan terhadap data.[16] Untuk memenuhi konsep dasar analisa data ini peneliti mengikuti saran Mathew B. Miles dan A. Michael Huberman, yang menawarkan metode analisis interaktif, yakni melakukan analisa data secara simultan dan terus menerus sejak pengumpulan data dilakukan hingga selesainya pengumpulan data dalam waktu tertentu melalui proses reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*data display*) dan penarikan kesimpulan (*conclution: drawing/verifying*).[17]

Secara operasional, tehnik analisis data kualitatif[18] dilakukan melalui beberapa tahapan dengan menggunakan model Miles dan Huberman.

a. Pengumpulan data, yaitu mencari dan mengumpulkan data yang diperlukan yang dilakukan terhadap berbagai jenis dan bentuk data yang ada di lapangan. Data yang dikumpulkan yakni data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari wawancara dengan aktififis dan elit pimpinan Muhammadiyah mengenai gagasan perempuan dan politik serta implementasinya dalam kebijakan penentuan struktur organisasi

---

[16] Konsep dasar akan pengertian analisa data ini merupakan sintesis yang dilakukan Lexy J. Moleong terhadap definisi Patton maupun Bogdan dan Taylor. Lihat Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Rosdakarya, 2002), 103.

[17] Mathew B. Miles dan A. Michael Huberman, *Analisis Data Kualitatif,* terj. Tjetjep Rohendi Rohidi (Jakarta: UI Press, 1992), 20. Lihat juga: Sugiyono, *Memahami Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alphabeta, 2005), 91-93.

[18] Lexi J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2007), 247. lihat juga, Mattew Miles & A. Michael Huberman, *Analisis Data Kualitatif.* Diterjemahkan Oleh Jetjep Rohendi (Jakarta: UI Perss, 1992) 16-20.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Muhammadiyah. Data sekunder yakni diperoleh buku, artikel maupun jurnal yang terkait dengan permasalahan penelitian. Beberapa buku yang dijadikan sebagai rujukan juga berasal dari terbitan PWM Jatim dan PWA Jatim.

b. Reduksi data, yakni sebagai suatu proses pemilihan, penyederhanaan, klarifikasi data kasar dari hasil penggunaan teknik dan alat pengumpulan data di lapangan. Reduksi data dilaksanakan secara bertahap dengan cara membuat ringkasan data dan menelusuri tema yang tersebar. Setiap data yang diperoleh disilang melalui sumber data yang berbeda untuk menggali informasi secara mendalam dan akurat. Melalui reduksi data, informasi dari wawancara dan telaah pustaka akan dipilah, diklarifikasi sehingga dapat dikelompokkan mana informasi yang berkaitan dengan gagasan Muhammadiyah terhadap perempuan dan poliik; dan mana saja data yang berkaitan dengan penentuan kebijakan dalam distribusi peran pada struktur Muhammadiyah. Kemudian data-data tersebut diringkas sesuai kelompok datanya.

c. Penyajian data, yaitu merupakan upaya penyusunan sekumpulan informasi menjadi pernyataan. Data kualitatif disajikan dalam bentuk teks yang pada mulanya terpencar dan terpisah menurut sumber informasi dan saat diperolehnya informasi tersebut. Kemudian, data diklasifikasikan menurut pokok-pokok permasalahan. Pada tahap ini data yang telah terkelompokkan disajikan dalam bentuk narasi yang mendeskripsikan data yang diperoleh. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa pokok masalah yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

diangkat adalah gagasan perempuan dan politik serta implementasi gagasan tersebut dalam kebijakan distribusi peran dalam struktur Muhammadiyah.

d. Menarik kesimpulan dan verifikasi data berdasarkan reduksi, interpretasi dan penyajian data yang telah dilakukan pada tahap sebelumnya. Selaras dengan mekanisme logika pemikiran induktif, maka penarikan kesimpulan akan bertolak dari hal-hal yang khusus (spesifik) sampai kepada rumusan simpulan yang sifatnya umum (*general*).

**6. Teknik Keabsahan Data**

Agar penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan, maka diperlukan keabsahan data, salah satu metodenya adalah melalui Triangulasi. [19] Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data tersebut. Jadi triangulasi merupakan cara yang paling tepat untuk menghilangkan perbedaan konstruksi kenyataan yang ada dalam suatu konteks yang diteliti saat pengumpulan data tentang berbagai kejadian dan hubungan berbagai pandangan. Dengan kata lain triangulasi, peneliti dapat mengecek ulang temuannya dengan jalan membandingkannya dengan berbagai sumber, metode, atau teori. Untuk itu maka peneliti dapat melakukannya dengan cara mengadakan wawancara dengan anggota PWM dan PWA Jatim yang mengerti tentang kehidupan organisasi Muhammadiyah Jawa timur.

[19] Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian*, 327-330.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

# BAB IV

# HASIL PENELITIAN

## A. Organisasi Muhammadiyah

Muhammadiyah merupakan salah satu organisasi masyarakat Islam yang didirikan oleh K.H. Ahmad Dahlan pada tanggal 18 November 1912 M (8 Dzulhijjah 1330 H) di Yogyakarta. Secara etimologis Muhmmadiyah dapat diartikan sebagai "pengikut Muhammad SAW", yang terdiri dari kata 'Muhammad' dan 'ya nisbiyah'. Sehingga setiap orang yang meyakini dan menjadi pengikut Muhammad SAW adalah orang Muhammadiyah tanpa dibatasi oleh ideologi golongan, bangsa, dan organisasi. Sementara secara terminologi, Muhammadiyah adalah gerakan dakwah amar ma'ruf nahi munkar berasas Islam dan bersumber Al Qur'an dan sunnah demi terwujudnya *baldhatun thaibatun warobbul ghofur*, yang bersumber pada QS. Ali Imron: 104.[1]

Misi utama yang dibawa oleh Muhammadiyah adalah pembaharuan (tajdid) pembaharuan agama. Adapun yang dimaksudkan dengan pembaharuan oleh Muhammadiyah adalah seperti yang dikemukakan M. Djindar Tamimy wakil ketua PP Muhammadiyah: maksud dari kata-kata tajdid (bahasa arab artinya

[1] Syarifudin Juhri, *Indonesia dalam Dinamlka Politik Indonesia 1966-2006* (Jakarta: Pustaka Pelajar, 2010), XVIII.



digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

"pembaharuan") adalah mengenai dua segi menurut sasarannya.[2] Pertama, berarti pembaharuan dalam arti mengembalikan pada keaslian dan kemurniannya, ialah bila tajdid itu sasarannya mengenai soal-soal prinsip perjuangan yang sifatnya tetap/ tidak berubah-ubah.

Kedua, berarti pembaharuan dalam modernisasi, ialah bila tajdid itu sasarannya mengenai masalah metode, sistem, teknik, strategi, taktik perjuangan, dan lain sebagainya, yang sifatnya berubah-ubah, disesuaikan dengan situasi dan kondisi atau ruang dan waktu. Tajdid dalam arti keduanya, hakikatnya merupakan watak ajaran Islam itu sendiri dalam perjuangannya.

Menurut Ahmad Syafi'i Ma'arif, dalam buku Syarifudin Juhri yang berjudul Muhammadiyah dalam dinamika politik Indonesia tahun 1966-2006, menyebutkan bahwa Muhammadiyah merupakan gerakan Islam yang bercorak dan watak kebangsaan dan nasionalisme yang kuat. Muhammadiyah lansung bergerak untuk membenahi kultur umat terjajah melalui proses pencerahan dan kemanusiaan, sesuatu yang yang sangat mendasar bagi bangunan sebuah bangsa yang akan lahir. Keterbukaannya pada gagasan baru yang lebih segar merupakan sifat yang mendasar bagi Muhammadiyah selama sekian dasa warsa.[3]

Sebagai gerakan sosial keagamaan yang sadar betul keadaan umat yang sedang tidak beruntung akibat penjajahan, Muhammadiyah menemukan gagasan

---

[2]Asmuni Abdurrahman, *Muhammadiyah Dan Tajdid Di Bidang Keagamaan, Pendidikan, Dan Kemasyarakatan,* dalam tim Pembina Al Islam dan Kemuhammadiyahan, *Muhammadiyah Sejarah, Pemikiran, Dan Amal Usaha* (Jogjakarta: PT. Tiara Wacana Yogya), 118.

[3] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

baru dalam format "Islam yang berkemajuan", bukan Islam yang lumpuh di tangan umat yang lemah yang telah sekian lama menjadi mainan sejarah.

Untuk mencapai tujuan itu, Muhammadiyah mendirikan sekolah-sekolah, pengajian, dan menggalakkan penerbitan dalam berbagai bentuk. Dengan cara ini Muhammadiyah ingin menyembuhkan kelumpuhan umat melalui proses pencerdasan dan pencerahan.

**1. Setting Lokasi PWM Jatim**

Pimpinan Muhammadiyah Jawa Timur merupakan salah satu cabang Pimpinan Pusat Muhammadiyah yang bekerja untuk wilayah atau provinsi. Sesuai dengan wilayah kinerja pimpinannya, PWM Jatim berada di provinsi Jatim, lebih tepatnya berada di daerah Surabaya Selatan. Alamat kantor Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Timur tersebut bertempat di Jl. Kertomenanggal IV/1 Surabaya.

**2. Sejarah Berdirinya Organisasi Muhammadiyah Jawa Timur**

Pertama kali KH Ahmad Dahlan ke Jatim terjadi sekitar 1916, atau 1 tahun setelah H Mas Mansur sepulang dari Mekah dan Mesir menemuinya di Yogyakarta (1915). Selain berprofesi sebagai Khatib di Kraton Yogyakarta, Dahlan juga seorang pedagang dan Penasehat Central Sarikat Islam (CSI). Perjalanannya ke daerah luar Yogyakarta tampaknya sangat terkait dengan ketiga

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

profesi itu, sehingga usahanya menyebarkan pembaharuan agama Islam tersamar dalam aktivitasnya sebagai pedagang dan penasehat CSI.

Pada awal pendirian Muhammadiyah di Jawa Timur, mulanya K.H. Ahmad Dahlan melakukan perjalanan ke Jawa Timur untuk melakukan perdagangan batik. Kehadiran beliau di Surabaya, Banyuwangi, dan Malang selain untuk berdagang batik juga melakukan pengajian. Adapun Tabliqh yang disampaikan oleh K.H. Ahmad Dahlan adalah mengenai paham pembaharuan tentang Islam. Sehingga menarik perhatian seorang pelajar bernama H. Mas Mansur. Beliau inilah yang nantinya menjadi pelopor pendirian Muhammadiyah di Jawa Timur.[4]

Saksi kedatangan KH Dahlan ke Surabaya ini dua di antaranya adalah tokoh pergerakan nasional Soekarno dan Roeslan Abdulgani. Keduanya tidak hanya menyaksikan, tetapi juga mengikuti pengajiannya di langgar Peneleh, Plampitan, serta di langgar dekat rumah KH Mas Mansur (Kawasan Ampel). KH Ahmad Dahlan datang ke Surabaya dan memberikan tabligh di tiga tempat, yaitu di Kampung Peneleh, Plampitan, dan Ampel.

KH Mas Mansur menerima ajakan KH Ahmad Dahlan untuk mendirikan Muhammadiyah di Surabaya 4 tahun kemudian, atau 1920, yang secara resmi dideklarasikan pada 1 November 1921. Muhammadiyah Surabaya ditetapkan oleh Surat Ketetapan HB Muhammadiyah No 4/1921. Muhammadiyah Surabaya

[4]Tim Penulis, *Menembus Benteng Tradisi*, 47.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

langsung berstatus Cabang yang diketuai oleh KH Mas Mansur, dibantu oleh H Ali, H Azhari Rawi, H Ali Ismail dan Kiai Usman.

Di awal pekembangan Muhammadiyah Jatim, struktur kepemimpinan dan pembagian daerah masih sangat sederhana. Hierarkinya pendek, dan lebih mengedepankan dinamika organisasi, amal usaha, kemudahan komunikasi, dan koordinasi. Awalnya hanya terdiri dari ranting dan cabang. Ranting adalah level yang paling bawah dan menjadi wadah bagi anggota. Di atasnya terdapat cabang yang langsung berhubungan dengan Pengurus Besar di Yogyakarta *(Hoofdestuur)*.

Pada 1930-an barulah dirasakan perlunya pengelolaan dan koordinasi yang lebih baik di cabang-cabang maupun di ranting-ranting. Berdasarkan keputusan Kongres (sekarang Muktamar) ke-19 di Minangkabau pada 1930, Pengurus Besar (kini Pengurus Pusat) Muhammadiyah mengangkat perwakilan di daerah-daerah dengan sebutan Konsul Pengurus Besar Muhammadiyah *(Consul Hoofdestuur)*, atau yang biasa disebut Konsul Daerah. Awalnya Jatim dibagi menjadi 5 daerah, yaitu Surabaya, Madiun, Madura, Besuki, dan Pasuruan, dan baru pada 1937 Daerah Kediri didirikan.[5]

Dalam konferensi 27-28 Oktober 1951, 6 Perwakilan Pengurus Besar Muhammadiyah Daerah (Majelis-majelis Daerah) itu mengusulkan kepada PB untuk membentuk Perwakilan Pengurus Besar di tingkat Provinsi. Usulan ini kemudian diterima oleh PB dalam sidangnya pada 22 Desember 1951. Melalui

[5] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Surat Ketetapan PB Nomor 180 D tertanggal 1 Jumadil Akhir 1371/27 Februari 1952, Perwakilan PB Wilayah Jatim dibentuk dan dipimpin H Abdul Hadi (Ketua), dibantu Nurhasan Zain, M Saleh Ibrahim, Rajab Gani, dan dr Soewandhi.[6]

Pada 1959, struktur organisasi dalam Muhammadiyah mengalami perubahan dengan dibentuknya Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) dan Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM). Melalui Surat Pengesahan Nomor XXI/B tertanggal 13 Juli 1960, ditetapkan PWM Jatim 1959-1962 dengan komposisi M Saleh Ibrahim (Ketua), dengan anggota Nurhasan Zain, Soedirman, M Turchan Badri dan H Abdul Hadi. Kepemimpinan ini berlangsung hingga periode selanjutnya, 1962-1965.[7]

Pada periode 1965-1968, PWM Jatim dijabat oleh Usman Muttaqin sebagai ketua, didampingi oleh dua wakilnya KH Bejo Dermaleksana dan HM Anwar Zaini. Kepemimpinan ini dilanjutkan KHM Anwar Zaini sejak 1968, dan terpilih kembali dalam Musywil yang dilaksanakan pada 26-27 Dzulqa'dah 1399/28-29 Oktober 1978 untuk periode 1978-1981. Selain Ketua, KHM Anwar Zaini didampingi 3 Wakil Ketua (HM Amien Barowi, dr Moh Suherman, dr Mutadi), 3 Sekretaris (Nurhasan Zain, Marchum Anwar BBA, dan M Amin Hamdan), serta 3 Bendahara (Sismono, Drs Noto Adam dan M Fuad Faqih).[8]

---

[6] Tim Penulis, *Menembus Benteng Tradisi*, 35.
[7] Ibid.
[8] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kepemimpinan KHM Anwar Zain berlangsung cukup lama, karena pelaksanaan Musywil harus menunggu Muktamar Muhammadiyah ke-41 di Surakarta yang mengalami penundaan akibat tarik ulur mengenai pemberlakuan Undang-undang (UU) 8/1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan yang mengharuskan setiap organisasi mencantumkan Pancasila sebagai asas. Saat Musywil dilaksanakan pada 8 Februari 1986, KHM Anwar kembali terpilih sebagai Ketua PWM. Kali ini KHM Anwar didampingi 3 Penasehat (M Wisatmo, H Mas'ud Atmodiwiryo, dan Nurhasan Zain), 4 Wakil Ketua (H Abdurrahim Nur Lc, dr H Mutadi, HM Amin Barowi, dan Drs H Amir Hamzah Wiryosukarto), 1 Sekretaris (M Mustaqim Fadhil), 1 Wakil Sekretaris (Abd Madjid Hamzah), 1 Bendahara (Drs Noto Adam), dan 2 Wakil Bendahara (H Supardi dan M Fuad Faqih).[9]

Namun KHM Anwar Zain tidak dapat menyelesaikan masa kepemimpinannya karena meninggal dunia pada Desember 1989. Untuk mengisi kekosongan jabatan Ketua PWM, dalam Musywil tahunan di Kediri 1990, diajukan 3 calon kepada PP Muhammadiyah, yaitu H Abdurrahim Nur Lc, dr H Mutadi, HM Amin Barowi, yang kemudian H Abdurrahim Nur Lc ditetapkan sebagai Ketua PWM. Dia kembali terpilih dalam Musywil 1990 di Asrama Haji Surabaya masa jabatan 1990-1995. Komposisi PWM periode ini: KH Abdurrahim Nur Lc (Ketua), Drs H Isro Kusnoto, Drs HM Hasyim Manan MA (Wakil Ketua), Drs M Wahyudi (Sekretaris), Drs H Nurcholis Huda (Wakil

[9] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sekretaris), HM Amin Barowi (Bendahara), dan Drs H Kuslan MA (Wakil Bendahara).

KH Abdurrahim Nur Lc kembali terpilih dalam Musywil 1995 di Malang. Komposisi PWM adalah: KH Abdurrahim Nur Lc (Ketua), Drs H Munawar Thohir, Dr H Fasich Apt (Wakil Ketua), Drs H Nurcholis Huda, Drs HM Wahyudi Indrajaya (Sekretaris), Ir H Sulaiman, H Admiral Manan (Bendahara), Drs H Kuslan MA (Koor Bidang Tarjih dan Tabligh), dr H Mutadi (Koor Bidang Sosial Ekonomi Kesehatan), Drs H Ahmad Adjib (Koor Bidang Pendidikan dan Kebudayaan), Drs H Muhadjir Sulthon (Koor Bidang Organisasi dan Kelembagaan), Drs H Isro' Kusnoto (Koor Bidang Kader dan SDM), serta KH Mu'ammal Hamidy Lc (Koor Bidang Ekstern).

Kepemimpinan KH Abdurrahim Nur Lc digantikan oleh Prof Dr H Fasich Apt melalui Musywil pada 28-29 Oktober 2000 di Magetan. Komposisi PWM 2000-2005 adalah sebagai berikut: KH Abdurrahim Nur Lc (Penasehat), Prof Dr H Fasich Apt (Ketua), Prof Dr Syafiq A Mughni MA, KH Mu'ammal Hamidy Lc, Drs H Muhadjir Effendy (Wakil Ketua), Drs H Nur Cholis Huda MSi (Sekretaris), Nadjib Hamid Ssos (Wakil Sekretaris), Drs H Abd Rahman Azis (Bendahara), Drs Achmad Achsin MM (Wakil Bendahara), Dr Achmad Jainuri MA (Pembina Bidang Pendidikan dan Litbang), Dr H Thohir Luth MA (Pembina Bidang Politik, HAM, dan Hubungan Ekstern), Ir H R Sulaiman (Pembina Bidang Ekonomi dan Pemberdayaan Masyarakat), dr H Syamsul Islam SpMkMKes (Pembina Bidang Kesehatan dan Kesejahteraan Masyarakat), H

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Admiral Manan (Pembina Bidang Kaderisasi dan Organisasi), dan Prof Dr H Imam Muchlas (Pembina Bidang Tarjih dan Tabligh).

Kepemimpinan PWM mengalami pergantian lagi melalui Musywil XIII di Madiun, 8-9 Dzulqa'dah 1426 H/ 10-11 Desember 2005. Susunan PWM 2005-2010 yang saat ini adalah sebagai berikut: Prof Dr H Fasich Apt (Penasehat), Prof Dr H Syafiq A Mughni MA (Ketua), Drs H Noer Cholis Huda MSi, KH Mu'ammal Hamidy Lc, Dr H Muhadjir Effendy MAP (Wakil Ketua), H Nadjib Hamid MSi (Sekretaris), Ir H Tamhid Masyhudi (Wakil Sekretaris), Ir H Imam Sugiri (Bendahara), Drs M Nidzhom Hidayatullah (Wakil Bendahara), Prof Dr H Achmad Jainuri MA (Koor Bidang Pendidikan dan Kebudayaan), Prof Dr H Thohir Luth MA (Koor Bidang Kesejahteraan dan Pemberdayaan Masyarakat), Prof Dr H Zainuddin Maliki MSi (Koor Bidang Publik dan Kehartabendaan), Dr H Saad Ibrahim MA (Koor Bidang Tarjih dan Tabligh), serta Drs HM Sulthon Amien MM (Koor Bidang Usaha dan Keuangan).

### 3. Visi, Misi, dan Prinsip Kebijakan Muhammadiyah Jawa Timur

a. VISI:[10] Terwujudnya masyarakat Islam yang sebenar-benarnya

b. MISI:[11]

1) Menegakkan tauhid yang murni berdasarkan al Quran dan as-Sunnah.

---

[10] Tim PWM Jatim, *Memacu Semangat Dakwah Menuju Peradaban Utama*, (Surabaya: Hikmah Press, 2010), 83.

[11] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2) Menyebarluaskan dan memajukan ajaran Islam yang bersumber pada Al Quran dan Sunnah yang shahihah/maqbulah.

3) Mewujudkan islam dalam kehidupan pribadi, keluarga dan masyarakat.

c. Prinsip kebijakan Organisasi[12]

Musyawarah merupakan salah satu institusi penting di lingkungan umat Islam, juga di Muhammadiyah. Namun, institusi ini dibiarkan berjalan sendiri tanpa upaya mengembangkannya agar menjadi *pushing power* bagi berjalannya organisasi. Dengan demikian, musyawarah dalam Muhammadiyah justru sering merupakan titik peka untuk konflik.

Dengan demikian, Muhammadyah merumuskan konsep musyawarah dengan mengacu pada nilai-nilai Islam, serta mempelajari tradisi yang berkembang di kalangan umat Islam.

## 4. Matan Keyakinan dan Cita-Cita Hidup Muhammadiyah

Adapun matan dan cita-cita Muhammadiyah yakni:[13]

a. Muhammadiyah adalah Gerakan Islam dan Dakwah Amar Ma'ruf Nahi Munkar, beraqidah Islam dan bersumber pada Al-Qur'an dan Sunnah, bercita-cita dan bekerja untuk terwujudnya masyarakat utama, adil,

---

[12]Tim Penulis, *Muhammadiyah: Sejarah, Pemikiran, Dan Amal Usaha* (Yogyakarta: PT. Tiara Wacana Yogya dan Universitas Muhammadiyah Malang Press, 1990), 136.

[13] (Keputusan Tanwir Tahun 1969 di Ponorogo).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

makmur yang diridhai Allah SWT, untuk malaksanakan fungsi dan misi manusia sebagai hamba dan khalifah Allah di muka bumi.

b. Muhammdiyah berkeyakinan bahwa Islam adalah Agama Allah yang diwahyukan kepada Rasul-Nya, sejak Nabi Adam, Nuh, Ibrahim, Musa, Isa dan seterusnya sampai kepada Nabi penutup Muhammad SAW, sebagai hidayah dan rahmat Allah kepada umat manusia sepanjang masa, dan menjamin kesejahteraan hidup materil dan spritual, duniawi dan ukhrawi.

c. Muhammadiyah dalam mengamalkan Islam berdasarkan:

   1) Al-Qur'an: Kitab Allah yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW;

   2) Sunnah Rasul: Penjelasan dan palaksanaan ajaran-ajaran Al-Qur'an yang diberikan oleh Nabi Muhammad SAW dengan menggunakan akal fikiran sesuai dengan jiwa ajaran Islam.

d. Muhammadiyah bekerja untuk terlaksananya ajaran-ajaran Islam yang meliputi bidang-bidang:

   1) 'Aqidah, Muhammadiyah bekerja untuk tegaknya aqidah Islam yang murni, bersih dari gejala-gejala kemusyrikan, bid'ah dan khufarat, tanpa mengabaikan prinsip toleransi menurut ajaran Islam.

   2) Akhlak, Muhammadiyah bekerja untuk tegaknya nilai-nilai akhlak mulia dengan berpedoman kepada ajaran-ajaran Al-Qur'an dan Sunnah rasul, tidak bersendi kepada nilai-nilai ciptaan manusia

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3) Ibadah, Muhammadiyah bekerja untuk tegaknya ibadah yang dituntunkan oleh Rasulullah SAW, tanpa tambahan dan perubahan dari manusia.

4) Muamalah Duniawiyah, Muhammadiyah bekerja untuk terlaksananya mu'amalat duniawiyah (pengolahan dunia dan pembinaan masyarakat) dengan berdasarkan ajaran Agama serta menjadi semua kegiatan dalam bidang ini sebagai ibadah kepada Allah SWT.

e. Muhammadiyah mengajak segenap lapisan bangsa Indonesia yang telah mendapat karunia Allah berupa tanah air yang mempunyai sumber-sumber kekayaan, kemerdekaan bangsa dan Negara Republik Indonesia yang berdasar pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, untuk berusaha bersama-sama menjadikan suatu negara yang adil dan makmur dan diridhoi Allah SWT: "BALDATUN THAYYIBATUB WA ROBBUN GHOFUR"

**5. Kepribadian Muhammadiyah**

Muhammadiyah adalah persyarikatan yang merupakan Gerakan Islam. Maksud gerakanya ialah Dakwah Islam dan Amar Ma'ruf nahi Munkar yang ditujukan kepada dua bidang: perseorangan dan masyarakat . Dakwah dan Amar Ma'ruf nahi Munkar pada bidang pertama terbagi kepada dua golongan: Kepada yang telah Islam bersifat pembaharuan (tajdid), yaitu mengembalikan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kepada ajaran Islam yang asli dan murni; dan yang kedua kepada yang belum Islam, bersifat seruan dan ajakan untuk memeluk agama Islam.

Adapun da'wah Islam dan Amar Ma'ruf nahi Munkar bidang kedua, ialah kepada masyarakat, bersifat kebaikan dan bimbingan serta peringatan. Kesemuanya itu dilaksanakan dengan dasar taqwa dan mengharap keridlaan Allah semata-mata.

Dengan melaksanakan dakwah Islam dan amar ma'ruf nahi munkar dengan caranya masing-masing yang sesuai, Muhammadiyah menggerakkan masyarakat menuju tujuannya, ialah "Terwujudnya masyarakat Islam yang sebenar-benarnya".

**6. Struktur Organisasi Muhammadiyah Jawa Timur**

Struktur organisasi adalah wadah bagi sekelompok orang yang bekerjasama antara sesama anggota untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan bersama. Struktur organisasi menyediakan personil yang memegang jabatan tertentu dimana masing-masing diberikan tugas, tanggung jawab, wewenang sesuai dengan jabatannya.

Seluruh kinerja organisasi dilaksanakan secara professional. *Pertama*, ialah cirri kerja yang memanfaatkan (didasarkan atas penerapan) ilmu dan tekhnologi. *Kedua,* cirri kerja yang dilakukan orang yang memang mampu untuk melaksanakan kerja tersebut (kesesuaian antara potensi dan fungsi *the right man in the right place*). *Ketiga*, cirri kerja yang slalu memperhatikan dan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengupayakan optimasi hasil kerja. *Keempat,* pertimbangan rasionalitas yang tinggi, termasuk di dalamnya pemanfaatan *management.*[14]

Adapun Struktur organisasi Pimpinan Muhammadiyah Jawa Timur terdiri dari:

a. Penasihat
b. Ketua
c. Wakil ketua
d. Sekretaris
e. Wakil sekretaris
f. Bendahara
g. Wakil bendahara
h. koordinator bidang:
    1) pendidikan dan kebudayaan
    2) kesejahteraan dan pemberdayaan masyarakat
    3) kebijakan publik dan kehartabendaan
    4) tajdid dan tabligh
    5) pengembangan usaha keuangan
i. Majelis-majelis
    1) Majelis tarjih dan tajdid
    2) Majelis Tabligh Dan Dakwah Khusus Muhammadiyah

[14] Tim Penulis Al Islam Dan Kemuhammadiyahan UMM, *Muhammadiyah Sejarah, Pemikiran, Dan Amal Usaha* (malang: PT. tiara wacana Yogyakarta dan UMM press, 1998), 142.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3) Majelis pendidikan kader
4) Majelis pendidikan dasar dan menengah
5) Majelis kesehatan dan kesejahteraan masyarakat
6) Majelis pemberdayaan masyarakat dan lingkungan hidup
7) Majelis wakaf, zakat, infaq dan shodaqoh
8) Majelis ekonomi dan kewirausahaan.

j. Lemabaga-lembaga:

1) Lembaga pembinaan dan pengawasan keuangan
2) Lembaga hikmah dan kebijakan publik
3) Lembaga penegakan hukum dan HAM
4) Lembaga pustaka dan informasi
5) Lembaga seni dan budaya

## B. Gagasan Perempuan Dan Politik Dalam Persepektif Elit Muhammadiyah Jawa Timur

Dalam melakukan penelitian di seputar bulan Januari-Maret 2011, penulis melakukan penelitian di kantor Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Timur yang bertempat di Jl. Kertomenanggal IV/1 Surabaya. Peneliti mewawancarai tiga orang aktivis perempuan Muhammadiyah yang aktif di PWM Jatim dan PWA Jatim. Narasumber tersebut yakni **NL, DL** dan **ES**.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sebelum mengeksplanasikan hasil wawancara, peneliti memaparkan profil Aisyiyah sebagai organisasi aktifis perempuan Muhammadiyah. Dan narasumber wawancara dalam penelitian ini adalah perempuan Muhammadiyah yang juga aktifis Aisyiyah.

Organisasi Aisyiyah adalah Salah satu organisasi otonom Muhammadiyah yang pengurusnya para perempuan Muhammadiyah. Setiap anggota Aisyiyah memilki hak dalam pemilihan ketua dan struktur Muhammadiyah. Anggota Aisyiyah dapat ikut serta dalam prosesi ini, yakni diberikan hak memilih dan dipilih.

Aisyiyah dari segi nama merujuk pada nama salah satu istri Nabi Muhammad yakni Aisyah, yang disambungkan dengan ya' nisbah yang berarti pengikut Aisyah. Dalam sejarah Aisyiah adalah seoraang perempuan yang cerdas, lincah, memiliki daya ingat yang kuat, sangat dalam pengertahuan agamanya dan tekun dalam beribadah. Tampaknya penamaan gerakan perempuan dalam Muhammadiyah dengan 'Aisyiyah adalah dalam rangka menjadikan 'Aisyiyah sebagai sumber inspirasi dan teladan kaum perempuan Muhammadiyah dalam melaksanakan dakwah Islam *amal makruf nahi munkar* di tengah-tengah masyarakat.[15]

Gerakan Aisyiyah memfokuskan pada pemberdayaan masyarakat, yakni mendirikan lembaga pendidikan modern, pelayanan kesehatan, dan amal usaha lain untuk kesejahteraan masyarakat. Berkaitan dengan perempuan, bisa

[15] Tim penulis, *Menembus Benteng Tradisi* (Surabaya: Hikmah Press, 2005), 283.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dikatakan bahwa Aisyiyah telah berjasa menjadikan mereka tampil sebagai bagian dari anggota masyarakat yang memiliki hak setara dengan kaum laki-laki.[16] Lembaga pendidikan yang dibangun oleh Muhammadiyah, yang berjumlah demikian besar menjadi sarana sarana efektif bagi kemajuan kaum perempuan. Sebagaimana mitranya kaum laki-laki, kaum perempuan dari dari kalangan Muhammadiyah merupakan barisan pertama muslim Indonesia yang bisa mengenyam pendidikan bahkan sampai ke jenjang perguruan tinggi. Dengan demikian perhatian Aisyiyah dan Muhammadiayah pada umumnya terhadap upaya dan kemajuan dan pemberdayaan perempuan pada dasarnya telah berlangsung lama. Sejalan dengan perkembangan lembaga tersebut.

Berdasarkan dengan gerakan sosial keagamaan di atas, Aisyiyah juga memberikan perhatian besar pada pembinaan moral keagamaan bagi kaum perempuan. Dalam hal ini Aisyiyah berusaha mengedepankan rumusan "ideologi kewanitaan" yang menjadi dasar bagi keterlibatannya dalam sejumlah upaya pemberdayaan perempuan, yang dirumuskan sejalan dengan perkembangan sosial-politik dan keagamaan di Indonesia. Dalam konteks ini Kuntowijiyo mencatat empat tahapan perkembangan ideologi keperempuanan Aisyiyah:[17]

a. Penegasan kedudukan wanita di tengah dunia laki-laki
b. Penegasan ruang gerak dan hak-hak wanita

---

[16]Jajat Burhanudin dan Oman Faturahman, *Tentang Perempuan Islam Wacana dan Gerakan* (Jakarta: PT. Tomasu, 2004), 104.

[17] Kuntowijoyo, *Arah Pengembangan Organisasi Wanita Islam Indonesia: Kemungkinan-Kemungkinannya*, dalam karya Jajat Burhanudin dan Oman Faturahman, *Tentang Perempuan Islam Wacana dan Gerakan* (Jakarta: PT. Tomasu, 2004), 105.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Penegasan wanita sebagai pembina keluarga

d. Penegasan peran wanita dalam pembangunan.

Dalam pandangan Aisyiyah, perempuan ideal yang digambarkan adalah perempuan yang berhasil membangun rumah tangga yang baik, sebab kehidupan keluarga inilah corak kehidupan masyarakat dan negara bergantung sepenuhnya. Dan pembinaan keluarga ini adalah tugas utama kaum perempuan. Begitupula pandangan diatas berlaku untuk kaum perempuan yang berkarir di luar rumah; bahwa hal itu tidak menjadikan perempuan dari keharusan dan tanggung jawab yang didasarkan pada ajaran Islam, untuk membina keluarga.

Muhammadiyah dan Aisyiyah tetunya memang memberi keleluasaan bagi kaum perempuan untuk bekerja di luar rumah. Dalam *Adab fi al-Mar'ah fi al-Islam,* buku terbitan Muhammadiyah hasil muktamar di Pekalongan tahun 1973, Muhammadiyah memberikan kesempatan perempuan untuk menjadi hakim, dan sekaligus mendorong mereka untuk aktif dalam dunia politik. Hanya saja penting dicatat pula buku tersebut juga sebagai pedoman bagi perempuan Muhammadiyah yang aktif di luar sektor domestik, sehingga mereka tidak melampaui batas-batas tertentu dari kewajiban utamanya sebagai ibu rumah tangga.[18]

Dengan demikian, sejalan dengan kecenderungan umum Islam Indonesia saat itu Aisyiyah terlibat demikian intensif dalam pemikiran dan gerakan perempuan yang berorientasi mendukung pembangunan negara. Mereka tampil sebagai mitra yang baik bagi pemerintah, bersama sejumlah program untuk

[18] Pimpinan Pusat Muhammadiyah, *Adab fi al-Mar'ah fi al-Islam* (Yogyakarta, 1989), 132.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pemberdayaan dan akhirnya peningkatan partisipasi kaum perempuan dalam proses pembangunan.

Aisyiyah juga merupakan salah satu organisasi perempuan yang menolak anggapan umum masyarakat bahwa perempuan harus menjadi istri saja dan tidak perlu bersekolah. Sehingga ungakapan menggambarkan kedudukan perempuan yang sudah menikah dinyatakan dengan istilah *suwarga nunut, neraka katut* (ke surga ikut, ke neraka pun terbawa).[19] Dengan demikian ungkapan tersebut dianggap Aisyiyah sebagai ungkapan budaya yang tidak ada hubungannya sama sekali dengan kedudukan perempuan menurut ajaran Islam.[20]

Ajaran Islam meletakkan posisi perempuan, baik sebagai istri atau ibu, sama dengan laki-laki. Hal ini diungkapkan dalam *ain-Nahl* ayat 97:

> "*barang siapa mengerjakan amal shalih (kebaikan), baik laki-laki maupun perempuan, sedang ia dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik, dan kami akan memberi imbalan yang lebih baik dari apa yang mereka kerjakan*"

Dengan demikian Siti Walida (pendiri Aisyiyah) semakin yakin bahwa perempuan perlu ditingkatkan pengetahuannya dan harus memiliki keterampilan untuk dapat berperan sebagai ibu, istri dan anggota masyarakat, serta warga

---

[19] Susanto Gonoprawira R, *Swarga Nunut Neraka Katut*, dalam Riant Nugroho, *Gender Dan Strategi Pengarus Utamaannya Di Indonesia,* 113.

[20] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

negara.[21] Hal inilah yang mendorongnya untuk menciptakan wadah organisasi / kelompok untuk membina perempuan agar maju, menyadari akan hak-hak sebagai manusia, makhluk Allah dalam kedudukannya sebagai istri, ibu, dan warga masyarakat.

Kedudukan perempuan menurut Aisyiyah adalah erat kaitannya dengan peran dan posisi. Posisi adalah situasi atau kedudukan seseorang dalam struktur sosial. Dan jika dikaitkan dengan aspek penilaian, tinggi atau rendah, maka sudah menggambarkan status dari posisi tersebut. Sedangkan peranan adalah aspek dinamis dari suatu posisi tersebut.[22] Jika dikaitkan dengan individu tertentu dalam satu sistem sosial maka telah menggambarkan peranannya yang ada hubungannya dengan peran-peran rumusan yang diberlakukan khusus untuk kategori yang bersangkutan.

Peran perempuan sebagai istri adalah yang berhubungan dengan posisinya dalam keluarga dan perbuatan ini yang diharapkan oleh pasangannya (suami). Demikian pual dengan peran sebagai khalifah di permukaan bumi ini. Islam memberikan hak yang sama antara laki-laki dan perempuan dalam beramal soleh dan berbuat kebajikan di segala segi kehidupan.

Menurut Aisyiyah, sejak awal berdirinya organisasi tersebut berusaha untuk meletakkan perempuan secara berangsur-angsur mendapatkan penghargaan

---

[21] Susanto Gonoprawira R, *Swarga Nunut Neraka Katut,* 7.
[22] Riant Nugroho, *Gender Dan Strategi Pengarus Utamaannya Di Indonesia*, 114.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

secara tepat sesuai ajaran Islam. Menurut Aisyiyah, Islam mendudukkan perempuan sebagai:[23]

1. Hamba Allah, melaksanakan tugas dan perintah Allah sama dengan laki-laki. Dijelaskan pula asal kejadian kejadian perempuan yang berasal dari zat yang sama pula dengan laki-laki yakni sari pati tanah. Seperti yang dijelaskan dalam surat an-Nisa' ayat 1, artinya:

   "*hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Allah yang menjadikan kamu dari jenis yang sama dan menjadikan dari padanya pasangan, kemudian dikembangkan-nya keduannya, laki-laki dan perempuan*"

2. Khalifah Allah, yang diharapkan sama-sama berperan dengan laki-laki mensejahterakan kehidupan dan menciptakan kedamaian dunia. Sebagai khalifah, perempuan juga dibekali dengan bekal yang diberikan Allah pada kaum laki-laki, yakni akal pikiran dan ilmu pengetahuan serta seluruh kandungan alam yang dapat dipergunakan perempuan untuk tugas-tugas yang diembannya. Peran sebagai khalifah diwujudkan dalam bentuk amal sholeh melalui kegiatan yang dilakukannya. Bidang apapun yang dirtekuni merupakan bentuk amal seorang khalifah untuk memakmurkan dan mensejahterakan bumi persada.

Jadi, perempuan menurut Aisyiyah adalah khalifah Allah di muka bumi sama seperti laki-laki. Berdasarkan Abdul Halim Abu Syuqqah, kepadanya

[23] Riant Nugroho, *Gender Dan Strategi Pengarus Utamaannya Di Indonesia*, 117-118.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perempuan dipikulkan beban mulia dalam membangun kesejahteraan umat diantaranya:[24]

a. Diharapkan bebas dari kezaliman dan penganiayaan,
b. Mempunyai hak untuk menuntut ilmu,
c. Hak untuk mendapatkan perlindungan dan melindungi,
d. Berperan dalam kehidupan sosial, antara lain:
   1) Mempermudah urusan hidup / memenuhi kebutuhan hidup dengan tenang.
   2) Membangun kepribadianyang tinggi, kepekaanterhadap bidang kehidupan sosial dan kepedulian yang tinggi.
   3) Berbuat baik amar ma'ruf nahi munkar
e. Menyeru manusia kepada agama Allah dan berjuang di jalan Allah
f. Menjalankan kegiatan profesi
g. Melakukan kegiatan politik,
b. Mempermudah kesempatan menikah
c. Memperoleh hiburan yang baik dan menghadiri perayaan dan perkumpulan yang bermanfaat.

Berdasarkan persamaan kedudukan dan posisi itu pula, Aisyiyah menyetujui ruang gerak dan hak-hak perempuan yang tertuang dalam buku *Adabul Mar'ah Fil Islam.* Dalam buku tersebut menjelaskan secara berurutan mengenai pergaulan perempuan, antara lain:

[24] Riant Nugroho, *Gender Dan Strategi Pengarus Utamaannya Di Indonesia*, 119.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Pergaulan dalam rumah tangga yang lebih menekankan masalah kewajiban istri terhadap suami. Akan tetapi perempuan juga harus mengerti apa yang menjadi hak dan kewajibannya dalam rumah tangga.

b. Pergaulan dalam masyarakat, penekanannya kepada pembinaan persatuan, persaudaraan dan kasih sayang. Di samping itu, sebagai anggota masyarakat para muslim dan muslimat berkewajiban melaksanakan, antara lain:

   1) Harus memikirkan baik dan buruknya masyarakat
   2) Untuk itu setiap anggota harus rela serta ikhlas menyediakan diri baik berupa tenaga maupun pikiran serta harta bendanya, dalam batas-batas yang mungkin dan diizinkan oleh syara'untuk dan demi kepentingan bersama.
   3) Di bidang kepentingan kekeluargaan, harus menyediakan diri sewaktu diperlukan untuk membantu penyelenggaraan-penyelenggaraan upacara di masyarakat.
   4) Di bidang kerohanian, ikut berusaha untuk meramaikan dan memakmurkan masjid, mushola, pesantren, dan tempat pengajian yang lainnya.
   5) Di bidang kesejahteraan masyarakat turut berusaha dan membantu balai pengobatan, panti-panti asuhan anak yatim, dan yang lainnya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

6) Setiap muslim dan muslimah harus senantiasa tunduk kepada aturan yang berlaku. Karena peraturan dan undang-undang itu pada hakikatnya adalah untuk mengatur hidup baik kehidupan suatu masyarakat, bangsa atau negara.
7) Dan lain sebagainya yang sesuai dengan waktu dan masa, yang berguna dan bermanfaat bagi masyarakat.[25]

Berlanjut pada pemaparan hasil wawancara, di kantor PWM Jatim peneliti bertemu dengan salah seorang perempuan Muhammadiyah yang juga aktif dalam Pimpinan Wilayah Aisyiyah Jatim. Perempuan Muhammadiyah yang berinisial **NL** dan **ES** tersebut pernah menjadi salah satu kandidat pimpinan Muswil PWM Jatim 2010 ini juga menduduki jabatan di PW Aisyiyah sebagai sekretaris 2010-2015. Beberapa informan dalam penelitian tersebut memberikan banyak penjelasan mengenai bagaimana gagasan perempuan dan politik, terutama dalam intern organisasi Muhammadiyah Jatim.

Menurut perempuan aktifis Muhammadiyah tersebut, berkaitan dengan pertanyaan penulis bagaimana Muhammadiyah Jatim memaknai peran perempuan dan politik, beliau menjawab bahwa sudah seharusnya perempuan berperan aktif dalam suatu organisasi. Hal ini di karenakan dengan berorganisasi maka perempuan dapat mengaktualisasikan diri, dan melakukan ibadah. Selain itu, perempuan berpolitik juga karena memiliki hak dan kewajiban yang sama dengan laki-laki dalam hal politik.

---

[25] Riant Nugroho, *Gender Dan Strategi Pengarus Utamaannya Di Indonesia*, 124-125.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> Dengan berorganisasi maka perempuan dapat mengaktualisasikan diri mengenai kapabelitas yang mereka miliki. Mereka dapat menyampaikan pendapat, saling bertukar pikiran melalui musyawarah, dan saling bekerjasama dalam melaksanakan suatu program kegiatan yang bermanfaat untuk masyarakat. Oleh sebab itu, tidak menutup kemungkinan dengan terlibat dalam ranah politik perempuan juga akan memiliki kapabelitas diri yang semakin meningkat. Dengan kapabelitas itu pula perempuan akan dapat menyelesaikan permasalahan umat, yang mana hal tersebut juga sebagai jalan ibadah. Partsipasi tersebut tidak lain sebagai cerminan bahwa perempuan memiliki hak politik yang sama dengan laki-laki.

**DL** melanjutkan penjelasannya yakni adapun landasan yang mendukung pentingnya perempuan untuk berorganisasi adalah karena dengan berorganisasi perempuan dapat mengamalkan kapasitasnya dalam organisasi untuk kepentingan umat, sehingga tidak lain hal itu merupakan jalan untuk ibadah. Laki-laki dan perempuan memilki hak yang sama dalam beribadah.

> Alasan utama saya ketika saya aktif berorganisasi adalah sebagai jalan ibadah. Karena dengan berorganisasi saya dapat mengabdi pada masyarakat, dan mengaplikasikan pengetahuan saya.

Menanggapi pertanyaan selanjutnya mengenai bagaimana seharusnya peran perempuan dalam organisasi Muhammadiyah dan hasi muswil PWM Jatim 2010, **NL** menjelaskan bahwa sudah seharusnya perempuan dapat menjadi wakil di strukrur elit pimpinan, karena dengan begitu perempuan dapat menyampaikan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pendapat secara langsung dan menjadi pihak yang berpengaruh dalam organisasi. Lebih lanjut, dijelaskan pula bahwa sebenarnya keterwakilan perempuan di elit pimpinan adalah hal yang urgen untuk mengakomodir secara signifikan kepentingan perempuan Muhammadiyah dan khusunya perempuan yang tergabung dalam Aisyiyah.

Adapun latarbelakang mengapa perempuan setidaknya harus berada pada elit pimpinan karena nantinya perempuan dapat menyampaikan aspirasi atau mewakili perempuan Muhammadiyah melalui kebijakan yang akan ditetapkan dan dijalankan. Karena pada posisi strategis itulah aspirasi anggota perempuan dapat tersampaikan dengan maksimal.

Untuk menegaskan seberapa urgen keterwakilan perempuan di elit pimpinan, **NL** menyebutkan bahwa walaupun selama ini kepentingan perempuan terakomodir, tetapi perempuan sangat perlu berada pada posisi tersebut agar dapat berkiprah mewakili perempuan di tingkat elit pimpinan PWM Jatim. Namun, keterwakilan tersebut bukanlah suatu keharusan, karena perempuan Muhammadiyah masih bisa berorganisasi di Aisyiyah. Selain itu, perempuan juga masih bisa mengajukan atau mengusulkan program pada PWM melalui musyawarah anggota majelis. Dengan kata lain, program intern Aisyiyah ataupun program yang diusulkan oleh Aisyiyah untuk dilaksanakan PWM masih bisa dikomunikasikan dengan pimpinan di PWM. **NL** menjelaskan bahwa hal ini di buktikan dengan program-program amal usaha Aisyiyah yang juga sejalan dan juga didukung oleh pimpinan Muhammadiyah Jatim. Pengusulan tersebut dapat

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

secara formal maupun informal. Jadi, Perempuan walaupun tidak berada pada elit pimpinan tetapi masih dapat berkomunikasi dengan intens pada elit pimpinan di PWM yang mayoritas adalah laki-laki.

> Biasanya ketika kami memiliki inisiatif program kegiatan untuk PWM atau program Aisyiyah sendiri, saya berusaha agar program tersebut disetujui dan dapat dilaksanakan. Yaa, pokoknya bagaimana caranya agar bisa disetujui oleh PWM. Saya biasanya jika tidak melalui forum, saya mengkomunikasikan program tersebut secara kultural dengan bapak-bapak pimpinan di PWM.

Setiap anggota Muhammadiyah baik laki-laki maupun perempuan memilki hak dan kewajiban yang sama dalam organisasi, salah satunya yakni hak untuk memilih dan dipilih dalam struktur pimpinan Muhammadiyah. Namun irinosnya, ketika perempuan diberikan kepercayaan untuk maju sebagai calon pimpinan dalam Musyawarah Wilayah oleh majelis dan pimpinan daerah, perempuan tidak mendapatkan suara yang signifikan. Sehingga perempuan belum dapat menduduki elit pimpinan di majelis dan lembaga PWM Jartim pada periode pimpinan tahun 2010-2015. Bahkan dalam keanggotaan majelis dan lembaga pada periode pimpinan tahun 2005-2010 pun perempuan sangat sedikit sekali.

Perempuan aktifis Muhammadiyah tersebut menjelaskan pengalaman pencalonan dirinya pada Muswil Jatim yang dilaksanakan di kota Jember, bahwa beliau dicalonkan oleh beberapa Pimpinan Daerah dan beberapa anggota majelis PWM Jatim. Saat itu beliau sedang menduduki posisi yang cukup penting dalam

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

PWA Jatim, tetapi beliau merasa siap ketika dicalonkan sebagai pimpinan di PWM Jatim. Hal ini terjadi pula pada tiga perempuan calon pimpinan yang lain.

> Saat itu, kami diusung oleh beberapa Pimpinan Daerah dan juga anggota majelis PWM, tetapi suara yang kami dapat sangat sedikit, sehingga tidak bisa masuk dalam 13 besar pimpinan. Hal itu merupakan hal yang disayangkan. Padahal saat itu saya dan kawan-kawan saya dari PWA Jatim sudah merasa siap ketika nantinya menjadi pimpinan di PWM Jatim, tanpa harus menelantarkan tugas kami di Aisyiyah.

Beliau menegaskan bahwa walaupun tidak menjadi pimpinan di PWM, para perempuan Muhammadiyah masih bisa menjalankan cita-cita Muhammadiyah melalui Aisyiyah karena sebenarnya keduanya memiliki keasamaan cita-cita dan arah tujuan organisasi. Namun, lebih baik lagi jika setidaknya terdapat peran perempuan sebagai pimpinan majelis atau lembaga dalam struktur PWM.

Lebih lanjut, narasumber lain yakni aktivis Aisyiyah yang berinisial **ES** juga menjelaskan bahwa komposisi peran perempuan yang minoritas di PWM tidak lantas menjadikan perempuan sebagai pihak yang dimarginalkan atau tidak diikutkan dalam proses pembuatan kebijakan ataupun pelaksanaan program kegiatan. Hal ini karena benar-benar tidak ada dikotomi antara anggota perempuan ataupun laki-laki. Semua dianggap sama perannya karena setiap anggota yang terpilih dalam struktur pimpinan majelis maupun lembaga adalah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

individu yang memilki kapasitas masing-masing sesuai dengan tugasnya di organisasi.

> Perempuan di PWM sangat minim kuantitasnya. Diantara kami (perempuan) tergabung dalam keanggotaan majelis atau lembaga. Saat periode 2005-2010 saya di tempatkan pada struktur keanggotaan majelis ekonomi PWM, dan kebetulan saat itu saya juga berada pada posisi yang sama di PWA. Dalam menjalankan tugas saya tersebut saya berusaha seoptimal mungkin sejauh yang saya bisa, tanpa membedakan totalitas saya antara di PWM dan PWA.

Untuk menambahkan pandangan mengenai partisipasi perempuan yang notabene sangat minimal di struktur PWM, peneliti mewawancarai narasumber lain yakni **DL** yang juga merupakan aktivis Muhammadiyah dan PW Aisyiyah. Perempuan tersebut menegaskan bahwa walaupun perempuan hanya sebagai anggota majelis atau lembaga saja, bukan berarti perempuan tidak diajak dalam kegiatan organisasi. Tidak ada dikotomi antara anggota laki-laki maupun perempuan. Program-program organisasi diselenggarakan dengan pengurus yang juga terdiri dari anggota laki-laki dan perempuan Muhammadiyah. Bahkan, komunikasi antara anggota laki-laki dan perempuan Muhammadiyah pun berjalan dengan baik. Hal ini di buktikan dengan program-program amal usaha Aisyiyah yang juga sejalan dan juga didukung oleh pimpinan Muhammadiyah Jatim. Komunkasi ini berlangsung ketika diselenggarakan diskusi di anggota majelis. Dengan kata lain, walaupun perempuan tidak berada dalam elit pimpinan sebagai penentu kebijakan tetapi masih dapat berkomunikasi dengan anggota lain (laki-

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

laki) dalam hal pembuatan kebijakan, penyelenggaraan program, dan kerjasama yang lain.

> Dalam Muhammadiyah Jatim ini sebenarnya tidak ada dikotomi antara anggota perempuan dan laki-laki, semua diikutkan dalam pembuatan dan pelaksaan kebijakan maupun program kegiatan organisasi. Pun demikian dengan saya, saya tidak pernah merasa dibedakan dalam musyawarah. Malah saya sering tidak merasa saya perempuan ketika berada di forum PWM, karena memang tidak ada pembedaan antara anggota laki-laki atau perempuan. Terlebih lagi saya sebagai sekretaris Aisyiyah juga sering mengkomunikasikan mengenai program kerja Aisyiyah yang telah direncanakan pada PWM agar dapat terlaksana dengan mudah. Baik komunikasi secara formal maupun informal.

Terkait dengan pertanyaan wawancara berikutnya mengenai beberapa hambatan perempuan untuk maju ke elit pimpinan di PWM, narasumber **NL**, Perempuan yang selain memiliki aktifitas sebagai aktivis Muhammadiyah, juga sebagai direktur CV. Firdaus dan dosen Universitas Muhammadiyah Ponorogo ini menjelaskan bahwa hambatan tersebut berasal dari intern dan ekstern individu perempuan Muhammadiyah itu sendiri.

Menurut **NL**, hambatan yang berasal dari eksntern diri perempuan Muhammadiyah yakni kultur dari anggota Muhammadiyah sendiri. Anggapan tersebut yakni perempuan masih tabu duduk dalam elit pimpinan, lain halnya jika hanya sebatas sebagai anggota. Selain itu, ketika dalam suatu komunitas terdapat anggota laki-laki dan perempuan maka yang layak jadi pemimpin adalah laki-laki. Selain itu, kepercayaan untuk dapat menjadi pemimpin juga dihalangi oleh

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ketidakpercayaan anggota lain terhadap kapabelitas perempuan saat nanti menjadi pemimpin.

> Sebenarnya tidak ada hambatan yang sungguh berarti ketika perempuan akan maju sebagai pemimpin di PWM. Namun, yang agak disayangkan yakni masih adanya kultur dan minset patriarkhi di PWM. Terutama yakni pada beberapa pimpinan yang ada di PWM. Ini masih bicara di PWM, belum lagi di tingkat Pimpinan Daerah dan Ranting, kultur patriarki tentunya masih sangat kental, perempuan di sana lebih sulit menduduki elit pimpinan.

Mengenai etika tentang pergaulan antara anggota laki-laki dan perempuan dalam organisasi juga sempat disinggung oleh **NL**. Terkadang terdapat perasaan segan ketika pengurus laki-laki dan perempuan keluar bersama untuk menjalankan tugas organisasi. Hal itu tidak terlepas dari perasaan was-was jika nantinya akan menimbulkan fitnah. Dengan demikian, hal tersebut berdampak pada penentuan elit pimpinan di PWM sehingga pimpinan mayoritas adalah laki-laki.

Menurut **NL**, belum percayanya beberapa pemilih pada kapabelitas perempuan serta pertimbangan etika pergaulan antara laki-laki dan perempuan juga merupakan faktor yang menyebabkan perempuan calon pimpinan pada Musywil 2010 di Jember memperoleh suara yang sedikit.

Lebih lanjut, **NL**, Narasumber yang saat ini berusia 46 tahun tetapi sudah cukup lama berkecimpung di dunia organisasi Muhammadiyah ini melanjutkan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengenai hambatan intern perempuan ketika akan aktif di organisasi atau menjadi pemimpin. Salah satu hambatan tersebut adalah faktor intern rumah tangga, yang mana seorang istri masih sulit untuk mendapatkan ijin dari suami untuk aktif di masyarakat. Terlebih ketika perempuan dihadapkan pada masalah pengasuhan anak yang nantinya juga akan tidak maksimal ketika harus terjun di masyarakat. Hal ini tentunya menjadi alasan tersendiri bagi aktifis perempuan Muhammadiyah dalam berkeputusan memilih atau tidak untuk mengemban jabatan pemimpin yang pastinya akan lebih sering berada di ranah publik.

> Kalau saya kebetulan cukup mudah mendapatkan ijin dari suami untuk aktif berorganisasi, karena suami saya juga seorang aktifis Muhammadiyah. Dan sebagai seorang ibu, tentu saya lebih mengutamakan pengasuhan pada ketiga anak saya. Jadi meskipun saya sibuk berorganisasi, saya tidak menyianyiakan pengasuhan pada anak-anak saya, terlebih ketika mereka berada pada usia emas perkembangan otaknya. Bahkan seringkali dulu saya membawa anak balita saya menghadiri rapat Organisasi di luar kota. Sekarang anak saya sudah besar, jadi saya tidak terlalu khawatir ketika saya harus menjalankan tugas saya di Masyarakat.

Mengenai upaya peningkatan partisipasi perempuan di PWM, ditanggapi oleh narasumber dengan memberikan beberapa solusi untuk meningkatkan kepercayaan anggota PWM terhadap kapasitas perempuan. Diantaranya yakni perempuan yang notabene sangat minimal di majelis atau lembaga sebaiknya memberikan kontribusi yang maksimal di organisasi. Usaha tersebut dapat dengan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menguslkan program kerja yang berkualitas, serta ikut dalam proses pelaksanaannya. Komitmen dan loyalitas yang tinggi juga sangat diperlukan. Sehingga akan tampak bahwa perempuan Muhammadiyah yang minoritas tersebut pantas diberikan kepercayaan yang penuh dalam menjalankan tugas organisasi. Dan harapan yang lebih jauh lagi yakni nantinya perempuan dapat dipertimbangkan dalam pemilihan elit pimpinan. Hal itu tidak lain karena kapasitas yang dimilki anggota perempuan. Kesempatan ini didukung pula oleh teks AD ART Muhammadiyah yang memeberikan kesempatan partisipasi yang sama antara perempuan dan laki-laki.

## C. Implementasi Gagasan Perempuan Dan Politik Dalam Struktur Organisasi Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Timur

Membahas lebih jauh mengenai persoalan kebijakan organisasi Muhammadiyah, peneliti mewawancarai seorang elit pimpinan organisasi yakni **TM** yang mana beliau adalah wakil sekretaris PWM Jatim 2005-2010. Laki-laki aktifis Muhammadiyah ini mengerti banyak tetang AD ART organisasi, serta kebijakan dalam PWM Jatim. Narasumber berikutnya yakni **KL**, aktivis laki-laki Muhammadiyah yang juga sebagai asisten TM di kesekretariatan PWM Jatim.

Dalam wawancara tersebut **TM** menjelaskan mengenai kebijakan Rekruitmen Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Timur. Dalam kebijakan penentuan struktur maupun tata tertib pemilihan anggota Pimpinan Wilayah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Muhammadiyah Jawa Timur tidak terdapat dikotomi antara anggota laki-laki maupun perempuan.[26]

---

[26] Mengutip tata cara pemilihan anggota Pimpinan Wilayah Muhammadiyah jawa timur 2010-2011 yakni:

BAB II CALON

(Pasal 2)

Setiap anggota Muhammadiyah yang memenuhi syarat dapat dicalonkan menjadi anggota Pimpinan Wilayah periode 2010-2015.

(Pasal 3)

Syarat untuk dapat dicalonkansebagai anggota pemimpinan wilayah ialah :

1) Taat beribadah dan mengamalkan ajaran Islam
2) Setia pada prinsip-prinsip dasar perjuangan Muhammadiyah
3) Dapat menjadi teladan dalam persyarikatan
4) Taat pada garis kebijakan pimpinan pusat
5) Memiliki kecakapan dan kemampuan menjalankan tugasnya
6) Telah menjadi anggota persyarikatan sekurang-kurangnya selama enam tahun
7) Berpengalaman dalam kepemimpinan di lingkungan persyarikatan:

a) Pernah aktif menjadi anggota pimpinan wilayah sekurang-kurangnya satu periode, atau
b) Pernah aktif dan menjadi anggota unsure pembantu pimpinan atau pimpinan ortomtingkat wilayah sekuang-kuranganya dua periode, atau
c) Pernah dan aktif menjadi anggota pimpinan daerah sekurang-kurangnya satu periode

8) Tidak merangkap jabatan dalam pimpinan organisasi politik atau organisasi lain yang amal usahanya sama dengan persyarikatan di semua tingkat
9) Bersedia tidak merangkap jabatan dalam persyarikatan dan pimpinan dalam amal usahanya, baik vertical maupun horizontal
10) Penyimpangan dari ketentuan ayat (8) dan (9) pasal ini hanya dapat dilakukan atas keputusan pimpinan pusat

(Pasal 4)

1) Setiap anggota yang dicalonkan, setelah mendapat pemberitahuan dari panitia Pemilihan tentang pencalonan dirinya, berhak menerima atau menolak pencalonan tersebut dan berkewajiban menyampaikan keputusannya kepada Panitia Pemilihan selambat-lambatnya spuluh hari sebelum dilangsungkan Musywil,
2) Pengembalian pernyataan kesediaan menjadi calon apabila melebihi ketentuan tersebut diatas dinyatakan tidak berlaku

BAB III PENCALONAN

(Pasal 5)

1) Pencalon yang berhak mengajukan calon anggota pimpinan wilayah periode 2010-2015 adalah:

a) Anggota pimpinan wilayah
b) Pimpinan daerah se jawa timur
c) Pimpinan ortom tingkat wilayah

2) Pencalon mengajukan calon sebanyak tiga belas orang dengan mengisi blanko pencalonan yang disediakan oleh panitia pemilihan dan menyerahkan blanko pencalonan kepada panitia pemilihan setelah diisi seperlunya, sesuai jadwal waktu yang telah disepakati oleh panitia pemilihan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam struktur Muhammadiyah terdapat beberapa Majelis dan lembaga. Anggota dalam majelis dan lembaga tersebut juga terdiri dari laki-laki dan perempuan, walaupun pemimpinnya laki-laki.

**TM** melanjutkan penjelasannya mengenai realita sedikitnya perempuan yang berada pada struktur Muhammadiyah adalah karena perempuan sudah memiliki ranah tersendiri untuk berkembang dan beramal usaha. Sehingga perempuan hanya fokus di Aisyiyah agar lebih fokus pula mengembangkan dan menjalankan program kerja di Aisyiah.[27] Dan dalam pelaksanaan program kerjanya pun Aisyiyah juga mendapat bantuan moril maupun materil dari Muhammadiyah.

> Sebenarnya tidak ada pembedaan antara anggota laki-laki dan perempuan. Adapun perempuan kuantitasnya lebih sedikit dibandingkan laki-laki karena perempuan sudah sibuk di organisasi Aisyiyah. Aisyiyah juga memiliki cita-cita gerakan yang sama dengan Muhammadiyah karena Aisyiyah adalah organisasi otonom Muhammadiyah.

**TM** kemudian menegaskan pula walaupun perempuan tidak banyak berada pada pimpinan, bukan berarti pimpinan tidak mengakui kapasitas perempuan Muhammadiyah. Sebaliknya, PWM sangat mengapresiasi prestasi perempuan Muhammadiyah yang tergabung dalam Aisyiyah, karena melalui organisasi tersebut perempuan dapat memajukan amal usaha organisasinya. PWM juga sangat mendukung semua program kerja yang ada di Aisyiyah.

---

[27] Wawancara 25 Februari 2011.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> Perempuan Muhammadiyah (di Aisyiyah) memiliki kapabelitas yang baik dalam hal organisasi. Hal itu terbukti dengan majunya amal usaha Aisyiyah yang terdiri dari playgrup, TK, hingga SD. Dalam hal perkoprasian misalnya, Aisyiyah memilki banyak koprasi di jawa timur. Belum lagi dalam hal kesehatan, Aisyiyah memiliki beberapa Rumah Sakit. Kesemua amal usaha itu tidak hanya berada di Kota saja, melainkan juga hingga ke pelosok desa.

Lebih lanjut mengenai kebijakan rekruitmen anggota kepemimpinan PWM, **TM** mengatakan bahwa PP dan PWM berbeda. Perbedaan tersebut yakni PP Muhammadiyah menentukan kuota antara laki-laki dan perempuan di Struktur elit Pimpinan Pusat, sedangkan PWM Jatim tidak menggunakan kebijakan tersebut. Hal ini dilatarbelakangi oleh jumlah perempuan yang mayoritas berada di PWA Jatim. Sehingga akan takut memberatkan perempuan ketika perempuan mengemban tugas ganda.

> Di PWM sendiri tidak memberlakukan kebijakan seperti di PP Muhammadiyah yang menetukan kuota perempuan di struktur pimpinan. Alasannya karena PWM cakupan kepemimpinannya tidak seluas PP, dan anggota pengurus PWM tidak sebanyak PP.

Dari narasumber lain, yakni aktivis laki-laki Muhammadiyah yang berinisial **KL**, peneliti juga mendapatkan informasi mengenai komposisi kepemimpinan dan partisipasi perempuan di PWM. Berbeda dengan narasumber sebelumnya yang menganggap perempuan yang memiliki kesempatan yang sama

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

di PWM dengan laki-laki, **KL** yang juga merupakan asisten **TM** di PWM Jatim mengatakan bahwa sebenarnya persamaan kesempatan itu tidak harus demikian. **KL** mengatakan bahwa bukan suatu keharusan perempuan berada pada PWM. Perempuan sudah memilki wadah organisasi yang lebih layak yakni Aisyiyah.

> Sebenarnya sudah tidak ada perdebatan antara peran laki-laki dan perempuan di Muhammadiyah, karena wilayahnya sudah berbeda. Perempuan sudah memiliki organisasi sendiri yang dibentuk oleh Muhammadiyah sebagai salah satu organisasi otonom yakni Aisyiyah. Melalui Aisyiyah lah perempuan beramal usaha. Jadi bapak-bapak Muhammadiyah di PWM sedangkan ibu-ibu Muhammadiyah di Aisyiyah. Kalaupun terdapat beberapa perempuan di keanggotaan majelis PWM, hal itu karena PWM memang benar-benar membutuhkan bantuan dari permpuan tersebut berdasarkan kapasitas dibidangnya.

Kemudian menanggapi pertanyaan berikutnya .mengenai pendapat narasumber tentang hasil Musywil yang tak satupun perempuan masuk dalam tiga belas besar pimpinan, **KL** yang saart ini berusia 47 tahun tersebut tidak menganggap serius permasalahan itu. Ketika diwawancarai mengenai penyebab perolehan suara calon pimpinan perempuan yang rendah, KL tidak menjelaskan secara pasti penyebab perempuan mendapat suara yang sedikit dalam Musywil 2010 kemarin. Beliau menegaskan bahwa hasil tersebut murni pilihan pemilih melalui *electronic voting*. Jadi, hasil tersebut merupakan kehendak dari pemilih

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sendiri, yang mana pastinya pemilih juga telah memilih secara otonom dan berdasarkan pertimbangan mereka masing-masing.

> Teknik pemilihan pada Musywil Jatim tahun ini dilaksanakan secara *e-voting,* jadi tidak ada kecurangan. Selain itu, pemilih pasti memilki pertimbangan tersendiri untuk memilih kandidat yang nantinya akan duduk di pimpinan.

Untuk pertanyaan selanjutnya mengenai adakah upaya peningkatan partsipasi perempuan di PWM untuk periode kepemimpinan selanjutnya, **TM** yang telah lama berkecimpung di elit PWM Jatim ini menegaskan bahwa tidak ada upaya khusus karena perempuan pada dasarnya memilki kesempatan dan kompetrensi yang sama dengan laki-laki. Semua bergantung pada individu perempuan itu sendiri terkait kesediaan dan kapasitas yang dia miliki; serta kepercayaan pemilih.

Terkait mengenai pemberdayaan atau peningkatan kapasitas perempuan Muhammadiyah, beliau kembali menegaskan bahwa upaya tersebut tidak ada dalam agenda struktural Muhammadiyah. Beliau menganggap hal itu bukalah hal yang urgen karena beliau yakin bahwa perempuan sudah berdaya dan kapasitas organisasinyapun sudah sangat baik. Terlebih perempuan telah memilki wadah tersendiri yang lebih layak untuk mengkader anggota perempuan melalui Aisyiyah. Melalui Aisyiyah itulah perempuan Muhammadiyah akan berproses dan mewujudkan cita-cita Muhammadiyah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> Perempuan Muhammadiyah itu sudah sangat berdaya, dan kapasitas mereka pun sudah sangat baik. Hal ini terbukti dengan prestasi Aisyiyah yang jauh lebih unggul dibandingkan dengan organisasi perempuan yang lain. Jadi, melalui Aisyiyahlah perempuan dapat berproses, sehingga agenda pemberdayaan perempuan sudah bukan sebagai agenda yang urgen.

Lebih lanjut, **TM** mengatakan bahwa program kerja antara Muhammadiyah dan Aisyiyah adalah sama. Hanya saja bidang garapannya yang berbeda. Dengan kata lain program kerja Muhammadiyah berbagi tugas dengan Aisyiyah. Seperti program kerja dalam bidang pendidikan, Muhammadiyah menangani pendidikan tingkat SMP hingga perguruan Tinggi; sedangkan Aisyiyah menangani playgroup, TK, dan SD. Semua saling bekerjasama dan saling membantu. Hal ini karena tidak ada pembedaan antara anggota laki-laki dan perempuan, semua sama-sama saling melengkapi dan berjuang untuk cita-cita organisasi. Tidak ada keraguan mengenai kapasitas perempuan Muhammadiayah di organisasi.

Dari wawancara denagan beberapa narasumber di atas dapat disimpulkan bahwa secara idealis, Muhammadiyah beserta Aisyiyah sangat mendukung perempuan dalam berkiprah di ranah publik sebagai bentuk kesetaraan gender, serta persamaan hak dan kewajiban antara kaum laki-laki dan perempuan di ranah politik sekalipun. Walaupun realitanya masih terdapat hambatan yang berarti bagi perempuan Muhammadiyah untuk duduk dalam elit struktur di PWM Jatim, yakni

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

jika terdapat calon pimpinan laki-laki maka pemilih lebih memilih calon laki-laki tersebut.

## D. Triangulasi

Sebagaimana dikemukakan di atas, terkait dengan keabsahan data, penulis menggunakan proses triangulasi. Triangulasi yang penulis lakukan adalah dengan triangulasi narasumber, dan triangulasi metode. Narasumber yang penulis pilih dalam proses triangulasi adalah seorang aktifis perempuan Muhammadiyah yang juga aktif dalam organisasi Aisyiyah. Aktivis tersebut berinisial **SW**. Sedangkan triangulasi metode, penulis melakukan teknik wawancara mendalam.

Proses wawancara untuk triangulasi ini dilaksanakan di kantor Aisyiyah yang juga berada di salah satu ruangan gedung PWM Jatim. Siang itu kantor PWM sangat sepi, hanya beberapa orang bapak-bapak Muhammadiyah saja yang nampaknya sedang saling berbincang di ruang lobi.

Untuk menemui informan, penulis langsung menuju ke kantor Aisyiyah. Dengan senyum ramah narasumber tersebut menyambut kedatangan penulis. Setelah berbincang sedikit mengenai maksud kedatangan penulis, maka wawancara mengenai permasalahan perempuan dan politik di struktur organisasi Muhammadiyah mulai diawali.

Menanggapi pertanyaan penulis mengenai hasil Muswil Jatim yang tak satupun perempuan masuk dalam struktur pimpinan, Beliau sangat menyayangkan hal tersebut. Beliau bertutur setidaknya terdapat perempuan yang dapat mewakili

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perempuan di posisi elit pimpinan di PWM Jatim. Namun, beliau menyadari bahwa bukanlah hal yang mudah bagi peremuan untuk masuk ke elit PWM. Terlebih saingan calon pimpinan waktu itu sebagian besar laki-laki. Jadi bukan hal yang aneh ketika perempuan tidak masuk ke tigabelas besar, karena pastinya pemilih akan lebih memilih laki-laki sebagai pimpinan. Hal ini karena beberapa pemilih masih lebih percaya jikalau lembaga dan majelis dibawah oleh pimpinan laki-laki yang berkompeten.

Beliau kembali menegaskan bahwa tidak adanya perempuan di elit pimpinan, serta sedikitnya perempuan di keanggotaan Lembaga dan Majelis bukan berarti kemudian perempuan dilupakan dan kebijakan organisasi menjadi bias jender. Muhammadiyah adalah organisasi yang demokratis, semua anggota memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam memajukan organisasi. Hanya saja, belum percayanya pemilih pada loyalitas perempuan di organisasi saja yang mungkin menyebabkan tidak terpilihnya perempuan. Secara kapasitas perempuan Muhammadiyah tidak diragukan oleh anggota yang lain. Namun, masalah akseptabilitas yang masih dipertanyakan. Mereka takut perempuan akan tidak setia mengabdi di organisasi karena masalah domestik.

Berkaitan dengan ranah domestik, sebenarnya perempuan dalam pandangan Muhammadiyah tidak identik dengan urusan mengasuh anak, mengurus dapur, dan urusan rumah tangga lainnya, tetapi memiliki tugas dan tanggungjawab yang sama dengan laki-laki. Namun, tetap saja perempuan memiliki kewajiban utama untuk membentuk keluarga yang sakinah. Oleh sebab

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

itu, permasalahan domesik mau tidak mau akan menjadi pertimbangan bagi pemilih, karena jika perempuan menjadi pimpinan di PWM pasti tugasnya sangat berat dan nantinya juga akan lebih sering berada di luar rumah dari pada mengurus keluarga. Terlebih jika perempuan tersebut memang sudah aktif dan memiliki jabatan penting di Aisyiyah.

Kemudian beliau kembali melanjutkan, bahwa sama halnya dengan pandangan Muhammadiyah yang membolehkan perempuan berpartisipasi dalam politik, Muhammadiyah juga membolehkan kepemimpinan perempuan dalam struktur organisasinya. Prinsip ini dengan alasan Muhammadiyah memandang laki-laki dan perempuan sama, tidak dibedakan dalam menjalankan prinsip-prinsip *amar makruf nahi munkar,* karena tugas tersebut merupakan tugas bersama laki-laki dan perempuan. Asalkan memenuhi syarat yang telah disepakati, perempuan pun boleh menduduki jabatan publik apapun, termasuk menjadi pemimpin.

Namun, realitas perempuan yang sangat sedikit di keanggotaan Majelis bahkan tidak ada yang menjadi elit pimpinan dalam PWM Jatim sempat menimbulkan pandangan bahwa Muhammadiyah bersikap "diskriminatif" terhadap perempuan. Pandangan ini juga muncul di tengah keorganisasian PP Muhammadiyah, sehingga melalui Sidang Tanwir Muhammadiyah 2002 di Bali, Muhammadiyah mulai melakukan rekonstruksi peran dan posisi perempuan di struktur organisasi. sidang tersebut memutuskan memberikan ruang bagi perempuan untuk masuk dalam struktur Muhammadiyah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Beliau kembali berujar bahwa tanwir tersebut merupakan titik awal kesadaran mengenai kesederajatan posisi laki-laki dan perempuan. Secara konstitusi organisasi, perempuan diakui sebagai sumber kekuatan dan penggerak organisasi. Oleh karena itu, masuknya perempuan dalam struktur kepemimpianan Muhammadiyah menjadi keharusan karena merupakan amanat konstitusi organisasi. Namun, sayangnya konstitusi tersebut tidak begitu "bergigi" sehingga keputusan tersebut tidak dapat terlaksana dalam Sidang Pleno II Muhammadiyah tidak ada seorangpun perempuan menjadi anggota di struktur pimpinan pusat Muhammadiyah.

Demikian pula dengan komposisi keanggotaan perempuan di PWM Jatim yang sangat minim serta tidak satupun yang menjadi pemimpin. Hal ini disebabkan karena pimpinan sendiri tidak memberikan spesifikasi kuota perempuan di organisasi. Terlebih perempuan juga tidak melakukan upaya khusus agar ditetapkan konstitusi mengenai kuota keterwakilan mereka di PWM. Dengan kata lain tidak ada bargaing khusus antara anggota pimpinan laki-laki dengan perempuan mengenai perihal tersebut.

Lebih lanjut beliau mengatakan bahwa terdapat kemungkinan perempuan terilhami oleh salah satu dari pedoman Muhammadiyah bahwa pimpinan dalam persyarikatan Muhammadiyah bukanlah kedudukan yang harus diperebutkan. Jadi, meskipun sudah menjadi kesadaran umum bahwa perempuan perlu ada wakil di struktur pimpinan, dan perempuan telah siap menduduki jabatan pimpinan di PWM, tetapi bukan keharusan bagi perempuan untuk mendapatkan kesempatan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tersebut. Perempuan masih memiliki Aisyiyah sebagai jalan beramal usaha sesuai cita-cita persyarikatan Muhammadiyah.

Berdasarkan hasil wawancara di atas, ternyata triangulasi narasumber yang dilakukan penulis dengan teknik wawancara mendalam telah memperkuat hasil penelitian. Inti dari hasil penelitian tersebut yakni perempuan diperbolehkan berkiprah di ranah publik khususnya dalam organisasi, baik sebagai pemimpin maupun sebagai anggota. Namun, idealisme gerakan belum dapat terwujud dalam oranisasi karena beberapa sebab. Baik dari pimpinan atau tiap individu organisasi sendiri yang kurang mewujudkan kesetaraan peran tersebut.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

# BAB V

# ANALISIS HASIL PENELITIAN

## A. Perempuan Dan Politik Dalam Persepektif Muhammadiyah Jawa Timur

Organisasi Muhammadiyah merupakan organisasi Islam yang mendukung perempuan untuk mengenyam pendidikan dan maju di ranah sosial politik seperti laki-laki. Organisasi ini dalam memandang perempuan dan politik sesuai dengan pendapat liberal progresif yang menyatakan bahwa Islam sejak awal telah memperkenalkan konsep keterlibatan perempuan dalam bidang politik. Adapun alasan dari pendapat ini adalah karena istri Rasulullah juga aktif dalam urusan pemerintahan pada zaman itu.

Oleh sebab itu, melalui Aisyiyahlah perempuan Muhammadiyah mendapatkan kesempatan tersebut. Sesuai dengan tujuan awal berdirinya organisasi tersebut berusaha untuk menempatkan perempuan secara berangsur-angsur mendapatkan penghargaan secara tepat sesuai ajaran Islam. Menurut Aisyiyah, Islam mendudukkan perempuan sebagai:

1. Hamba Allah, melaksanakan tugas dan perintah Allah sama dengan laki-laki. Dijelaskan pula asal kejadian kejadian perempuan yang berasal dari zat yang sama pula dengan laki-laki yakni sari pati tanah. Seperti yang dijelaskan dalam surat an-Nisa' ayat 1, artinya:



digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

"*Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Allah yang menjadikan kamu dari jenis yang sama dan menjadikan dari padanya pasangan, kemudian dikembangkan-nya keduannya, laki-laki dan perempuan*"

2. Khalifah Allah, yang diharapkan sama-sama berperan dengan laki-laki mensejahterakan kehidupan dan menciptakan kedamaian dunia. Sebagai khalifah, perempuan juga dibekali dengan bekal yang diberikan Allah pada kaum laki-laki, yakni akal pikiran dan ilmu pengetahuan serta seluruh kandungan alam yang dapat dipergunakan perempuan untuk tugas-tugas yang diembannya. Peran sebagai khalifah diwujudkan dalam bentuk amal sholeh melalui kegiatan yang dilakukannya. Bidang apapun yang dirtekuni merupakan bentuk amal seorang khalifah untuk memakmurkan dan mensejahterakan bumi persada.

Jadi, perempuan menurut Aisyiyah adalah khalifah Allah swt di muka bumi sama seperti laki-laki. Pandangan ini secara implisit telah menjelaskan peran perempuan dan politik. Dengan kata lain, Aisyiyah sebagai ortom Muhammadiyah mendukung perempuan berkiprah di ranah sosial dan politik. Perempuan memiliki hak untuk berperan politik kenegaraan maupun intern organisasi Muhammadiyah.

Sesuai dengan pengertiannya, Politik selalu menyangkut tujuan-tujuan dari seluruh masyarakat, dan bukan tujuan pribadi seseorang. Politik hakikatnya mencakup berbagai kegiatan kelompok termasuk partai politik dan kegiatan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sekelompok individu lainnya.[1] Oleh sebab itu, Muhammadiyah sebagai sebuah organisasi tentunya tidak lepas dari proses politik.

Secara lebih detail mengenai politik dan organisasi, Douglas Fairholm mendefinisikan politik keorganisasian sebagai " ...meliputi tindakan-tindakan yang diambil guna memperoleh dan menggunakan *power* (kekuasaan) guna mengendalikan sumber daya organisasi guna mencapai hasil yang diharapkan oleh satu pihak ketimbang lainnya."

Seperti yang telah dijelaskan diatas, berkaitan dengan adanya politik dalam suatu organisasi, ketika sekelompok orang berada dalam suatu organisasi maka mereka akan menggunakan kekuasaan. Hal ini karena setiap anggota memiliki keinginan untuk berada dalam posisi tertentu dengan menggunakan pengaruh, mendapatkan penghargaan, kewenangan menentukan kebijakan organisasi.[2]

Sehingga orang-orang dan unit-unit yang bertanggung jawab melaksanakan tugas-tugas penting dalam organisasi, memiliki keuntungan dalam rangka mengembangkan dan menggunakan kekuasaan dalam organisasi. Keuntungan tersebut yakni memiliki pengaruh yang besar dalam organisasinya, dan tidak lain pengaruh dan kekuasaan tersebut adalah untuk kebaikan organisasi. Dengan demikian, sebagai sebuah organisasi, selain tak lepas dari politik, Muhammadiyah juga tak lepas dari perihal kekuasaan maupun pengaruh.

---

[1] Miriam Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik* ( Jakarta: PT.Gramedia Pustaka Utama, 2002), 8.

[2] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Setelah membahas sedikit tentang politik organisasi dan kekuasaan sebagai gambaran umum, akan semakin jelas ranah politik yang dimaksudkan dalam persoalan perempuan dan politik di Muhammadiyah. Struktur organisasi Muhammadiyah anggotanya terdiri dari laki-laki dan perempuan. Masing-masing anggota memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam organisasi. Hak dan kewajiban tersebut terangkum dalam AD ART Muhammadiyah.

Berkaitan dengan hak dan kewajiban politik anggota perempuan, Muhammadiyah secara idealis menganngap penting bagi perempuan untuk berperan aktif dalam organisasi. Dengan berorganisasi maka perempuan dapat mengaktualisasikan diri, sebagai bentuk ibadah, dan karena sebenarnya perempuan memiliki hak yang sama dengan laki-laki dalam suatu organisasi publik. Hal ini sesuai dengan hak-hak politik yang mencakup:

1. Hak dalam mengungkapkan pendapat dalam pemilihan dan referendum dengan berbagai cara
2. Hak dalam pencalonan menjadi anggota lembaga perwakilan dan lembaga setempat.
3. Hak dalam pencalonan menjadi pemimpin, dan hal-hal lain yang mengandung persekutuan dan penyampaian pendapat yang berkaitan dengan dengan politik.

Hak-hak politik di atas menyiratkan partsipasi perempuan dalam pembentukan pendapat umum, baik dalam pemilihan wakil-wakil mereka dalam Majelis-majelis dan Lembaga di PWM atau pencalonan diri mereka untuk menjadi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

anggota majelis atau lembaga tersebut. Partisipasi politik ini juga terkait masalah keikutsertaan dalam proses formulasi, pengesahan, pelaksanaan kebijakan dan kontrol kinerja organisasi. Partisipasi politik dalam bentuk apapun yang dilakukan oleh para aktifis perempuan hakikatnya adalah usaha untuk menggali dan memberdayakan potensi-potensi yang dimiliki oleh perempuan, serta mewakili aspirasi perempuan di organisasi. Kesemua ranah partisipasi tersebut dapat diperoleh oleh kaum perempuan jika terdapat kebijakan dalam organisasi tersebut yang memberikan kesempatan bagi perempuan untuk berpartisipasi.

Selama ini beberapa perempuan di Muhammadiyah mendapatkan kesempatan partsipasi tersebut. Partisipasi tersebut di dukung oleh AD ART organisasi Muhammadiyah, yakni tidak ada dikotomi antara anggota laki-laki dan perempuan. Perempuan dan laki-laki memiliki kesempatan yang sama walaupun realitanya dalam struktur PWM, kuantitas perempuan lebih sedikit dibandingkan anggota laki-laki dan hanya berada di anggota majelis atau lembaga saja.

Namun, sedikitnya kuantitas tersebut bukan berarti perempuan tidak diajak dalam kegiatan organisasi. Program-program organisasi diselenggarakan dengan pengurus yang juga terdiri dari anggota laki-laki dan perempuan Muhammadiyah. Bahkan, komunikasi antara anggota laki-laki dan perempuan Muhammadiyah pun berjalan dengan baik. Hal ini di buktikan dengan program-program amal usaha Aisyiyah yang juga sejalan dan juga didukung oleh pimpinan Muhammadiyah Jatim. Komunkasi ini berlangsung ketika diselenggarakan musyawarah di anggota majelis atau secara kultural. Dengan kata lain, meskipun

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perempuan tidak berada dalam elit pimpinan sebagai penentu kebijakan tetapi masih dapat berkomunikasi dengan anggota lain (laki-laki) dalam hal pembuatan kebijakan, dan penyelenggaraan program.

Selain berpartisipasi sebagai anggota majelis dan lembaga, perempuan Muhammadiyah juga menunjukkan persetujuan perempuan untuk duduk dalam elit pimpinan organisasi di PWM Jatim. Pendapat ini didukung oleh AD ART organisasi Muhammadiyah dan Tata Tertib Pemilihan Anggota Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Timur bab II mengenai calon dan bab III mengenai pencalonan yang mana tersirat bahwa anggota laki-laki maupun perempuan yang telah memenuhi syarat dapat dicalonkan sebagai pimpinan wilayah.

Adapun alasan mengenai keterwakilan tersebut yakni karena keterwakilan perempuan di elit pimpinan adalah hal yang urgen untuk mengakomodir kepentingan perempuan Muhammadiyah dan khusunya perempuan yang tergabung dalam Aisyiyah. Posisi anggota tidak lebih berpengaruh dibandingkan dengan posisi elit pimpinan, karena ketika menjadi elit pimpinan perempuan akan memiliki kekuasaan untuk mentranformasikan pendapat menjadi sebuah formulasi kebijakan organisasi. Formulasi tersebut tetunya merupakan kebijakan yang terbaik untuk semua anggota Muhammadiyah, khususnya anggota perempuan. Oleh karena itu, perempuan berharap dapat menjadi elit pimpinan agar perempuan dapat menyampaikan pendapat dan menjadi pihak yang berpengaruh dalam organisasi. Hal ini didukung pula dengan kesiapan perempuan Muhammadiyah ketika diberikan kepercayaan untuk maju sebagai elit pimpinan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kesediaan perempuan Muhammadiyah untuk mendapatkan hak dan kewajiban politik dalam organisasi tersebut secara tidak langsung adalah cerminan dari pendapat Mac. Kinnon, ketika hak politik terenggut maka hak-hak lainnya akan mengikuti (terenggut pula), politik adalah ranah yang sangat fundamental bagi penentu hak-hak lainnya.[3] Dengan demikian, perempuan Muhammadiyah berharap adanya peluang dan kepercayaan bagi perempuan untuk mendapatkan kekuasaan di struktur elit pimpinan.

Ironisnya, ketika perempuan diberikan kepercayaan oleh anggota Majelis dan Pimpinan Daerah untuk maju sebagai calon pimpinan dalam Musyawarah Wilayah, perempuan tidak mendapatkan suara yang signifikan. Bahkan dalam pemilihan tersebut, tak satupun perempuan terpilih dalam struktur elit pimpinan sehingga perempuan belum pernah menduduki elit pimpinan di Muhammadiyah Jatim. Dalam keanggotaan majelis dan lemabaga pun perempuan sangat sedikit sekali. Sebagian besar pemilih dalam Musywil 2010 lebih mempercayakan kepemimpinan pada calon pimpinan laki-laki.

Sulitnya perempuan menduduki elit pimpinan ini disebabkan adanya pandangan patriarki yang masih ada di pimpinan maupun anggota Muhammadiyah sendiri, serta kultur yang meyakini bahwa jika masih ada laki-laki dalam suatu komunitas maka laki-lakilah yang menjadi pemimpin. Selain itu, kepercayaan untuk dapat menjadi pemimpin juga dihalangi oleh ketidakpercayaan anggota lain terhadap kapabelitas perempuan saat nanti menjadi pemimpin. Ranah domestic

[3] To Ward A Feminist Theory Of State, 215.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(keluarga) juga menjadi alasan tersendiri bagi aktifis perempuan Muhammadiyah dalam berkeputusan memilih atau tidak untuk mengemban jabatan pemimpin yang notabene akan lebih sering berada di ranah publik.[4]

Pandangan patriarki ini terbukti ketika berlangsungnya proses pemilihan dan penentuan distribusi kekuasaan dalam organisasi. Perempuan dicalonkan tetapi hanya mendapatkan perolehan suara yang rendah. Peserta pemilihan lebih memilih laki-laki dari pada perempuan sebagai elit pimpinan, padahal sebenarnya perempuan juga memiliki kapasitas organisasi yang tidak kalah dengan laki-laki. Adapun alasan mengapa pemilih lebih memilih laki-laki yang layak menjadi pemimpin karena laki-laki dianggap lebih mampu dan tidak terikat oleh ranah domestik; dan adanya anggapan perempuan sudah sibuk dalam Aisyiyah sehingga tidak ingin mengganggu dan memberatkan tanggung jawab perempuan, padahal perempuan sudah bersedia memangku tanggung jawab di pimpinan Muhammadiyah maupun Aisyiyah.

Selain itu, ada pula pendapat dari narasumber yang mengatakan bahwa sebenarnya terdapat dikotomi antara perempuan dan laki-laki dalam Muhammadiyah, sehingga tidak perlu perempuan berada dalam elit pimpinan organisasi. Tempat perempuan adalah khusus di Aisyiyah. Pendapat ini sangat bertentangan dengan teks AD ART Muhammadiyah yang secara lugas menyatakan bahwa anggota Muhammadiyah adalah laki-laki dan perempuan, serta keduanya memilki tanggungjawab dan hak yang sama dalam organisasi.

---

[4] Wawancara, selasa, 8 Februari 2011.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sedangakan dalam distribusi kekuasaan di struktur organisasi, PWM Jatim tidak ada kebijakan penentuan kuoata antara pimpinan laki-laki dan perempuan. Kebijakan ini berbeda dengan yang ditetapkan oleh PP Muhammadiyah yakni tiga puluh persen untuk keterwakilan perempuan di elit pimpinan. Sehingga dalam penentuan komposisi anggota dalam Majelis dan Lembaga, perempuan bukanlah prioritas utama. Penunjukan perempuan dalam keanggotaan pimpinan tersebut, menurut keterangan elit pimpinan hanya ditujukan pada perempuan yang ditunjuk sesuai rekomendasi elit pimpinan.

Realita ini agaknya sesuai dengan pendapat James L Gibson bahwa saat ini perempuan masih sangat jarang mendapat kekuasaan di posisi strategis dalam organisasi. Menurut beliau, terdapat beberapa cara di mana para perempuan dibiarkan relative tidak berkuasa dalam tugas managerial mereka. Pertama, ada kecenderungan dari pimpinan lain untuk melindungi yang merendahkan kemampuan perempuan dengan menempatkan mereka pada pekerjaan yang aman, jauh dari hal-hal yang beresiko.

Kedua, perempuan dengan mudahnya diabaikan karena mereka dianggap "tidak tahu apa-apa". Perempuan sering dipandang mengetahui persyaratan teknis suatu pekerjaan, tetapi dipandang tidak terlalu terampil dalam berbagai bidang lain. Ketiga, hingga saat ini kaum laki-laki merasa tidak senang melihat

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perempuan sebagai usahawan. Mereka tidak mendapatkan kesan bahwa wanita mampu memegang suatu kekuasaan.[5]

Oleh sebab itu, keterwakilan perempuan di elit PWM tidak mendapatkan perhatian serius para elit pimpinannya yang mayoritas laki-laki tersebut. Hal itu terbukti bahwa selama ini tidak ada upaya peningkatan partisipasi perempuan yang setidaknya diimplementasikan dalam bentuk kebijakan. Pun anggota PWM lainnya yang sebagian pasrah saja ketika mereka tidak terwakili dalam struktur elit pimpinan. Bagi mereka sudah cukup perempuan berada di Aisyiyah.

Di balik realita tidak terwakilinya perempuan di struktur elit pimpinan, perempuan masih memilki semangat dan optimisme untuk dapat duduk dalam elit pimpinan. Optimisme tersebut diwujudkan dengan peran aktif perempuan di Majelis dan Lembaga dalam mengikuti kegiatan atau program organisasi, yakni dengan mengusulkan dan menjalankan program-program yang bebobot. Sehingga dapat membuktikan bahwa eksistensi perempuan dalam keanggotaan organisasi juga memiliki kapabelitas yang patut untuk dipercayakan menjadi pemimpin.

Dengan demikian, realita tidak terpilihnya perempuan dalam pimpinan serta sedikitnya perempuan di Majelis dan Lembaga merupakan ambivalensi antara gagasan kesetaraan perempuan di organisasi dengan implementasi gagasan tersebut. Sebagian besar anggota laki-laki dan perempuan mengakui adanya kesetaraan partisipasi perempuan di organisasi, tetapi realitanya mereka masih menaruh sedikit kepercayaan pada kapabelitas perempuan dan lebih menyetujui

[5]James L Gibson, *Organisasi Perilaku-Struktur Proses* (Jakarta: Erlangga, 1996), 307.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

laki-laki sebagai pemimpin. Ketidakpercayaan dan ketidakpekaan tersebut berimplementasi pada tidak adanya upaya khusus agar perempuan terwakili di PWM. Padahal perempuan Muhammadiyah sangat kapabel di bidang organisasi, yang mana nampak pada amal usaha perempuan yang sangat maju di Aisyiyah.

Dari ambivalensi tersebut tersirat masih adanya mindset patriarki di sebagian anggota PWM Jatim. Distribusi kekuasaan dalam organisasi Muhammadiyah sebagai organisasi modern, secara idealis organisasi ini menerapkan system profesionalisme. Lebih tepatnya menggunakan pembagian kekuasaan berdasarkan *expert power* yakni kekuasaan didasarkan kemampuan dan pengetahuan khusus yang dimiliki seseorang. Akan tetapi, realitanya distribusi tersebut masih terbentur masalah gender, yakni laki-laki lebih diutamakan dari pada perempuan untuk duduk dalam elit pimpinan.

Dalam hal kepeimpinan perempuan, Hamka menganalisis persoalan kepemimpinan perempuan, mengatakan bahwa perempuan juga dapat memajukan dan mengendalikan roda pemerintahan dengan lancar. Pendapat ini didukung oleh kepemimpinan perempuan di Negara Mesir, Aceh dan Makasar, yang mana kepemimpinan tersebut juga berjalan dengan baik. Dalam pandangan Hamka, kesuksesan raja-raja perempuan tersebut di dukung oleh kemampuan tokoh-tokoh di sekitarnya yang bekerjasama.

Pendapat dari Hamka tersebut sebenarnya juga sesuai dengan pendapat PWM Jatim. Hanya saja banyak sekali hambatan dalam mewujudkannya. Salah satunya yakni Mindset patriarki yang ternyata masih ada pada kepemimpinan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

PWM Jatim. Mindset ini bertentangan dengan idealisasi organisasi yakni sebagai organisasi yang terbuka dan pembaharu berdasarkan gerakan tajdid, sedangkan mindset patriarkhi sebenarnya merupakan mindset dari masyarakat yang tradisional. Ketidaksesuaian ini semakin rumit, terlebih pada dasarnya organisasi ini mendukung kesetaraan perempuan dan laki-laki. Semua perilaku dan aktifitas yang dilakukan oleh anggota organisasi dipandang sebagai substansi organisasi. Jadi dapat disimpulkan bahwa walaupun secara idealis Muhammadiyah memiliki karakteristik pembaharuan dan mudah menerima gagasan baru, tetapi pada realitanya mengenai hal-hal tertentu PWM Jatim masih memiliki mindset patriarkhi.

Ketidaksempurnaan organisasi agama yang terkait dengan ketidaksesuaian idealisme organisasi dengan penerapannya dalam organisasi menurut Elizabet K. Huntington adalah hal yang wajar. Beliau menegaskan bahwa biasanya terdapat perbedaan nyata antara cita-cita etik agama yang luhur dengan perwujudannya di dalam lembaga-lembaga kemanusiaan. Pengetahuan sosiologis yang mengatakan bahwa semua lembaga adalah hasil dari aktifitas manusia yang disengaja. Oleh sebab itu tidak ada hubungan otomatik antara cita-cita yang luhur dengan bentuk-bentuk institusional seharusnya meredakan kekecewaan dan keputusasaan tersebut. Jadi, meskipun ketidaksempurnaan merupakan hal yang wajar tetapi masih ada usaha untuk menyesuaikan antara idealisme organisasi dengan penerapannya dalam organisasi agar tidak menimbulkan konflik antar angota organisasi tersebut.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

## B. Muhammadiyah Sebagai Organisasi Moderen

Muhammadiyah adalah salah satu organisasi Islam yang pendiriannya dipelopori oleh K.H Ahmad Dahlan. Kyai Haji Ahmad Dahlan sebagai pendiri Muhammadiyah dikenal sebagai pelopor gerakan tajdid (pembaruan). Tajdid yang dilakukan pendiri Muhammadiyah itu bersifat pemurnian (purifikasi) dan perubahan ke arah kemajuan (dinamisasi), yang semuanya berpijak pada pemahaman tentang Islam yang kokoh dan luas. Berdasarkan sifat-sifat organisasi tersebut, organisasi ini dianggap sebagai organisasi Islam Modern.

Kata modern adalah sebuah istilah yang memiliki arti baru lawan kata dari kuno, inovatif sebagai lawan tradisional. Meskipun demikian, apa yang disebut modern pada suatu waktu dan tempat, dalam kaitannya dengan budaya tidak akan memiliki arti yang sama pada masa yang akan datang atau dalam konteks yang lain. Oleh sebab itu, penilaian tentang apa yang disebut modern adalah persoalan perspektif dari orang yang melihat. Fenomena yang nampaknya sama bisa jadi sangat berbeda tergantung pada konteks yang berbeda. Pada masa awal pendiriannya, Muhammadiyah termasuk gerakan Islam Modern yang agenda utama gerakannya adalah gerakan tajdid.

Salah satu gerakan tajdid tersebut adalah ketika memandang syariat Islam, Muhammadiyah sebagai penganut paham Islam modern meletakkan aturan-aturan Islam yang terdapat dalam al Quran dan al Sunnah secara lebih kontekstual atau tidak literal. Syariat Islam mendapatkan pemaknaan-pemaknaan yang lebih

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bersifat kontekstual untuk menjawab masalah-masalah yang terjadi saat ini. Adaptasi aturan-aturan dari al Quran dan Sunnah tersebut dikarenakan zaman semakin lama akan berkembang semakin kompleks. Bagi Muhammadiyah, Islam memberikan dasar bagi semua aspek kehidupan masyarakat dunia, baik pribadi maupun masyarakat, yang dipandang selalu sesuai dengan semangat perkembangan. Sehingga, agama tidak hanya muncul dalam bentuk ritual dan peribadatan semata, tetapi juga merefleksikan pengalaman dan fenomena sosial masyarakat. Seperti halnya pemahaman theology Alma'un yang diilhami sebagai landasan amal usaha Muhammadiyah. Berdasarkan teologi al-Maun pula Muhammadiyah mendirikan panti asuhan, dan amal usaha yang lain.

Selain itu, Muhammadiyah dikatakan sebagai organisasi Modern karena sesuai dengan karakterisik pembaharuan yang dapat dilihat dari dua perspektif. Pertama berkaitan dengan institusi, dan kedua berkaitan dengan individu. Pendekatan pertama lebih menekankan pada cara bagaimana mengorganisasi atau melakukan sesuatu, sedang yang kedua lebih menekankan pada cara berpikir dan merasa.

Analisis pertama berkaitan dengan institusi, secara idealis Muhammadiyah memiliki sistem administrasi yang professional. Seluruh kinerja organisasi dilaksanakan secara professional. Pertama, ialah ciri kerja yang memanfaatkan (didasarkan atas penerapan) ilmu dan tekhnologi. Kedua, ciri kerja yang dilakukan orang yang memang mampu untuk melaksanakan kerja tersebut (kesesuaian antara potensi dan fungsi *the right man in the right place*). Ketiga, ciri

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kerja yang slalu memperhatikan dan mengupayakan optimasi hasil kerja. Keempat, pertimbangan rasionalitas yang tinggi, termasuk di dalamnya pemanfaatan *management.*[6]

Keberhasilan organisasi Muhammadiyah dalam hal managemen dan administrasi organisasi dibuktikan oleh perkembangan organisasi yang terus berlanjut dalam hal keanggotaan dan jumlah pimpinan cabang, lembaga pendidikan serta amal usaha yang dimilikinya. Tak terkecuali majunya beberapa organisasi otonom yang sengaja didirikan oleh Muhammadiyah.

Sesuai dengan definisi organisasi yakni sebagai struktur pembagian kerja dan strukrtur tata hubungan kerja antara sekelompok orang pemegang posisi tertentu untuk bersama-sama mencapai tujuan tertentu[7], maka saat ini organisasi Muhammadiyah di PWM Jatim sendiri memiliki begitu banyak pimpinan cabang dan amal usaha. Amal usaha tersebut mulai dari bidang pendidikan, kesehatan, panti asuhan, dan perkoprasian. Amal usaha ini didirikan untuk melayani masyarakat secara umum, dan letaknyapun mulai di kota besar hingga di pelosok desa. Terus berkembangnya jumlah anggota yang ada di kota dan desa merupakan modal berharga untuk mendukung progam dan amal usaha organisasi Muhammadiyah.

Kemudian yang ke-dua mengenai individu, secara umum beberapa karakteristik modernis yang ada pada para individu pendukung gerakan-gerakan

---

[6]Tim Penulis Al Islam Dan Kemuhammadiyahan UMM, *Muhammadiyah Sejarah, Pemikiran, Dan Amal Usaha* (Malang: PT. Tiara Wacana Yogyakarta dan UMM press, 1998), 142.

[7] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ini adalah: kesediaan menerima pengalaman dan ide baru; lebih demokratis dalam menerima pandangan orang lain; memiliki *concern* yang besar pada perencanaan, organisasi, serta efisiansi; berorientasi pada masa depan dari pada masa lalu; dan keyakinan akan ditegakkannya keadilan.[8] Beberapa karateristik tersebut telah nampak pada tiap individu organisasi yang diwujudkan dalam kinerja dan amal usaha gerakan.

Ciri lain yang dapat dilihat adalah bahwa mereka menerima perubahan. Bagi mereka, perubahan merupakan sebuah keniscayaan selama praktik kehidupan kini tidak merefleksikan semangat ajaran agama yang sesungguhnya. Dan dalam menjalankan bagian terpenting dari kewajiban dan nilai setiap organisasi agama masyarakat adalah kemampuannya untuk melakukan penilaian kritis terhadap tatanan sosial dan perspektif yang lebih besar dan transenden.[9] Dari kemampuan inilah Muhammadiyah dapat melakukan perubahan dan pemberdayaan masyarakat melalui program kerja berdasarkan arah gerak dan tujuan organisasi.

Karakteristik modernis mulai nampak ketika individu-individu Muhammadiyah melakukan perubahan dan pemberdayaan Masyarakat di bidang pendidikan. Pada awal masa pendirian Muhammadiyah, gerakan ini mengkonsentrasikan pada peningkatan pendidikan masyarakat. Pemberantasan buta huruf serta model pendidikan yang didirikan tidak hanya diisi dengan

---

[8]Tim Penulis Al Islam Dan Kemuhammadiyahan UMM, *Muhammadiyah Sejarah, Pemikiran, Dan Amal Usaha,* 98.

[9]Tim Penulis Al Islam Dan Kemuhammadiyahan UMM, *Muhammadiyah Sejarah, Pemikiran, Dan Amal Usaha*, 93.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pengetahuan agama tetapi juga pengetahuan umum. Pembaharuan system pendidikan ini merupakan cara pendidikan yang baru pada masanya. Hal ini karena saat itu pendidikan umumnya hanya terbatas pada masalah pendidikan agama.

Seiring berjalannya waktu, amal usaha Muhammadiyah di bidang pendidikan semakin berkembang mulai dari Play Group hingga perguruan tinggi. Fungsi pendidikan tidak hanya untuk menghilangkan buta huruf atau membentuk watak orang, tetapi juga, terutama melalui lembaga pendidikannya berperan untuk menyebarkan ide-ide pembaharuannya. Ide-ide pembaharuan itu terangkum dalam studi Kemuhammadiyahan dan Al Islam sebagai mata pelajaran tambahan. Sehingga melalui pendidikan pulalah Muhammadiyah memberikan pengetahuan peserta didik mengenai arah gerak dan tujuan organisasi Muhammadiyah.

Selain masalah peningkatan pendidikan, Muhammadiyah juga memiliki pandangan tersendiri mengenai isu-isu kontemporer, salah satunya yakni peran perempuan dalam kehidupan masyarakat. Muhammadiyah adalah salah satu organisasi yang mempelopori pendirian organisasi perempuan, yakni Aisyiyah. Aisyiyah yang awalnya bernama *Sopo Tresno* ini didirikan pada tahun 1914 oleh Nyai Ahmad Dahlan, istri pendiri Muhammadiyah. Beliau menjadikan pendidikan sebagai agenda utama gerakan untuk memperjuangkan dan meningkatkan derajat kaum perempuan, khususnya mereka yang tergabung dalam organisasi Muhammadiyah. Pada tahun 1917, *Sopo Tresno* ditransformasikan menjadi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Aisyiyah, satu organisasi Muhammadiyah yang saat itu Nyai Ahmad Dahlan menjadi ketua aisyiyah yang pertama.

Seiring dengan perkembangan masa, perjuangan Aisyiyah saat ini memfokuskan pada pemberdayaan masyarakat, yakni mendirikan lembaga pendidikan modern, pelayanan kesehatan, dan amal usaha lain untuk kesejahteraan masyarakat. Berkaitan dengan perempuan, bisa dikatakan bahwa Aisyiyah telah berjasa menjadikan mereka tampil sebagai bagian dari anggota masyarakat yang memiliki hak setara dengan kaum laki-laki.[10]

Berbicara mengenai politik dalam tubuh organisasi Muhmmadiyah bukanlah suatu hal yang ganjil walaupun Muhammadiyah bukan organisasi politik. Hal ini karena sebagai organisasi sosial keagamaan, Muhammadiyah dalam proses keorganisasiaanya tak lepas dari proses politik. Sesuai dengan konsep politik menurut Miriam Budiardjo, adalah bermacam-macam kegiatan dalam suatu sistem politik (atau negara) yang menyangkut proses menentukan tujuan-tujuan dari sistem itu dan melaksanakan tujuan-tujuan itu. Pengambilan keputusan mengenai apa yang menjadi tujuan dari sistem politik itu menyangkut seleksi antara beberapa alternatif dan penyusunan skala prioritas dari tujuan-tujuan yang telah dipilih itu. Politik selalu menyangkut tujuan-tujuan dari seluruh masyarakat, dan bukan tujuan pribadi seseorang.[11] Jadi selain mengenai proses kenegaraan, politik

---

[10]Jajat Burhanudin dan Oman Faturahman, *Tentang Perempuan Islam Wacana dan Gerakan* (Jakarta: PT. Tomasu, 2004), 104.

[11] Miriam Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik* ( Jakarta: PT.Gramedia Pustaka Utama, 2002), 8.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

juga ada dalam system kemasyarakatan, salah satunya yakni dalam organisasi masyarakat.

Proses pengambilan di keputusan Muhammadiyah berdasarkan Prinsip kebjakan Organisasi yakni[12] Musyawarah merupakan salah satu institusi penting di lingkungan umat Islam, juga di Muhammadiyah. Dengan demikian, musyawarah dalam Muhammadiyah sering merupakan titik peka untuk konflik. Dengan demikian, Muhammadyah merumuskan konsep musyawarah dengan mengacu pada nilai-nilai Islam, serta mempelajari tradisi yang berkembang di kalangan umat Islam.

Dalam proses kepemimpinannya, Muhammadiyah juga tak lepas dari struktur pembagian kerja, dan struktur tata hubungan kerja. Struktur pembagian kerja ini tentunya sesuai dengan kapasitas yang dimiliki oleh setiap anggota. Dalam pembagian struktur pula tersurat sebuah pembagian kekuasaan. Hal ini karena dalam sebuah organisasi terdapat proses politik yang tak lepas dari kekuasaan.

Keterkaitan antara Politik dalam suatu organisasi dengan istilah kekuasaan dan pengaruh merupakan sebuah keniscayaan dalam organisasi, dan hal itu di mulai dari isu struktural.[13] Sehingga segala aktifitas dalam organisasi tak terlepas dari politik etis dan kekuasaan. Hal ini dikarenakan, ketika sekelompok

---

[12]Tim Penulis, *Muhammadiyah: Sejarah, Pemikiran, Dan Amal Usaha* (Yogyakarta: PT. Tiara Wacana Yogya dan Universitas Muhammadiyah Malang Press, 1990), 136.

[13] Haris, *Politik Organisasi: Perspektif Mikro, Diagnose Psikologis* (Jogjakarta: Pustaka Pelajar, 2006), 3.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

orang berada dalam suatu organisasi maka mereka akan menggunakan kekuasaan. Setiap anggota memiliki keinginan untuk berada dalam posisi tertentu dengan menggunakan pengaruh, mendapatkan penghargaan, kewenangan menentukan kebijakan organisasi.[14] Sehingga orang-orang dan unit-unit yang bertanggung jawab melaksakan tugas-tugas penting dalam organisasi, memiliki keuntungan dalam rangka mengembangkan dan menggunakan kekuasaan dalam organisasi.

Esensi kekuasaan adalah kendali atas perilaku orang lain. Kekuasaan adalah kekuatan yang kita gunakan agar sesuatu hal terjadi dengan cara disengaja, di mana *influence* (pengaruh) adalah apa yang kita gunakan saat kita menggunakan kekuasaan. Seorang manajer membiakkan kekuasaan baik dari sumber organisasi dan disebut sebagai "*power position*" dan "*personal power*" yang berasal dari individu.

PWM Jatim dalam pembagian kekuasaannya sangatlah demokratis, yakni melalui pemilihan *electronic voting* secara langsung. Setiap anggota yang memenuhi syarat dapat dicalokan maenjadi calon pmpinan yang nantinya akan dipilih melalui proses pemilihan yang disebut sebagai Musyawarah Wilayah. Musywil ini diselenggarakan dalam lima tahun sekali. Dan selanjutnya mengenai anggota pimpinan akan ditentukan oleh tiga belas pimpinan yang telah terpilih.

Namun, saat ini belum banyak perempuan yang duduk dalam keanggotaan atau elit pimpinan di struktur PWM Jatim. Terdapat berbagai penyebab yang salah satunya yakni beberapa pemilih masih belum dapat

[14] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memberikan kepercayaan terhadap kepeimpinan perempuan. Hal itu menjadi kendala tersendiri bagi para perempuan PWM Jatim ketika ingin berpartisipasi di level elit pimpinan organisasi.

Dengan demikian, Muhammadiyah sebagai organisasi modern telah menjadi pelopor dalam membangun kemajuan masyarakat baik di bidang kesehatan, pendidikan, ekonomi dan lain sebagainya. Demikian pula dalam proses pemilihan pimpinannya yang cenderung demokratis. Namun, dalam aplikasinya, distribusi kekuasaan yang seharusnya sesuai dengan prinsip *the right man in the right place* terbentur pada perbedaan gender. Anggota laki-laki dipandang lebih dapat dipercaya dan mampu memimpin organisasi dari pada anggota perempuan. Analisis ini berdasarkan sedikitnya anggota perempuan di PWM Jatim yang secara realitanya perempuan tersebut memiliki potensi yang besar, terbukti dengan keberhasilan kiprahnya di PWA Jatim.

Dari realitas tersebut, PWM Jatim sebagai organisasi Islam modern yang memiliki semangat kemajuan ternyata dalam satu sisi masih memiliki mindset patriarkhi. Namun, seiring berjalannya waktu, PWM Jatim dengan gerakan tajdidnya memiliki kemungkinan yang besar untuk mengikis patriarkhisme tersebut, sehingga idealitas kesetaraan peran gender di organisasinya berimplikasi pada realitas. Implementasi tersebut dapat diterapkan melalui langkah awal yakni menerapkan secara konstitusional mengenai kuota perempuan di pimpinan dan sosialisasi pada anggota PWM Jatim bahwa perempuan memilki kapasitas yang layak ketika berada di elit pimpinan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

# BAB VI

# PENUTUP

## A. Kesimpulan

Dari hasil wawancara dan analisis di atas dapat disimpulkan bahwa sebagai organisasi Islam modern, Muhammadiyah memiliki pandangan tersendiri mengenai perempuan dan politik. Muhammadiyah secara idealis mendukung perempuan untuk berpartisipasi dan menjadi pemimpin dalam organisasi. Gagasan ini adalah implikasi dari pendapat muhammadiyah bahwa perempuan dan laki-laki memiliki derajat yang sama. Demikian pula mengenai hak dan kewajiban untuk berpolitik dan mengabdi di Masyarakat. Kesetaraan ini juga didukung dengan AD ART organisasi Muhammadiyah yang mengatur peran anggota perempuan dan laki-laki di organisasi, semua anggota memiliki kesempatan yang sama.

Namun, pada realitanya gagasan kesetaraan perempuan dan laki-laki dalam politik organisasi ternyata masih ada kesenjangan. Hal ini tercermin dalam hasil Musywil Pimpinan Muhammadiyah Jatim 2010 yang tak satupun dari empat perempuan calon pimpinan yang terpilih. Demikian pula dengan kuantitas perempuan yang sangat minimum di keanggotaan majelis maupun lembaga di PWM. Begitu banyak hambatan yang dihadapi perempuan Muhammadiyah untuk menjadi elit pimpinan. Padahal, melalui posisi strategis inilah perempuan Muhammadiyah yakin bahwa mereka akan dapat mewakili perempuan Muhammadiyah yang lain dalam PWM. Berbeda jika dibandingkan antara posisi



digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pimpinan dengan posisi hanya sebagai anggota, melalui posisi elit pimpinanlah pengaruh dan kekuasaan untuk berperan penting di organisasi semakin tinggi.

Di balik kapasitas perempuan Muhammadiyah yang sangat baik dan kesediaan mereka untuk berjuang di elit pimpinan ternyata tetap tak bisa lepas dari hambatan-hambatan untuk mewujudkannya. Salah satu hambatan tersebut yakni mindset patriarki yang ada pada sebagian anggota PWM Jatim. Mindset ini pula yang mendorong perempuan untuk cukup berproses pada organisasi otonom Muhammadiyah yakni Aisyiyah, dan hanya sedikit orang yang masuk dalam lembaga dan majelis PWM Jatim. Selain itu, di PWM Jatim juga belum ada upaya khusus untuk mengurangi patriarkhisme, karena belum terdapat usaha yang serius untuk meningkatkan peran perempuan melalui program kerja ataupun kebijakan keanggotaan di kepemimpinan PWM.

AD ART serta gagasan kesetaraan peran perempuan dan laki-laki di Muhammadiyah tidak selaras dengan implementasinya dalam realita distribusi peran kepemimpinan di organisasi. Perempuan masih sulit menduduki peran keanggotaan Majelis dan Lembaga, demikian pula dengan posisi sebagai pimpinan walaupun kapasitas perempuan Muhammadiyah telah diakui.

Singkatnya, para perempuan dan beberapa anggota PWM Jatim yang lain sangat sadar akan kesetaraan peran perempuan dan laki-laki di organisasi. Demikian pula AD ART yang mendukung peran perempuan di pimpinan Muhammadiyah. Akan tetapi, gagasan tersebut tidak mendapat dukungan dari sebagian anggota dan pimpinan PWM Jatim yang lain. Tidak ada usaha yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

serius untuk meningkatkan partsipasi perempuan di PWM, baik melalui program kerja maupun kebijakan organisasi. Sehingga terdapat ambivalensi antara gagasan dan implementasnya di distribusi peran kepeimpinan organisasi.

Hal ini sesuai dengan gagasan Elizabet K. Huntington yang menyatakan bahwa organisasi agama tidak ada yang sempurnya, yakni terdapat keberseberangan antara cita-cita idealis dengan implementasinya dalam organiasasi. Namun, organisasi bukanlah suatu institusi yang stagnan.

Organisasi terdiri dari beberapa orang yang saling bekerja sama untuk kebaikan dan tujuan bersama berdasarkan norma dan nilai yang disepakati. Apapun yang terjadi dalam organiasi adalah cerminan dari apa yang dikerjakan oleh individu-individu di dalamnya. Oleh sebab itu, banyaknya anggota tersebut berimplikasi pada banyaknya pemikiran yang dinamis mengenai apa yang terbaik untuk organisasi. Manusia adalah makhluk yang dinamis. Jadi, ketika individu-individu dalam organisasi tersebut lebih memiliki komitmen untuk berubah maka akan berubah pula kesan organisasi yang nampak di masyarakat. Sehingga tidak menutup kemungkinan seiring berjalannya waktu gagasan serta kebijakan kesetaraan peran perempuan dan laki-laki dapat terwujud dalam kinerja PWM serta pimpinan daerah dan cabang di Jawa Timur.

## B. Rekomendasi

Penulis merasa bahwa penelitian atas perempuan dan politik dalam persepektif elit organisasi Muhammadiyah Jatim ini masih membutuhkan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penelaahan yang lebih dalam. Terkait masalah kebijakan organisasi serta implementasinya yang berhubungan dengan kesetaraan partisipasi perempuan perlu ditinjau kembali karena organisasi adalah institusi yang dinamis.

Penelusuran gagasan perempuan dan politik dalam struktur organisasi Modern yakni Muhammadiyah membuat kita lebih mengenal idealism organisasi tentang perempuan dan politik serta implementasinya dalam kehidupan organisasi. Kiranya, idealism tersebut tidak hanya dijadikan sebagai gagasan dan kepribadian organisasi tetapi juga sebagai inspirasi dalam menumbuhkan kesadaran untuk mewujudkannya. Dengan demikian terwujudlah keseimbangan peran perempuan dan laki-laki dalam suatu institusi, terlebih dalam organisasi Islam yang notabene menjadi panutan umat yang kuantitasnya tidak sedikit.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

## DAFTAR PUSTAKA


Abdulsyani. Sosiologi: Sistematika, Teori dan Terapan. Jakarta: Bumi Aksara. 2002.

Ash-Shiddiqie, Hasbi. Lapangan Perjuangan Wanita Islam. Yogyakarta: Menara Kudus, 1952.

Buchorie, Rogayah. Wanita Islam, Sejarah Perjuangan, Kedudukan Dan Peranannya. Bandung: Baitul Hikmah, 2006.

Budiardjo, Miriam. Dasar-dasar Ilmu Politi. Jakarta: PT.Gramedia Pustaka Utama, 2002.

Burhanudin, Jajat dan Faturahman, Oman. Tentang Perempuan Islam Wacana dan Gerakan. Jakarta: PT. Tomasu, 2004.

Ch., Mufida. Paradigma Gender. Malang: Banyu Media Publishing, 2004.

Daft, Richard. Organization Theory and Design. 10th Edition. Mason : Cengage Learning, 2010.

Fairholm, Gilbert. Organizational Power Politics: Tactics in Organizational Leadership, 2nd Edition. Santa Barbara: Praeger, 2009.

Faisal, Sanapiah. Penelitian Kualitatif; Dasar-Dasar dan Aplikasi. Malang: Y3A, 1990.


digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Fakih, Mansour. Analisis Gender dan Transformasi Sosial. Jogjakarta: Pustaka Pelajar, 2003.

Fauzi, Ikhwan. Perempuan Dan Kekuasaan, Menelusuri Hak Politik Dan Persoalan Gender Dalam Islam. Jakarta: Amzah, 2002.

Gibson, James L. Organisasi Perilaku-Struktur Proses. Jakarta: Erlangga, 1996.

Haris. Politik Organisasi: Perspektif Mikro, Diagnose Psikologis. Jogjakarta: Pustaka Pelajar, 2006.

Hasyim, Syafiq. Perempuan Dalam Fikih Politik, dalam buku Hal-Hal Yang Tak Terpinggirkan Tentang Isu-Isu Perempuan Dalam Islam. Bandung: Mizan, 2001.

Huntington, P. Samuel, dan Joan Nelson, Partisipasi Politik,Jakarta: Rineka Cipta, 1994.

Iskandar. Kamus Dewan. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, Kementerian Pelajaran, 1970.

Ismah, Salman. Keluarga Sakinah Dalam 'Aisyiyah: Diskursus Jender di Organisasi Perempuan Muhammadiyah. Jakarta: PSAP, 2005.

Juhdi, Achmad. Orientasi Ideologi Gerakan Islam. Surabaya: Ipam, 2004.

Juhri, Syarifudin. Indonesia dalam Dinamlka Politik Indonesia 1966-2006. Jakarta: Pustaka Pelajar, 2010.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kattsoff, Louis. Pengantar Filsafat, terj. Soejono Soemargono. Yogyakarta: Tiara Wacana, 2004.

Kuntowijoyo. Arah Pengembangan Organisasi Wanita Islam Indonesia: Kemungkinan-Kemungkinannya, dalam Jajat Burhanudin dan Oman Faturahman. Tentang Perempuan Islam Wacana dan Gerakan. Jakarta: PT. Tomasu, 2004.

Mansur, Mas. Kijahi Hadji Ahmad Dahlan dalam Amir Hamzah Wirjosukamt, Rangkaian Mutu Manikam: Kumpulan Buah Pikiran Budiman Kijai Hadji Mas Mansur 1896-1946. Surabaya: Penyebar Ilmu Dan Ihsan, 1968.

Menteri Urusan Peran Wanita. Jender dan Sosialisasinya. Jakarta, 1986.

Miles, Mathew B. dan Huberman, A. Michael. Analisis Data Kualitatif. terj. Tjetjep Rohendi Rohidi. Jakarta: UI Press, 1992.

Moleong, Lexy. Metodologi Penelitian. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2006.

Mufid, Ahmad Syafi'i. "Penelitian Kualitatif Untuk Penelitian Agama," dalam Menuju Peneltian Keagamaan: Dalam Perspektif Penelitian Sosial, ed. Affandi Muhtar. Cirebon: Fakultas Tarbiyah IAIN Sunan Gunung Jati, 1996.

Mulia, Siti Musdah, & Farida, Anik. Perempuan Dan Politik. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka, 2005.

Mulyana, Deddy. Metodologi Penelitian Kulitatif: Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnnya. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2004.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Nugroho, Riant. Gender Dan Strategi Pengarus Utamaannya Di Indonesia. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.

Panuju, Redi. Komunikasi Organisasi: Dari Konseptual-Teoritis ke Empirik. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001.

Pfeiffer, Jeffrey. Managing with Power: Politics and Influence in Organizations. New York: Harvard Business School Press, 1992.

Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Adab fi al-Mar'ah fi al-Islam. Yogyakarta, 1989.

Ridwan. Kekerasan Berbasis Gende., Purwokerto: Fajar Pustaka. 2006.

Ritzer, George. Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda. terj. Jakarta: Rajawali, 1992.

Rusydi Dan Afif. Hamka Membahas Soal-Soal Islam. Jakarta: Pustaka Pelajar, 1983.

Salim, Agus. Teori dan Paradigma Penelitian sosial: Buku Sumber untuk Penelitian Kualitatif. Yogyakarta: Tiara Wacana, 2006.

Sanit, Arbi, Swadaya Politik Masyarakat. Jakarta: CV Rajawali, 1985.

Subagyo, Joko. Metode Penelitian Dalam Teori Dan Praktek. Jakarta: Rineka Cipta, 2004.

Sugiyono. Memahami Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: Alphabeta, 2005.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sutopo, H.B. Telaah Karya Penelitian, Sumbangsih Jurnal Penelitian. Universitas Sebelas Maret, No 1 Tahun IV. 1988.

Surbakti, Ramlan. Memahami Ilmu Politik. Jakarta: Gramedia, 1999.

Thoha, Mifta. Prilaku Organisasi: Konsep Dasar dan Aplikasinya. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1998.

Tim Penulis PWM Jatim. Menembus Benteng Tradisi. Surabaya: Hikmah Press, 2005.

Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Edisi I. Jakarta: Balai Pustaka dan Depdikbud, 1988.

Tim PWM Jatim. Memacu Semangat Dakwah Menuju Peradaban Utama. Surabaya: Hikmah Press, 2010.

Tim Penulis Al Islam Dan Kemuhammadiyahan UMM. Muhammadiyah Sejarah, Pemikiran, Dan Amal Usaha. Malang: PT. Tiara Wacana Yogyakarta dan UMM press, 1998.

Wahyudi, Andi. Muhammadiyah Dalam Gonjang-Ganjing Politik. Jogjakarta: Penerbit Media Pressindo, 1999.

http://www.krjogja.com/news/detail/53457/325.Peserta.Muswil.Muhammadiyah.Jatim.Tidak.Datang.html

Tempo interaktif Surabaya, "Struktur Baru Muhammadiyah Jawa Timur Rampung Disusun" Oleh Fatkhur Rakhman Taufik, Jumat, 15 Oktober 2010.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id